



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2025

BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Manokwari, 28 Juli 2025

Kepala Balai,

Dr. Yong Farmanta, SP., M.Si
NIP. 19790116 200312 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	Iv
Daftar Tabel	v
Ringkasan	vii
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	61
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	76
F. Pengungkapan Penting Lainnya	84
VI. Lampiran dan Daftar	91



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON (0986) 2213347
WEBSITE: papuabarat.brmp.pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Manokwari, 28 Juli 2025

Kepala Balai,

Dr. Yong Farmanta, SP., M.Si
NIP. 19790116 200312 1 002

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025.....	28
Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025.....	28
Tabel 3. Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025	29
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025	30
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.....	31
Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	31
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	32
Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	32
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan	33
Tabel 10. Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker	33
Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	34
Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025.....	34
Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	35
Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	35
Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025	36
Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025.....	36
Tabel 17. Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 18. Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 19. Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	38
Tabel 20. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	39
Tabel 21. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	39
Tabel 22. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	40
Tabel 23. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024..	40
Tabel 24. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	41
Tabel 25. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	41
Tabel 26. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	42
Tabel 27. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	42
Tabel 28. Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 30 Juni 2025.....	43
Tabel 29. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	44
Tabel 30. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah.....	44
Tabel 31. Rincian Tanah Berdasarkan NUP.....	45
Tabel 32. Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat	45
Tabel 33. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin.....	45
Tabel 34. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan.....	46
Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan.....	47
Tabel 36. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya.....	48
Tabel 37. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	48
Tabel 38. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	49
Tabel 39. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	51
Tabel 40. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	51
Tabel 41. Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	51
Tabel 42. Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	52
Tabel 43. Saldo Tagihan TP/TG per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	52

Tabel 44. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	53
Tabel 45. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	53
Tabel 46. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	54
Tabel 47. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	54
Tabel 48. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	55
Tabel 49. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	57
Tabel 50. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	58
Tabel 51. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024	58
Tabel 52. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024.....	59
Tabel 53. Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	61
Tabel 54. Rincian Pendapatan Perpajakan TA 2025 dan 2024.....	61
Tabel 55. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2025 dan 2024	62
Tabel 56. Rincian Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024.....	62
Tabel 57. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	63
Tabel 58. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	63
Tabel 59. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024.....	64
Tabel 60. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	65
Tabel 61. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	66
Tabel 62. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO.....	66
Tabel 63. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO.....	67
Tabel 64. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO	68
Tabel 65. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	69
Tabel 66. Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO	70
Tabel 67. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024.....	70
Tabel 68. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024	71
Tabel 69. Kegiatan Non Operasional BRMP Papua Barat Tahun 2025 dan 2024.....	72
Tabel 70. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025	72
Tabel 71. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	74
Tabel 72. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	74
Tabel 73. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025	76
Tabel 74. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025.....	78
Tabel 75. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025.....	79
Tabel 76. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025	80
Tabel 77. Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025.....	83
Tabel 78. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025	83
Tabel 79. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025	83

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp81.301.900 atau mencapai 159,34 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp51.025.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp1.932.304.949 atau mencapai 35,32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.470.107.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester I tahun 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp82.368.256.582 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp437.712.400; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp81.930.544.182; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp294.278.645 dan Rp82.073.977.937.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp83.344.300, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.689.689.081 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.606.344.781. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.606.344.781.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp82.829.319.669 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp2.606.344.781 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.851.003.049 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp82.073.977.937.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Diatas (Dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah						
Pendapatan Perpajakan		0	0	0	0,00	0
Pajak Dalam Negeri		0	0	0	0,00	0
Pajak Perdagangan Internasional		0	0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	51.025.000	81.301.900	30.276.900	159,34	90.563.516
Pendapatan Sumber Daya Alam		0	0	0	0,00	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0	0	0	0,00	0
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0	0,00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	51.025.000	81.301.900	30.276.900	159,34	90.563.516
Penerimaan Hibah		0	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		51.025.000	81.301.900	30.276.900	159,34	90.563.516
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	B.2	5.470.107.000	1.932.304.949	(3.537.802.051)	35,32	2.399.585.036
Belanja Pegawai	B.2.1	1.774.824.000	935.567.348	(839.256.652)	52,71	876.029.454
Belanja Barang	B.2.2	3.695.283.000	996.737.601	(2.698.545.399)	26,97	1.523.555.582
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara		5.470.107.000	1.932.304.949	(3.537.802.051)	35,32	2.399.585.036

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	120.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Beban Dibayar di Muka	C.4	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.6	2.412.400	370.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.8	0	0
Persediaan	C.9	315.300.000	348.200.000
JUMLAH ASET LANCAR		437.712.400	348.570.000
ASET TETAP			
Tanah	C.1	53.125.000.000	53.125.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2	6.225.270.375	6.365.970.375
Gedung dan Bangunan	C.3	32.926.434.836	32.926.434.836
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.4	629.266.110	629.266.110
Aset Tetap Lainnya	C.5	480.000	480.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(10.975.907.139)	(10.425.701.652)
Properti Investasi	C.8	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.9	0	0
JUMLAH ASET TETAP		81.930.544.182	82.480.749.669
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR	C.11	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.12	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.14	6.115.000	6.115.000
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.15	0	0
Aset Lain-Lain	C.16	115.536.104	115.536.104
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(121.651.104)	(121.651.104)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0

JUMLAH ASET		82.368.256.582	82.829.319.669
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	133.018.976	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.19	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.20	120.000.000	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.21	41.259.669	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.22	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		294.278.645	0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Konsesi Jasa		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.23	82.073.977.937	82.829.319.669
JUMLAH EKUITAS		82.073.977.937	82.829.319.669
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		82.368.256.582	82.829.319.669

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	83.344.300	38.224.100
Pendapatan Hibah	D.3	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		83.344.300	38.224.100
BEBAN			
Beban Pegawai	D.4	1.068.586.324	980.695.387
Beban Persediaan	D.5	1.626.000	20.443.500
Beban Barang dan Jasa	D.6	620.976.758	664.029.417
Beban Pemeliharaan	D.7	340.718.359	747.729.639
Beban Perjalanan Dinas	D.8	74.876.153	133.821.098
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.9	32.700.000	5.880.000
Beban Bantuan Sosial	D.10	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.11	550.205.487	585.384.112
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.12	0	0
JUMLAH BEBAN		2.689.689.081	3.137.983.153
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.606.344.781)	(3.099.759.053)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	39.822.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	0	39.822.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.14	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	14.929.816
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	0	14.929.816
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	54.751.816
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.606.344.781)	(3.045.007.237)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.17	0	0
Beban Luar Biasa	D.18	0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO	D.19	(2.606.344.781)	(3.045.007.237)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	82.829.319.669	83.443.219.289
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.606.344.781)	(3.045.007.237)
DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0	0
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.851.003.049	2.309.021.520
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(755.341.732)	(735.985.717)
EKUITAS AKHIR	E.6	82.073.977.937	82.707.233.572

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat merupakan unit pelaksana teknis dibawah Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian yang berkedudukan di Jalan Trikora Anday Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- c. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- d. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- e. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat sejalan dengan Kementerian Pertanian berkomitmen dengan visi ***"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai misi :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 26 Juli 2025 (setelah dilakukan tutup periode permanen).

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp4.370.107.000,00. Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Efisiensi belanja Kementerian Pertanian TA 2025 yang tertuang dalam Memorandum Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/RC.110/M/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 sebagai langkah tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara TA 2025, ditetapkan efisiensi belanja Kementerian Pertanian TA 2025 sebesar Rp10.282.962.000.000 dari total pagu sebesar Rp29.373.984.361.000. Dari jumlah efisiensi belanja tersebut terdiri dari efisiensi 9 (sembilan) Eselon I yang terdapat pada Kementerian Pertanian. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai salah satu Eselon I Kementerian Pertanian ditetapkan efisiensi sebesar Rp119.031.434.000 dari pagu Rp929.038.379.000. Untuk Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat ditetapkan jumlah efisiensi sebesar Rp279.987.000.
2. Penambahan pagu anggaran untuk Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian yaitu Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi sebagai upaya swasembada pangan yang tertuang dalam DIPA revisi 3 tanggal 25 Maret 2025.

Sehingga dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp5.470.107.000,00

**Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja BRMP
Papua Barat
Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	4.370.107.000
2024	6.217.347.000
2023	4.117.972.000
2022	10.248.636.000

A.1. Basis Akuntansi

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.2. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.3. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Semester I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan, Pendapatan PNBPN-LO layanan, Pendapatan PNBPN-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBPN-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas

perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka

piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;

- (2) biaya pengangkutan;
- (3) biaya penanganan;
- (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock

opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam

menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;

2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

- c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
 - 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan,

jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan

- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (*probable*). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp81.301.900 atau 159,34% dari anggaran sebesar Rp51.025.000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNBPA Lainnya	51.025.000	81.301.900	159,34	90.563.516
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	50.000.000	72.399.400	144,80	75.633.700
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.025.000	8.532.500	832,44	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0,00	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0,00	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0,00	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	370.000	0,00	14.929.816
Jumlah		51.025.000	81.301.900	159,34	90.563.516

Realisasi PNBPA TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini.

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 30 Juni 2025 sebesar Rp0 disebabkan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat bukan merupakan BLU.

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp81.301.900 atau 159,34% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp51.025.000. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.261.616 atau 10,23% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	50.000.000	72.399.400	75.633.700	(3.234.300)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	1.025.000	8.532.500	0	7.507.500
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
Pendapatan Denda	0	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	370.000	14.929.816	(14.559.816)
Jumlah	51.025.000	81.301.900	90.563.516	(9.261.616)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp72.399.400 merupakan penerimaan yang berasal dari
 - a) Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (perolehan dari hasil penjualan Benih Sumber Padi SS, cabai rawit, cabai keriting, jeruk manis, jagung manis dan aneka sayuran);
 - b) Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan serta pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi berupa sewa rumah dinas.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp8.532.500 yang merupakan pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya yang merupakan pendapatan dari pengujian laboratorium.
 - a. Pengujian kadar air
 - b. Pengujian kadar abu
 - c. Pengujian kadar lemak
 - d. Pengujian kadar protein
3. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan Tahun 2025 sebesar Rp0
4. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi sebesar Rp0.
5. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp0

6. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp0.
7. Pendapatan lain-lain sebesar Rp370.000 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (pengembalian tunjangan umum 1 pegawai). dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	370.000	Pengembalian tunjangan umum 1 pegawai
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	370.000	-

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.
3. Sedangkan untuk PNBPN fungsional yang berasal dari penjualan hasil pertanian mengacu pada rekomendasi persetujuan harga produk perolehan dari hasil pertanian yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian Nomor B-7636/KU.030/A.4/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Nomor B-8877/KU.030/A.4/09/2023 tanggal 29 September 2023.

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu per tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut.

Pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (425911) sebesar Rp370.000 merupakan pengembalian tunjangan umum 1 pegawai berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/KPTS/KP.320/A/02/2025 tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Program Doktor (S-3) di dalam Negeri dan Luar Negeri Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian An. Mimin Yulita Kusumaningrum yang semula 4 (empat) tahun TMT 14 September 2020 s.d 13 September 2024 diperpanjang 6 (enam) bulan TMT 14 September 2024 s.d. 13 Maret 2025. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian tersebut maka Surat BPSIP/BRMP Papua Barat Nomor B-456/KP.230/H.12.31/09/2024 tanggal 25 September 2024 tentang

Pernyataan Melaksanakan Tugas An. Mimin Yulita Kusumaningrum, S.T.P., M.Sc dinyatakan tidak berlaku.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNPB per mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran laporan keuangan ini.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp1.932.304.949 atau 35,32% dari anggaran belanja sebesar Rp5.470.107.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	1.774.824.000	935.567.348	52,71	876.029.454
Belanja Barang	3.695.283.000	996.737.601	26,97	1.523.555.582
Belanja Modal	0	0	0,00	0
Jumlah	5.470.107.000	1.932.304.949	35,32	2.399.585.036

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	0	0	0,00	0
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	18.524.000	0	0,00	37.789.416
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	0	0	0,00	28.280.000
Program Dukungan Manajemen	5.451.583.000	1.932.304.949	35,32	26.247.074.502
Jumlah	5.470.107.000	1.932.304.949	35,32	26.313.143.918

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada Lampiran laporan keuangan ini.

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp467.280.087 atau 19,47%, apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya pemblokiran anggaran pada kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian serta kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang menyebabkan sebagian besar kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi utama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat belum bisa berjalan dengan maksimal.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp935.567.348 dan Rp876.029.454. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp59.537.894 atau 6,80% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena :

1. Adanya penambahan 6 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
2. Adanya penambahan 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	1.498.268.000	848.210.328	56,61	840.027.471
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	255.100.000	87.357.020	34,24	36.001.983
Belanja Lembur	21.456.000	0	0,00	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	1.774.824.000	935.567.348	52,71	876.029.454

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran laporan keuangan ini.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp996.737.601 dan Rp1.523.555.582. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	3.695.283.000	996.737.601	26,97	1.523.555.582
Belanja Barang Operasional	1.167.026.000	439.680.231	37,68	449.264.699
Belanja Barang Non Operasional	91.360.000	30.184.540	33,04	65.219.500
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	25.365.000	1.426.000	5,62	17.690.000
Belanja Jasa	578.231.000	141.383.807	24,45	131.423.221
Belanja Jasa	578.231.000	141.383.807	24,45	131.423.221
Belanja Pemeliharaan	867.092.000	311.502.870	35,93	740.826.639
Belanja Pemeliharaan	867.092.000	311.502.870	35,93	740.826.639
Belanja Perjalanan Dinas	966.209.000	72.560.153	7,51	119.131.523
Belanja Perjalanan DN	966.209.000	72.560.153	7,51	119.131.523
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	5.470.107.000	1.932.304.949	35,32	2.399.585.036

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp1.932.304.949 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1.167.026.000	439.680.231	37,68	449.264.699
Belanja Barang Non Operasional	91.360.000	30.184.540	33,04	65.219.500
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	25.365.000	1.426.000	5,62	17.690.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.365.000	1.426.000	5,62	17.690.000
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	867.092.000	311.502.870	35,93	740.826.639
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	644.082.000	200.073.340	31,06	519.418.700
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223.010.000	111.429.530	49,97	221.407.939
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	2.150.843.000	782.793.641	36,40	1.273.000.838

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran laporan keuangan ini.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 10. Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0

Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dianggarkan sebesar Rp0 dan direalisasikan sebesar Rp0. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
-	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reuiew oleh Inspektorat sebesar Rp0.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan periode Semester I tahun 2024 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tidak mendapatkan alokasi anggaran belanja modal. Alokasi belanja modal pada TA 2024 baru terdapat pada DIPA Revisi 10 tanggal 17 September 2024, sedangkan pada tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tidak mendapatkan alokasi anggaran Belanja Modal.

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut

secara signifikan dipengaruhi oleh tidak adanya transaksi Belanja Modal Tanah pada TA 2025 karena tidak tersedianya alokasi anggaran Belanja Modal Tanah pada tahun 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya transaksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 karena tidak tersedianya alokasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025.

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0, sebesar Rp0 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Tidak adanya kenaikan/penurunan anggaran belanja gedung dan bangunan TA 2025 bila dibandingkan dengan TA 2024, salah satunya dipengaruhi oleh sampai dengan periode Semester I tahun 2024 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tidak mendapatkan alokasi anggaran belanja modal. Alokasi belanja modal gedung dan bangunan (pembuatan pagar lingkungan kantor) pada TA 2024 baru terdapat pada DIPA Revisi 10 tanggal 17 September 2024. Sedangkan pada tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tidak mendapat alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0, sebesar Rp0 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan TA 2024.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Tidak adanya realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 yang disajikan pada tabel di atas disebabkan tidak adanya transaksi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2025 karena tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL. Hal ini disebabkan tidak adanya transaksi Belanja Modal Lainnya pada TA 2025 karena tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Modal Lainnya pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp82.368.256.582 dan Rp82.829.319.669. Saldo Aset per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp461.063.087 atau 0,56 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	437.712.400	348.570.000
Aset Tetap	81.930.544.182	82.480.749.669
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	0	0
Jumlah	82.368.256.582	82.829.319.669

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp437.712.400 dan Rp348.570.000. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp89.142.400,00 atau 25,57 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	120.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	2.412.400	370.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	315.300.000	348.200.000
Jumlah	437.712.400	348.570.000

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000,00 atau 100,00 %, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	18.794.731	0	18.794.800
2	Bank Mandiri No.Rekening 8100124508711 000	59.945.600	0	59.945.600
3	Bank Mandiri No.Rekening 1600005170002	0	0	0
4	Kwitansi TUP belum di SPM kan	41.259.669	0	41.259.669
Jumlah		120.000.000	0	120.000.000

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

Tabel 20. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 tidak

mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total	0	0	0

C.5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Pendapatan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.6. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.412.400 dan Rp370.000.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.042.400 atau 552,00 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Piutang Bukan Pajak senilai Rp2.412.400 merupakan sewa rumah dinas yang dipotong dari gaji induk bulan Juli 2025 (SPM 00074T/450871/2025).

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2025	2.412.400	0	2.412.400
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan		0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi		0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan		0	0	0
4258	Pendapatan Denda		0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	0	370.000	(370.000)
Jumlah			2.412.400	370.000	2.042.400

C.7. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30

Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
Total		0	0	0

C.9. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp315.300.000 dan Rp348.200.000. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.900.000,00 atau 9,45% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	200.000	(200.000)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	315.300.000	348.000.000	(32.700.000)
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	0	0	0

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		315.300.000	348.200.000	32.900.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp200.000 berupa ATK dan komputer suplai (Ordner), hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa benih padi SS (*Stock Seed*) atau benih pokok label ungu yang sudah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat (Varietas Cigeulis, Ciherang, Mekongga, Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 47) sebesar Rp32.700.000. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan

Pada 30 Desember 2024 Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan surat Nomor S-221/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25 : Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan. Berdasarkan petunjuk teknis akuntansi tersebut, atas persediaan yang berasal dari Belanja Barang 526 yang telah diserahkan ke pemda sehingga fisiknya tidak lagi dikuasai oleh Kementerian Pertanian (Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat), dilakukan pembebanan sebagai Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat sehingga tidak lagi dicatat di Neraca (*off balance sheet*). Namun demikian, atas barang tersebut masih dicatat dalam Laporan BMN sebagai Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 30 Juni 2025

No.	Jenis Persediaan	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah		
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
	Jumlah	0	0
Total		0	0

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp81.930.544.182 dan Rp82.480.749.669. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp550.205.487 atau 0,67% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	53.125.000.000	53.125.000.000	0
2	Peralatan dan Mesin	6.225.270.375	6.225.270.375	0
3	Gedung dan Bangunan	32.926.434.836	32.926.434.836	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	629.266.110	629.266.110	0
5	Aset Tetap Lainnya	480.000	480.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(10.975.907.139)	(10.425.701.652)	(550.205.487)
Jumlah		81.930.544.182	82.480.749.669	(550.205.487)

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp53.125.000 dan Rp53.125.000. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	53.125.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 30 Juni 2025	53.125.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	Luas dan Alamat	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	20.000 m ² Jl. Trikora Anday, Kompleks Kasawan Terpadu Kementerian Pertanian, Kel. Anday, Kec. Manokwari Selatan, Kab. Manokwari Papua Barat	53.125.000.000	53.125.000.000	0
Jumlah			53.125.000.000	53.125.000.000	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 0 NUP Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp0 belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 32. Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No	Jenis Tanah	Jml NUP	Nilai Perolehan (Rp)
1			0
2			0
3			0
Jumlah		0	0

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.225.270.375 dan Rp6.225.270.375. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 33. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2024	6.225.270.375
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 30 Juni 2025	6.225.270.375

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp32.926.434.836 dan Rp32.926.434.836. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	32.926.434.836
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per 30 Juni 2025	32.926.434.836

C.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp629.266.110 dan Rp629.266.110. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	629.266.110
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 30 Juni 2025	629.266.110

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp480.000 dan Rp480.000. Aset tersebut merupakan bahan-bahan perpustakaan yang terdiri dari buku dan majalah. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan

dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	480.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 30 Juni 2025	480.000

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0

7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 30 Juni 2025	0

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.975.907.139 dan Rp10.425.701.652. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp550.205.487 atau 5,28% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(5.902.163.864)	(5.714.487.103)	(187.676.761)
2	Gedung dan Bangunan	(4.790.125.780)	(4.435.291.273)	(354.834.507)
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(283.617.495)	(275.923.276)	(7.694.219)
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(10.975.907.139)	(10.425.701.652)	(550.205.487)

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	187.676.761	187.676.761	0
2	Gedung dan Bangunan	354.834.507	354.834.507	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	7.694.219	7.694.219	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		550.205.487	550.205.487	0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0

	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1				
Jumlah				

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 40. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1		0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41. Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Total				

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 43. Saldo Tagihan TP/TG per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Total		0	0	0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni

2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	6.115.000	6.115.000	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	115.536.104	115.536.104	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(121.651.104)	(121.651.104)	0
Jumlah		0	0	0

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.115.000,00 dan Rp6.115.000,00. Aset Tak Berwujud pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat berupa *software*. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB per 31 Desember 2024	6.115.000
1	Saldo Awal	0

B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB per 30 Juni 2025	6.115.000

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 46. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	6.115.000	6.115.000	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		6.115.000	6.115.000	0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran laporan keuangan ini.

C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1					
Jumlah		0	0	0	0

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp115.536.104 dan Rp115.536.104. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 48. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya				0
		Tanah	0	0	
		Peralatan dan Mesin	115.536.104	115.536.104	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	0	0	0
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban		0	0	0
Total			115.536.104	115.536.104	0

Terdapat peristiwa yang berpengaruh terhadap transaksi aset lain-lain pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Aset tetap yang sudah tidak digunakan dalam operasional kantor dikarenakan kondisinya sudah tidak layak (rusak berat) dan umur ekonomisnya telah habis senilai Rp200.000.000 berupa kendaraan roda 4 Minibus Toyota Kijang Innova G M/T tahun perolehan 2007 Nomor Polisi DS5821PB/PB7164G yang dituangkan dengan Surat
- Kepala BPSIP Papua Barat yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Sorong Nomor B-251/PL.020/I.12.31/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Usulan Penghapusan BMN pada Satker BPSIP Papua Barat. Kendaraan tersebut telah terjual secara lelang pada tanggal 27 Juni 2024 dan unit kendaraan telah diserahkan terimakan kepada pembeli pada tanggal 3 Juli 2024 (BAST Nomor B-318/PL.320/H.12.31/07/2024). Setelah proses lelang kendaraan selesai selanjutnya secara berjenjang BPSIP/BRMP Papua Barat membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nomor B-424/PL/320/H.12.31/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN dan dilanjutkan dengan Surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditujukan kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-1151/PL.320/H/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN pada Satker BPSIP Papua Barat. Dan pada bulan Januari 2025 telah terbit Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27/Kpts/PL.320/A/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Papua Barat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (Kode Satker 018.09.3300.450871KD)

- c. Perubahan kondisi BMN berupa PC Unit dan Note Book yang sebelumnya dicatat dalam aset tetap yang sudah tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berubah menjadi aset peralatan dan mesin karena kondisi barang sudah dalam kondisi baik dan dapat digunakan kembali senilai Rp59.300.000 (Surat Pernyataan Kepala BPSIP Papua Barat Nomor B-135/PL.330/H.12.31/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Surat Pernyataan Perubahan Kondisi BMN pada Aplikasi Sakti).

Terdapat saldo aset lain-lain senilai Rp115.536.104 ini merupakan aset rusak berat yang kondisinya sudah tidak efektif lagi untuk mendukung operasional kedinasan sebanyak 12 unit barang (6 unit AC Split, 3 unit PC Unit, 3 unit Note Book) yang sudah dilakukan usulan persetujuan penjualan dari BSIP ke Sekretariat Jenderal melalui Surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ditujukan kepada Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-779/PL.320/H/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN berupa Alsin pada Satker BPSIP Papua Barat, setelah sebelumnya BPSIP Papua Barat membuat usulan penghapusan dengan surat Kepala BPSIP Papua Barat yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) Nomor B-259/PL.020/I.12.31/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Usulan Penghapusan BMN pada Satker BPSIP Papua Barat, namun sampai dengan 30 Juni 2025 masih menunggu persetujuan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp121.651.104 dan Rp121.651.104. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 49. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	6.115.000	6.115.000	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		6.115.000	6.115.000	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	115.536.104	115.536.104	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		115.536.104	115.536.104	0
Total			121.651.104	121.651.104	0

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp294.278.645 dan Rp0. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp294.278.645 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp294.278.645 dan Rp0. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp294.278.645 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 50. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	133.018.976	0	133.018.976
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	120.000.000	0	120.000.000
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
5	Utang Yang Belum Ditagihkan	41.259.669	0	41.259.669
Jumlah		294.278.645	0	294.278.645

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp133.018.976 dan Rp0. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp133.018.976 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp133.018.976 merupakan Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PNS Bulan Juli 2024 untuk 20 pegawai/49 jiwa senilai Rp94.817.736.000 (SPM Nomor 00074T/450871/2025 tanggal SPM 3 Juni 2025 dan tanggal SP2D 1 Juli 2025); Gaji Induk PNS Bulan Juli 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa senilai Rp7.825.674 (SPM Nomor 00080T/450871/2025 tanggal SPM 5 Juni 2025 dan tanggal SP2D 1 Juli 2025); serta Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025 untuk 8 pegawai/19 jiwa senilai Rp30.375.566 (SPM Nomor 00078T/450871/2025 tanggal SPM 4 Juni 2025 dan tanggal SP2D 1 Juli 2025).

Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 51. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	102.643.410	0	102.643.410
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	30.375.566	0	30.375.566
	Jumlah		133.018.976	0	133.018.976
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak BLU	Belanja Barang	0	0	0

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Jumlah	0	0	0
	Total	133.018.976	0	133.018.976

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis PNB	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
	Total	0	0	0

C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024. Saldo Uang Muka dari KPPN sebesar Rp120.000.000 merupakan Uang Persediaan (UP) senilai Rp60.000.000 dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai Rp60.000.000.

C.21. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp41.259.669 dan Rp0. Pada periode pelaporan ini nilai utang yang belum ditagihkan sebesar Rp41.259.669 berasal dari transaksi pembayaran yang telah dilakukan menggunakan mekanisme TUP tetapi sampai dengan periode pelaporan 30 Juni 2025 belum dibuatkan SPM dan diterbitkan SP2D.

C.22. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.23. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp82.073.977.937 dan Rp82.829.319.669. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp755.341.732 atau 0,91% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 53. Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	83.344.300	38.224.100
Beban Operasional	2.689.689.081	3.137.983.153
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(2.606.244.781)	(3.099.759.053)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0, atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 54. Rincian Pendapatan Perpajakan TA 2025 dan 2024

<i>(dalam Rupiah)</i>			
Uraian	2025	2024	%
Jumlah	0	0	0,00

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp83.344.300 dan Rp38.224.100. Pendapatan penerimaan Negara bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 118,04 % dibanding pada Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp83.344.300 merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya adalah penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp83.344.300 dan Rp38.224.100. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.120.200 atau 118,04% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp81.301.900 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp83.344.300 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.042.400 yang merupakan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi (sewa rumah dinas) yang dipotong dari gaji induk pegawai bulan Juli 2025. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel 55. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	57.925.000	20.285.500	185,55
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	17.938.600	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	16.516.800	0	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	8.532.500	0	0,00
Jumlah	83.344.300	38.224.100	118,04

D.3. Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 56. Rincian Pendapatan Hibah TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Jumlah	0	0	0,00

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.689.689.081 dan Rp3.137.983.153. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp448.294.072 atau 14,29% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.4. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah. Nilai Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.068.586.324 dan Rp980.695.387. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp87.890.937 atau 8,96% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena :

1. Ada penambahan 12 pegawai baru dengan rincian 5 orang pegawai CPNS yang SPMT nya 28 Mei 2025 dan 7 orang pegawai PPPK yang SPMT nya 30 April 2025.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	950.853.738	940.452.330	10.401.400
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	117.732.586	40.243.057	77.489.529
Beban Lembur	0	0	0
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	1.068.586.324	980.695.387	87.890.937

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 58. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	848.210.328	950.853.738	102.643.410
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	87.357.020	117.732.586	30.375.566

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Lembur	0	0	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transit	0	0	0
Jumlah	935.567.348	1.068.586.324	133.018.976

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp133.018.976. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Belanja pegawai bulan Juli 2025 yang SPM nya dibuat pada bulan Juni 2025 namun nomor SP2D terbit pada tanggal 1 Juli 2025 berupa Gaji Induk PNS Bulan Juli 2024 untuk 20 pegawai/49 jiwa senilai Rp94.817.736 (SPM Nomor 00074T/450871/2025 tanggal SPM 3 Juni 2025 dan tanggal SP2D 1 Juli 2025); Gaji Induk PNS Bulan Juli 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa senilai Rp7.825.674 (SPM Nomor 00080T/450871/2025 tanggal SPM 5 Juni 2025 dan tanggal SP2D 1 Juli 2025); serta Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025 untuk 8 pegawai/19 jiwa senilai Rp30.375.566 (SPM Nomor 00078T/450871/2025 tanggal SPM 4 Juni 2025 dan tanggal SP2D 1 Juli 2025).

D.5. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.626.000 dan Rp20.443.500. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.817.500 atau 92,05%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 59. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang	813.988.310	1.295.727.604	(481.739.294)
Beban Barang Operasional	441.400.411	449.480.699	(8.080.288)
Beban Barang Non Operasional	30.243.540	78.073.766	(47.830.226)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	1.626.000	20.443.500	(18.817.500)
Beban Pemeliharaan	340.718.359	747.729.639	(407.011.280)
Beban BLU	0	0	0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	813.988.310	1.295.727.604	(481.739.294)

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 60. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang	782.793.641	813.988.310	31.194.669
Belanja/Beban Barang Operasional	439.680.231	441.400.411	1.720.180
Belanja/Beban Barang Non Operasional	30.184.540	30.243.540	59.000
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	1.426.000	1.626.000	200.000
Belanja/Beban Pemeliharaan	311.502.870	340.718.359	29.215.489
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	782.793.641	813.988.310	31.194.669

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp31.194.669. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	
Saldo awal	200.000
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Kwitansi TUP bulan Juni 2025 yang belum di SPM kan	30.994.669
Jumlah	31.194.669

D.6. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa

ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp620.976.758 dan Rp664.029.417. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp43.052.659 atau 6,48% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 61. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	441.400.411	449.480.699	(8.080.288)
Beban Barang Non Operasional	30.243.540	78.073.766	(47.830.226)
Beban Kontribusi dan Kompensasi			
Beban Barang Persediaan			
Beban Jasa			
Beban Jasa	149.332.807	136.474.952	12.857.855
Beban BLU			
Beban Barang BLU			
Jumlah	620.976.758	664.029.417	(43.052.659)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 62. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang	611.248.578	620.976.758	9.728.100
Belanja/Beban Barang Operasional	439.680.231	441.400.411	1.720.180
Belanja/Beban Barang Non Operasional	30.184.540	30.243.540	59.000
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa	0	0	0
Belanja/Beban Jasa	141.383.807	149.332.807	7.949.000
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	611.248.578	620.976.758	9.728.180

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp9.728.180,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Pencatatan Hibah	
Tercatat sebagai Beban Banpem	
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
Penurunan Piutang	

Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Kwitansi TUP bulan Juni 2025 yang belum di SPM kan	9.728.180
Jumlah	9.728.180

D.7. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp340.718.359 dan Rp747.729.639. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp407.011.280 atau 54,43% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp311.502.870 nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp29.215.489. Selisih tersebut adalah:

Tabel 63. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan	311.502.870	340.718.359	29.215.489
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.073.340.	220.285.840	20.212.500
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.429.530	120.432.519	9.002.989
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Belanja/Beban BLU	0	0	0
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	311.502.870	340.718.359	29.215.489

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0

Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	0
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Kwitansi TUP bulan Juni 2025 yang belum di SPM kan	29.215.489
Jumlah	29.215.489

D.8. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp74.876.153 dan Rp133.821.098. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.944.945 atau 44,05% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 disebabkan oleh frekuensi perjalanan dinas yang menurun karena adanya pemblokiran anggaran pada kegiatan dukungan manajemen fasilitasi perakitan dan modernisasi pertanian terutama pada subkomponen pendampingan program strategis kementerian pertanian akibat proses dinamika kelembagaan dari BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) ke BRMP (Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian). Pembukaan blokir sebagian perjalanan dinas tertuang dalam DIPA Revisi 5 tanggal 30 April 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp72.560.153, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih besar yaitu senilai Rp74.876.153. Selisih tersebut adalah:

Tabel 64. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.560.153	74.876.153	2.316.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	72.560.153	74.876.153	2.316.000

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Kwitansi TUP bulan Juni 2025 yang belum di SPM kan	2.316.000
Jumlah	2.316.000

D.9. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp32.700.000 dan Rp5.880.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.820.000 atau 456,12% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Pada tahun 2025 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp32.700.000 merupakan hasil penjualan 2.725 kg benih padi SS (*Stock Seed*) atau benih pokok label ungu yang sudah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat (Varietas Cigeulis, Ciherang, Mekongga, Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 47). Sedangkan tahun 2024 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat secara cuma-cuma senilai Rp5.880.000 adalah berupa benih kopi arabika yang telah diserahkan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 65. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda (Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat)	32.700.000	5.880.000	26.820.000
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	32.700.000	5.880.000	26.820.000

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 66. Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	32.700.000	32.700.000
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	32.700.000	32.700.000

D.10. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Jumlah Beban	0	0	0

D.11. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp550.205.487 dan Rp585.384.112. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.178.625 atau 6,01% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 67. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	187.676.761	224.655.086	(36.978.325)
		Gedung dan Bangunan	354.834.507	353.034.807	1.799.700
		Jalan Irigasi dan Jaringan	7.694.219	7.694.219	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Jumlah		550.205.487	585.384.112	(35.178.625)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			550.205.487	585.384.112	(35.178.625)

D.12. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 68. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp2.606.344.781. Nilai defisit tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp493.414.272 atau 15,92% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp3.099.759.053.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 69. Kegiatan Non Operasional BRMP Papua Barat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	39.822.000
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	14.929.816
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	54.751.816

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp39.822.000. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.822.000 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.13. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp39.822.000. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.822.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024. Pada tahun 2025 tidak terdapat pendapatan pelepasan aset, sedangkan pendapatan pelepasan aset tahun 2024 merupakan penjualan Peralatan dan Mesin (Kendaraan roda 4 Minibus Toyota Kijang Innova G M/T tahun perolehan 2007 Nomor Polisi DS5821PB/PB7164G) senilai Rp 39.822.000 yang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 193/82/2024 Tanggal 27 Juni 2024 dan Hasil Pelaksanaan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong (KPKNL Sorong) dengan **Kode Lot Lelang** CKEFHX, **NTPN** 490D96U8EUKBH2EO **NTB** 280852902010 **Kode Billing** 820240628517336 Tanggal Penerimaan 28 Juni 2024. Kendaraan tersebut telah terjual secara lelang pada tanggal 27 Juni 2024 dan unit kendaraan telah diserahkan terimakan kepada pembeli pada tanggal 3 Juli 2024 (BAST Nomor B-318/PL.320/H.12.31/07/2024).

Tabel 70. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

D.14. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp14.929.816. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.929.816 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.15. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp14.929.816. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.929.816 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024. Pada tahun 2025 tidak terdapat pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pada tahun 2024 pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 14.929.816 merupakan pengembalian belanja tunjangan fungsional peneliti sebanyak 3 pegawai; pengembalian belanja tunjangan fungsional Pustakawan Ahli Pertama sebanyak 1 pegawai; pengembalian belanja tunjangan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda sebanyak 1 pegawai; pengembalian belanja tunjangan fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil sebanyak 1 pegawai.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 71. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian			30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	0	14.929.816	(14.929.816)
			Belanja Barang	0	0	0
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	0	0	0
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				0	14.929.816	(14.929.816)

D.16. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 72. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian			30 Juni 2025 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp54.751.816,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp54.751.816.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.17. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.18. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.19. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengalami Defisit LO sebesar Rp2.606.344.781. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp438.662.456 atau 14,41% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp3.045.007.237.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp82.829.319.669 dan Rp83.443.219.289. Nilai Ekuitas Awal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp613.899.620 atau 0,74% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal tahun 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.606.344.781 dan Rp3.045.007.237. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp438.662.456 atau 14,41% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 73. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 74. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 75. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 76. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Jumlah		0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.851.003.049 dan Rp2.309.021.520.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.932.304.949 dan Rp2.399.585.036. Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp1.932.304.949 berasal dari transaksi belanja negara sampai dengan periode pelaporan (Semester I Tahun 2025). Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp467.280.087 atau 19,47% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp81.301.900 dan Rp90.563.516. Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) berasal dari transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.261.616 atau 10,23% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada transaksi Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 baik yang terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian maupun dengan kementerian/lembaga lain dan BUN. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada transaksi Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 baik yang terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian maupun dengan kementerian/lembaga lain dan BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 77. Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 78. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
3					
	TOTAL				

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 79. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
	TOTAL				

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 30 Juni 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp755.341.732. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar

Rp19.356.015 atau 2,63% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp735.985.717.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp82.073.977.937 dan Rp82.707.233.572. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp633.255.635 atau 0,77% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang disahkan tanggal 27 Maret 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025 tepatnya Bulan Mei 2025.

F.2. Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Adanya pergantian Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat yang dilantik pada tanggal 15 Mei 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang semula dijabat oleh Dr. Aser Rouw, SP, M. Si menjadi Dr. Yong Farmanta, SP, M. Si.

F.3. Revisi DIPA

DIPA pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat sampai dengan periode 30 Juni 2025 telah mengalami revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali

1. Revisi pertama pada tanggal 12 Februari 2025 (revisi pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan I 2025)
2. Revisi kedua pada tanggal 20 Februari 2025 (efisiensi belanja APBN)
3. Revisi ketiga pada tanggal 25 Maret 2025 (Buka blokir operasional dan pemeliharaan kantor, penambahan pagu dan blokir pendampingan program strategis Kementerian Pertanian)
4. Revisi keempat pada tanggal 17 April 2025 (revisi pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II 2025)
5. Revisi kelima pada tanggal 30 April 2025 (buka blokir kegiatan dukungan manajemen fasilitasi perakitan dan modernisasi pertanian)
6. Revisi keenam pada tanggal 20 Mei 2025 (pergeseran anggaran belanja pegawai PNS ke PPPK)

F.4. Selisih LRA dan LO

Selisih pada LRA dan LO disebabkan karena LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas. LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual. Pada basis akrual (*accrual basis*) pencatatan segera dilakukan setelah terjadinya transaksi (kwitansi

yang belum diterbitkan SP2D), sedangkan pada basis kas (*cash basis*) pencatatan dilakukan setelah terjadinya penerimaan uang (telah terbit SP2D)

F.5. Penetapan Status Penggunaan BMN

Pertanggal 30 Juni 2025 terdapat Aset pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat yang belum ditetapkan status penggunaannya (PSP) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BMN	Sudah PSP		Belum PSP		Jumlah BMN	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
Tanah	1	53.125.000.000	0	-	1	53.125.000.000
Peralatan dan Mesin	141	5.534.271.430	5	691.067.345	146	6.225.338.775
Aset Tak Berwujud	2	6.115.000	0	0	2	6.115.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	45	32.746.464.836	1	179.970.000	46	32.926.434.836
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12	629.266.110	0	0	12	629.266.110
Aset Tetap Lainnya	4	480.000	0	0	4	480.000
Aset Lain-lain	12	115.536.104	0	0	12	115.536.104
Jumlah	217	92.157.133.480	6	871.037.345	223	93.028.170.825

Beberapa barang telah diajukan penetapan status penggunaan barang (PSP) ke KPKNL Sorong dan telah mendapatkan keputusan PSP diantaranya :

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/KM.6/KNL.1703/2022 Tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.6/KNL.1703/2022 Tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KM.6/KNL.1703/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/KM.6/KNL.1703/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 229/KPTS/PL.310/A/03/2024 Tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (Kode Satker 018.09.3300.450871KD)

Sedangkan untuk BMN yang belum PSP, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat berkomitmen untuk terus mengusahakan proses penyelesaian PSP tersebut.

F.6. Pemblokiran Anggaran

Pada tahun anggaran 2025 sampai dengan periode 30 Juni 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat sampai dengan DIPA Revisi 6 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.470.107.000,00, namun dari alokasi anggaran tersebut terdapat pemblokiran pagu sebesar Rp439.277.000,00 dikarenakan kebijakan penyesuaian belanja negara akibat dari efisiensi anggaran APBN sehingga pagu efektif yang bisa dipergunakan sebesar Rp5.030.830.000,00. Rincian atas pemblokiran pagu tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Subkomponen	Pagu	Blokir	Pagu Efektif
1	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	18.524.000	18.524.000	-
2	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.100.000.000	365.424.000	734.576.000
3	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10.000.000	-	10.000.000
4	Penyusunan Program dan Anggaran	15.272.000	9.975.000	5.297.000
5	Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	5.240.000	5.240.000	-
6	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks	16.412.000	16.412.000	-
7	Pengelolaan Informasi Publik	23.702.000	23.702.000	-
8	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi	24.737.000	-	24.737.000
9	Layanan Kepegawaian	24.602.000	-	24.602.000
10	Layanan Keuangan	16.425.000	-	16.425.000
11	Layanan Ketatausahaan Rumah Tangga Kearsipan dan Perlengkapan	26.105.000	-	26.105.000
12	Sinkronisasi Kegiatan	42.505.000	-	42.505.000
13	Pembayaran gaji dan tunjangan	1.774.824.000	-	1.774.824.000
14	Operasional perkantoran	1.445.026.000	-	1.445.026.000
15	Pemeliharaan perkantoran	867.092.000	-	867.092.000
16	Pengelolaan laboratorium	40.641.000	-	40.641.000
17	Pengelolaan Kebun Percobaan	19.000.000	-	19.000.000
Total		5.470.107.000	439.277.000	5.030.830.000

F.7. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian (018)
 Unit Organisasi : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (09)
 Satuan Kerja : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (450871)
 Fungsi : Ekonomi (04)
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (04.03)
 Program : EC (Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri)
 WA (Program Dukungan Manajemen)
 Lokasi : Papua Barat (33)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								
EC.7911	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian								
EC.7911.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang	18.524.000	0	0	47	0	Orang	2	Anggaran masih dalam pemblokiran

	didiseminasika n								
WA	Program Dukungan Manajemen								
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian								
WA.6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.146.583.000	1.419.156.614	44,11	1	0	Layanan	50	Layanan bersifat rutin atas pemeliharaan dan operasional perkantoran
WA.6918.EBA.962	Layanan Umum	195.000.000	13.997.900	7,18	1	0	Layanan	27,18	Layanan dukungan manajemen dilakukan secara rutin dengan agenda kegiatan rutin seperti data program, SPI dan monev
WA.6918.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	0	0	1	0	Layanan	27	Layanan telah dilakukan bersifat pendataan
WA.6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.100.000.000	89.284.753	8,12	1	0	Kegiatan	8,12	Kegiatan telah dilakukan koordinasi pelaksanaan terkait pendampingan program swasembada pangan

F.8. CATATAN DALAM MONSAKTI

Rekonsiliasi

Hasil rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (450871) sampai dengan periode Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Belanja sebesar Rp5.470.107.000 merupakan alokasi anggaran belanja tahun 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat yang tertuang dalam SP DIPA-018.09.2.450871/2025. Sampai dengan periode 30 Juni 2025 DIPA Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat telah mengalami revisi DIPA sebanyak 6 (enam) kali, DIPA Revisi ke 06 tanggal 20 Mei 2025.
2. Belanja sebesar Rp1.932.304.992 adalah realisasi anggaran belanja bruto (belanja negara sebelum dipotong dengan pengembalian belanja) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp935.567.391 dan Belanja Barang sebesar Rp996.737.601.
3. Pengembalian belanja sebesar Rp43 merupakan pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS.
4. Estimasi Pendapatan sebesar Rp 51.025.000 merupakan estimasi pendapatan tahun anggaran 2025 dari estimasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak yang terdiri dari PNBP fungsional dan PNBP umum. Secara rinci estimasi pendapatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kode Akun	Uraian Jenis PNBP	Target
1	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	20.000.000
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.000.000
3	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.025.000
Total Estimasi Pendapatan			51.025.000

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/PB.6/2025 tanggal 11 Maret 2025 hal Penyampaian Pemutakhiran Akun Penerimaan Pembayaran Sewa Rumah Dinas/Negara sehingga terdapat perubahan kode akun untuk penerimaan sewa rumah dinas/Negara yang semula akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) menjadi akun 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi).

5. Pendapatan Bukan Pajak sebesar Rp81.301.900 merupakan pendapatan dari PNBP Fungsional dan PNBP Umum sampai dengan 30 Juni 2025.
6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak sebesar Rp0 dikarenakan tidak ada transaksi pengembalian pendapatan bukan pajak sampai dengan 30 Juni 2025.

7. Pengembalian Pajak sebesar Rp0 dikarenakan tidak ada transaksi pengembalian pajak sampai dengan 30 Juni 2025.
8. Mutasi Uang Persediaan senilai Rp120.000.000 merupakan uang muka dari KPPN yang terdiri dari Uang Persediaan Rp60.000.000 dan Tambahan Uang Persediaan Rp60.000.000
9. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp120.000.000 terdiri dari :

No	Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)
1	Kas Tunai	18.794.731
2	Kas di Bank	59.945.600
3	Kwitansi TUP belum di SPM kan	41.259.669
Jumlah		120.000.000

10. Kas pada Badan Layanan Umum sebesar Rp0 dikarenakan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat bukan merupakan BLU.
11. Kas Lainnya di K/L dari Hibah senilai Rp0 dikarenakan tidak ada transaksi dari hibah.
12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sebesar Rp0 dikarenakan tidak ada transaksi dari Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga.

LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 450871
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,470,107,000	5,470,107,000	0
2	Belanja	1,932,304,992	1,932,304,992	0
3	Pengembalian Belanja	-43	-43	0
4	Estimasi Pendapatan	51,025,000	51,025,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	81,301,900	81,301,900	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	120,000,000	120,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	120,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JUL-25



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT 450871

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:10 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	51,025,000	81,301,900	30,276,900	159.34	27,100,000	90,563,516	63,463,516	334.18
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	51,025,000	81,301,900	30,276,900	159.34	27,100,000	90,563,516	63,463,516	334.18
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	51,025,000	81,301,900	30,276,900	159.34	27,100,000	90,563,516	63,463,516	334.18
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,470,107,000	1,932,304,949	(3,537,802,051)	35.32	6,167,347,000	2,399,585,036	(3,767,761,964)	38.91
1. Belanja Pegawai	1,774,824,000	935,567,348	(839,256,652)	52.71	2,247,773,000	876,029,454	(1,371,743,546)	38.97
2. Belanja Barang	3,695,283,000	996,737,601	(2,698,545,399)	26.97	3,919,574,000	1,523,555,582	(2,396,018,418)	38.87
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT 450871

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM
Tgl Cetak : 26/07/25 6:10 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,470,107,000	1,932,304,949	(3,537,802,051)	35.32	6,167,347,000	2,399,585,036	(3,767,761,964)	38.91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Peranggung Jawab UAKPA
KEPALA BALAI

Dr. YONG FARMANTA, S.P., M.Si
NIP 197901162003121002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0	120,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	2,412,400	370,000	2,042,400	552.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,412,400	370,000	2,042,400	552.00
Persediaan	315,300,000	348,200,000	(32,900,000)	(9.45)
JUMLAH ASET LANCAR	437,712,400	348,570,000	89,142,400	25.57
ASET TETAP				
Tanah	53,125,000,000	53,125,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,225,270,375	6,225,270,375	0	0.00
Gedung dan Bangunan	32,926,434,836	32,926,434,836	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	629,266,110	629,266,110	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	480,000	480,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,975,907,139)	(10,425,701,652)	(550,205,487)	5.28
JUMLAH ASET TETAP	81,930,544,182	82,480,749,669	(550,205,487)	(0.67)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,115,000	6,115,000	0	0.00
Aset Lain-lain	115,536,104	115,536,104	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(121,651,104)	(121,651,104)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	82,368,256,582	82,829,319,669	(461,063,087)	(0.56)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	133,018,976	0	133,018,976	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	41,259,669	0	41,259,669	0.00
Uang Muka dari KPPN	120,000,000	0	120,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	294,278,645	0	294,278,645	
JUMLAH KEWAJIBAN	294,278,645	0	294,278,645	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	82,073,977,937	82,829,319,669	(755,341,732)	(0.91)
JUMLAH EKUITAS	82,073,977,937	82,829,319,669	(755,341,732)	(0.91)
JUMLAH EKUITAS	82,073,977,937	82,829,319,669	(755,341,732)	(0.91)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	82,368,256,582	82,829,319,669	(461,063,087)	(0.56)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM
Tgl Cetak : 26/07/25 6:10 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA BALAI

Dr. YONG FARMANTA, S.P., M.Si
NIP. 197901162003121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA

: (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

BARAT

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	60,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,412,400	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	315,300,000	0
0.0	131111	Tanah	53,125,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,225,270,375	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	32,926,434,836	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	108,238,000	0
0.0	134112	Irigasi	136,000,000	0
0.0	134113	Jaringan	385,028,110	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	480,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,902,163,864
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,790,125,780
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	108,238,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	35,725,000
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	139,654,495
0.0	162151	Software	6,115,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	115,536,104	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	115,536,104
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,115,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	133,018,976
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	41,259,669
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	120,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,932,304,949
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	81,301,900	0
0.0	391111	Ekuitas	0	82,829,319,669
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	57,925,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	16,886,800
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	8,532,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	664,183,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,188	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,920,030	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,088,516	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	49,140,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,303,614	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	35,614,990	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:10 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	40,563,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	67,000,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,830,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	87,306,887	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,372	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,310,913	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,324,363	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8,066,666	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,894,385	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,887,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	10,025,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	915,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	384,701,811	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	25,500,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	31,198,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	30,184,540	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	59,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	77,198,464	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	36,418,175	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	11,216,168	0
3.0	522141	Beban Sewa	24,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	220,285,840	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,432,519	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	74,876,153	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187,676,761	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	354,834,507	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,667,500	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,026,719	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,626,000	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	32,700,000	0
JUMLAH			96,236,805,806	96,236,805,806

Keterangan :
FINAL



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA BALAI

Dr. YONG FARMANTA, S.P., M.Si
NIP. 197901162003121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,932,304,949
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	81,301,900	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	57,925,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	14,474,400
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	8,532,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	370,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	590,243,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,206	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39,032,830	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11,632,496	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	43,680,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,245,359	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	31,623,780	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	40,563,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	57,425,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,355,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	65,138,587	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,840	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,237,103	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	894,839	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,486,666	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,445,985	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,887,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	7,250,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	383,516,811	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,500,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,663,420	0
3.0	521211	Belanja Bahan	30,184,540	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,426,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	71,998,464	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	33,669,175	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	11,216,168	0
3.0	522141	Belanja Sewa	24,500,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,073,340	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111,429,530	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:11 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,560,153	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	43
JUMLAH			2,013,606,892	2,013,606,892

Keterangan :

FINAL



MANOKWARI, 26 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI

Dr. YONG FARMANTA, S.P., M.Si

197901162003121002

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 3300

SATUAN KERJA : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

PAPUA BARAT

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl. Cetak 26/07/2025 6:11 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	370,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	200,000	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	348,000,000	0
0.0	131111	Tanah	53,125,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,225,270,375	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	32,926,434,836	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	108,238,000	0
0.0	134112	Irigasi	136,000,000	0
0.0	134113	Jaringan	385,028,110	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	480,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,714,487,103
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,435,291,273
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	108,238,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	34,057,500
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	133,627,776
0.0	162151	Software	6,115,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	115,536,104	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	115,536,104
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	6,115,000
0.0	391111	Ekuitas	0	82,829,319,669
JUMLAH			93,376,672,425	93,376,672,425

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:08 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	83,344,300	38,224,100	45,120,200	118.041
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	83,344,300	38,224,100	45,120,200	118.041
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	83,344,300	38,224,100	45,120,200	118.041
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,068,586,324	980,695,387	87,890,937	8.962
Beban Persediaan	1,626,000	20,443,500	(18,817,500)	(92.046)
Beban Barang dan Jasa	620,976,758	664,029,417	(43,052,659)	(6.484)
Beban Pemeliharaan	340,718,359	747,729,639	(407,011,280)	(54.433)
Beban Perjalanan Dinas	74,876,153	133,821,098	(58,944,945)	(44.048)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	32,700,000	5,880,000	26,820,000	456.122

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT
SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 1:07 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:08 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	550,205,487	585,384,112	(35,178,625)	(6.009)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,689,689,081	3,137,983,153	(448,294,072)	(14.286)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,606,344,781)	(3,099,759,053)	493,414,272	(15.918)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	39,822,000	(39,822,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	39,822,000	(39,822,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	14,929,816	(14,929,816)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	14,929,816	(14,929,816)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	54,751,816	(54,751,816)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,606,344,781)	(3,045,007,237)	438,662,456	(14.406)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,606,344,781)	(3,045,007,237)	438,662,456	(14.406)

Keterangan :

FINAL



MANOKWARI, 26 Juli 2025

Peranggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI

Dr. YONG FARMANTA, S.P., M.Si

NIP. 197901162003121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (450871) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:09 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	82,829,319,669	83,443,219,289	(613,899,620)	(0.74)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,606,344,781)	(3,045,007,237)	438,662,456	(14.41)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,851,003,049	2,309,021,520	(458,018,471)	(19.84)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(755,341,732)	(735,985,717)	(19,356,015)	2.63
EKUITAS AKHIR	82,073,977,937	82,707,233,572	(633,255,635)	(0.77)

Keterangan :

FINAL



MANOKWARI, 26 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA BALAI

Dr. YONG FARMANTA, S.P., M.Si

NIP. 197901162003121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 450871
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/07/25 6:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 26/7/25 1:56 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,061,261,000	881,268,000	590,243,700	0	590,243,700	66.98	291,024,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,000	19,000	9,206	43	9,163	48.23	9,837
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	70,060,000	70,060,000	39,032,830	0	39,032,830	55.71	31,027,170
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,969,000	20,969,000	11,632,496	0	11,632,496	55.47	9,336,504
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000	14,400,000	0	14,400,000	57.14	10,800,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	91,560,000	91,560,000	43,680,000	0	43,680,000	47.71	47,880,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,030,000	9,030,000	7,245,359	0	7,245,359	80.24	1,784,641
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57,044,000	57,044,000	31,623,780	0	31,623,780	55.44	25,420,220
511129	Belanja Uang Makan PNS	200,518,000	200,518,000	40,563,000	0	40,563,000	20.23	159,955,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	116,700,000	116,700,000	57,425,000	0	57,425,000	49.21	59,275,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,900,000	25,900,000	12,355,000	0	12,355,000	47.7	13,545,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,678,261,000	1,498,268,000	848,210,371	43	848,210,328	56.61	650,057,672
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	45,973,000	157,222,000	65,138,587	0	65,138,587	41.43	92,083,413
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	9,000	1,840	0	1,840	20.44	7,160
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,620,000	12,539,000	2,237,103	0	2,237,103	17.84	10,301,897
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2,650,000	894,839	0	894,839	33.77	1,755,161
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	15,460,000	6,486,666	0	6,486,666	41.96	8,973,334
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,082,000	10,704,000	3,445,985	0	3,445,985	32.19	7,258,015
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9,768,000	35,816,000	1,887,000	0	1,887,000	5.27	33,929,000
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5,100,000	16,200,000	7,250,000	0	7,250,000	44.75	8,950,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4,500,000	15,000	0	15,000	0.33	4,485,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	75,107,000	255,100,000	87,357,020	0	87,357,020	34.24	167,742,980
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	21,456,000	21,456,000	0	0	0	0	21,456,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	21,456,000	21,456,000	0	0	0	0	21,456,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,774,824,000	1,774,824,000	935,567,391	43	935,567,348	52.71	839,256,652
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	866,922,000	866,922,000	383,516,811	0	383,516,811	44.24	483,405,189
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61,200,000	61,200,000	25,500,000	0	25,500,000	41.67	35,700,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	238,904,000	238,904,000	30,663,420	0	30,663,420	12.84	208,240,580

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 3300
SATUAN KERJA : 450871
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 26/07/25 6:12 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 26/7/25 1:56 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,167,026,000	1,167,026,000	439,680,231	0	439,680,231	37.68	727,345,769
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	54,135,000	81,685,000	30,184,540	0	30,184,540	36.95	51,500,460
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,675,000	9,675,000	0	0	0	0	9,675,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	63,810,000	91,360,000	30,184,540	0	30,184,540	33.04	61,175,460
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,941,000	25,365,000	1,426,000	0	1,426,000	5.62	23,939,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	19,941,000	25,365,000	1,426,000	0	1,426,000	5.62	23,939,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	192,000,000	192,000,000	71,998,464	0	71,998,464	37.5	120,001,536
522112	Belanja Langganan Telepon	84,000,000	84,000,000	33,669,175	0	33,669,175	40.08	50,330,825
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	12,000,000	11,216,168	0	11,216,168	93.47	783,832
522141	Belanja Sewa	0	267,026,000	24,500,000	0	24,500,000	9.18	242,526,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	21,405,000	21,405,000	0	0	0	0	21,405,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	311,205,000	578,231,000	141,383,807	0	141,383,807	24.45	436,847,193
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	644,082,000	644,082,000	200,073,340	0	200,073,340	31.06	444,008,660
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223,010,000	223,010,000	111,429,530	0	111,429,530	49.97	111,580,470
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	867,092,000	867,092,000	311,502,870	0	311,502,870	35.93	555,589,130
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166,209,000	966,209,000	72,560,153	0	72,560,153	7.51	893,648,847
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	166,209,000	966,209,000	72,560,153	0	72,560,153	7.51	893,648,847
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,595,283,000	3,695,283,000	996,737,601	0	996,737,601	26.97	2,698,545,399
	JUMLAH BELANJA	4,370,107,000	5,470,107,000	1,932,304,992	43	1,932,304,949	35.32	3,537,802,051

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
SATUAN KERJA : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tanggal : 26/07/25 6:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_fsfpgr_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	74,096,000	0	0	0	0	null	0
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	0	74,096,000	0	0	0	0	74,096,000
	JUMLAH PROGRAM Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	74,096,000	74,096,000	0	0	0	0	74,096,000
WA	Program Dukungan Manajemen							
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	47,867,413,000	59,967,413,000	21,255,354,912	473	21,255,354,439	35.44	38,712,058,561
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	47,867,413,000	59,967,413,000	21,255,354,912	473	21,255,354,439	35.44	38,712,058,561
	JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	47,941,509,000	60,041,509,000	21,255,354,912	473	21,255,354,439	35.4	38,786,154,561
	JUMLAH FUNGSI EKONOMI	47,941,509,000	60,041,509,000	21,255,354,912	473	21,255,354,439	35.4	38,786,154,561

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 018
: 09
: 3300
: 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 26/07/25 6:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	20,000,000	57,925,000	0	57,925,000	289.63
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,000,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	14,474,400	0	14,474,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	50,000,000	72,399,400	0	72,399,400	144.8
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1,025,000	8,532,500	0	8,532,500	832.44
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	1,025,000	8,532,500	0	8,532,500	832.44
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	370,000	0	370,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	370,000	0	370,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	51,025,000	81,301,900	0	81,301,900	159.34
	JUMLAH PENDAPATAN	51,025,000	81,301,900	0	81,301,900	159.34

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tanggal : 26/07/25 6:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	200,000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	348,000,000
131111	Tanah	53,125,000,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,225,270,375
133111	Gedung dan Bangunan	32,926,434,836
134111	Jalan dan Jembatan	108,238,000
134112	Irigasi	136,000,000
134113	Jaringan	385,028,110
135121	Aset Tetap Lainnya	480,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,714,487,103)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,435,291,273)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(108,238,000)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(34,057,500)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(133,627,776)
162151	Software	6,115,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	115,536,104
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(115,536,104)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6,115,000)
J U M L A H		82,828,949,669

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl.Data : 26/07/25 12:27 AM
Tgl.Cetak : 26/07/25 6:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	315,300,000
131111	Tanah	53,125,000,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,225,270,375
133111	Gedung dan Bangunan	32,926,434,836
134111	Jalan dan Jembatan	108,238,000
134112	Irigasi	136,000,000
134113	Jaringan	385,028,110
135121	Aset Tetap Lainnya	480,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,902,163,864)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,790,125,780)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(108,238,000)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(35,725,000)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(139,654,495)
162151	Software	6,115,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	115,536,104
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(115,536,104)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6,115,000)
J U M L A H		82,245,844,182



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si.
197801162003121002

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tanggal : 26/07/25 6:20 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501003	Hewan dan Tanaman	315,300,000
Jumlah Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		315,300,000
TOTAL		315,300,000

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 1,500,000 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON: (0986) 2213347
WEBSITE: www.pabar.bsip.pertanian.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

Nomor: B-471/KU.140/H.12.31/06/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Dr. Yong Farmanta, SP., M.Si
NIP : 19790116 200312 1 002
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
- Nama : Herman Rois Tata, SP., MP
NIP : 19760827 200812 1 002
Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha
- Nama : Arya Bima Senna, SP
NIP : 19931010 201902 1 001
Jabatan : Petugas Persediaan

Menyatakan bahwa kami telah melakukan pemeriksaan fisik barang (stock opname) barang persediaan Semester I Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara stock opname barang persediaan. Adapun total nilai persediaan barang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

KODE	Uraian	NILAI
117111	Barang Konsumsi	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	315.300.000
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
Jumlah		315.300.000

Demikian berita acara stock opname persediaan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa Fisik Barang Persediaan ,

- Herman Rois Tata, SP., MP
NIP. 19760827 200812 1 002
- Arya Bima Senna, SP
NIP. 19931010 201902 1 001



Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang,

Dr. Yong Farmanta, SP.,M.Si
NIP. 19790116 200312 1 002



Lampiran 1. Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan
Nomor : B-471/KU.140/H.12.31/06/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Vol	Sat	Harga	Nilai
117111	Barang Konsumsi				0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan				0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat				315.300.000
1010501003000003	Benih Padi Var. Cigeulis	8.230	Kg	12.000	98.760.000
1010501003000004	Benih Padi Ciherangg	4.380	Kg	12.000	52.560.000
1010501003000005	Benih Padi Var. Mekongga	2.325	Kg	12.000	27.900.000
1010501003000006	Benih Padi Var. Inpari 30	3.000	Kg	12.000	36.000.000
1010501003000007	Benih Padi Var. Inpari 32	6.125	Kg	12.000	73.500.000
1010501003000008	Benih Padi Var. Inpari 47	2.215	Kg	12.000	26.580.000
117131	Bahan Baku				0
117199	Persediaan Lainnya				0
Jumlah					315.300.000

Keterangan,
1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Tim Pemeriksa Fisik Barang Persediaan ,

1. Herman Rois Tata, SP., MP

NIP. 19760827 200812 1 002
2. Arya Bima Senna, SP

NIP. 19931010 201902 1 001



Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang,

Dr. Yong Farmanta, SP.,M.Si
NIP. 19790116 200312 1 002

Lampiran 2. Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan
Nomor : B-471/KU.140/H.12.31/06/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

**DOKUMENTASI BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2025
TAHUN ANGGARAN 2025**





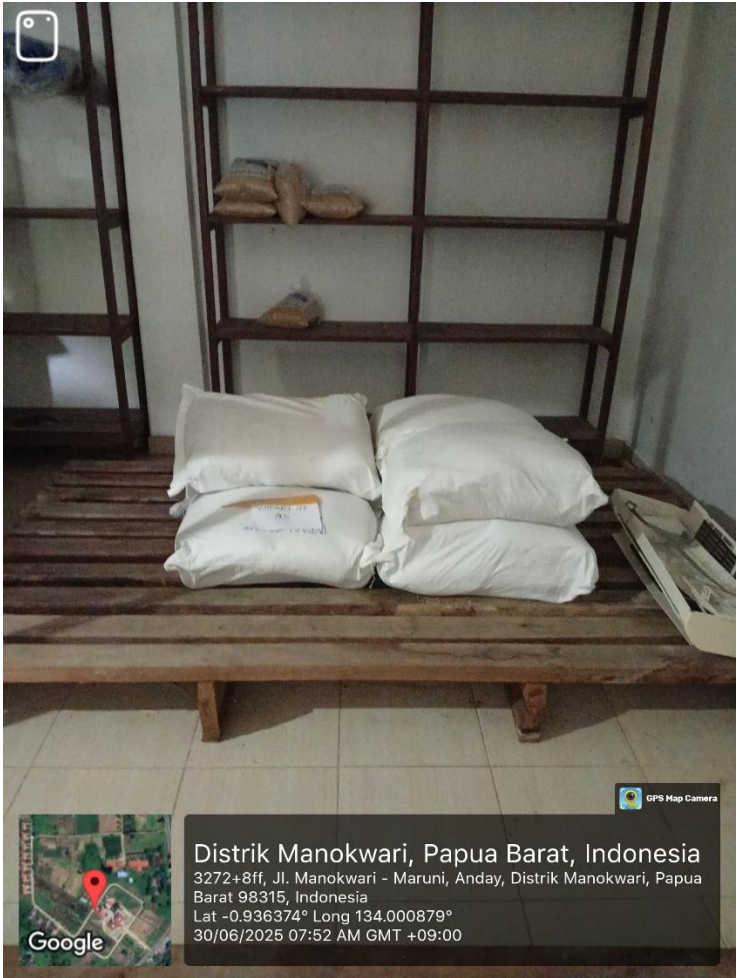


Distrik Manokwari, Papua Barat, Indonesia
3272+7c8, Jl. Manokwari - Maruni, Anday, Distrik Manokwari, Papua Barat 98315, Indonesia
Lat -0.936482° Long 134.000757°
30/06/2025 07:51 AM GMT +09:00



Distrik Manokwari, Papua Barat, Indonesia
3272+7c8, Jl. Manokwari - Maruni, Anday, Distrik Manokwari, Papua Barat 98315, Indonesia
Lat -0.936494° Long 134.000777°
30/06/2025 07:51 AM GMT +09:00





**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018
UAKPB : 450871

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tanggal : 26/07/25 6:17 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		2	6,115,000	0	0	0	0	2	6,115,000
8010101001	Software Komputer	dummy	2	6,115,000	0	0	0	0	2	6,115,000
TOTAL				6,115,000		0		0		6,115,000



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si.
197901162003121002

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 018
UAKPB : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:15 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		200,000	53,125,000,000	0	0	0	0	200,000	53,125,000,000
2010203002	Tanah Kebun Induk	M2	200,000	53,125,000,000	0	0	0	0	200,000	53,125,000,000
132111	Peralatan dan Mesin		145	6,225,270,375	0	0	0	0	145	6,225,270,375
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	9,555,155	0	0	0	0	1	9,555,155
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	1	304,323,000	0	0	0	0	1	304,323,000
3040103999	Alat Panen Lainnya	dummy	1	164,840,000	0	0	0	0	1	164,840,000
3080141033	Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	196,435,000	0	0	0	0	1	196,435,000
3100102003	Note Book	Buah	5	54,350,000	0	0	0	0	5	54,350,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	8	52,854,544	0	0	0	0	8	52,854,544
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	8,848,000	0	0	0	0	2	8,848,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	38,800,000	0	0	0	0	8	38,800,000
3080141124	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	55,202,000	0	0	0	0	1	55,202,000
3070116008	Hotplate	Buah	1	40,864,000	0	0	0	0	1	40,864,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	33,160,000	0	0	0	0	4	33,160,000
3040199999	Alat Pengolahan Lainnya	dummy	10	85,989,000	0	0	0	0	10	85,989,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	1	250,000,000	0	0	0	0	1	250,000,000
3080150016	Milling Unit	Buah	1	159,868,000	0	0	0	0	1	159,868,000
3080141999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	dummy	5	42,100,000	0	0	0	0	5	42,100,000
3090409110	Vortex Genie Mixer	Buah	1	7,170,000	0	0	0	0	1	7,170,000
3080111125	Refrigerator	Buah	1	11,900,000	0	0	0	0	1	11,900,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3,050,000	0	0	0	0	1	3,050,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	5	41,900,000	0	0	0	0	5	41,900,000
3020101999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	dummy	1	23,207,348	0	0	0	0	1	23,207,348
3080111105	Multi Unit Extraction	Buah	1	503,947,400	0	0	0	0	1	503,947,400
3100102001	P.C Unit	Buah	7	135,850,000	0	0	0	0	7	135,850,000
3050201005	Sice	Buah	12	51,304,000	0	0	0	0	12	51,304,000
3130302999	Alat Pengolahan Air Lainnya	dummy	1	55,000,000	0	0	0	0	1	55,000,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	4,625,000	0	0	0	0	1	4,625,000
3050206002	Televisi	Buah	1	57,124,000	0	0	0	0	1	57,124,000
3080116013	Water Distillation Apparatus (Alat Laboratorium Hematologi)	Buah	1	76,274,000	0	0	0	0	1	76,274,000
3080112054	Precisions Balance	Buah	1	18,531,000	0	0	0	0	1	18,531,000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,000,800	0	0	0	0	1	2,000,800
3040106005	Mesin Tetas	Buah	2	10,000,000	0	0	0	0	2	10,000,000
3040107003	Alat Penggiling Padi	Buah	1	164,180,000	0	0	0	0	1	164,180,000
3080110114	Drying Oven	Buah	1	32,000,000	0	0	0	0	1	32,000,000
3080111059	Furnace	Buah	1	63,370,000	0	0	0	0	1	63,370,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	605,000,000	0	0	0	0	2	605,000,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

UAPB : 018
UAKPB : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:15 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080101018	Kjedhli Digestion APP	Buah	1	179,216,000	0	0	0	0	1	179,216,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	158,211,590	0	0	0	0	6	158,211,590
3090409033	Ph Meter Bench	Buah	1	38,325,000	0	0	0	0	1	38,325,000
3010305010	Pompa Air	Unit	1	11,000,000	0	0	0	0	1	11,000,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	6	3,450,000	0	0	0	0	6	3,450,000
3080141096	Fumehood	Buah	1	240,208,000	0	0	0	0	1	240,208,000
3050204004	A.C. Split	Buah	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3080141319	Waterbath (Shake,Still)	Buah	1	61,936,000	0	0	0	0	1	61,936,000
3040101999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	dummy	2	41,954,000	0	0	0	0	2	41,954,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	110,000,000	0	0	0	0	1	110,000,000
3040105999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	dummy	2	135,887,800	0	0	0	0	2	135,887,800
3080131004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	2	1,216,600	0	0	0	0	2	1,216,600
3040101009	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	Buah	1	38,759,000	0	0	0	0	1	38,759,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	10	32,417,000	0	0	0	0	10	32,417,000
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	1	3,267,000	0	0	0	0	1	3,267,000
3080141223	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	176,357,000	0	0	0	0	1	176,357,000
3020199999	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	dummy	2	78,677,000	0	0	0	0	2	78,677,000
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1	33,000,000	0	0	0	0	1	33,000,000
3020501016	Pesawat tak berawak	Unit	1	188,238,000	0	0	0	0	1	188,238,000
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	1	17,500,000	0	0	0	0	1	17,500,000
3080141315	Water Distillation/Purifier (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	280,217,000	0	0	0	0	1	280,217,000
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	16,700,000	0	0	0	0	1	16,700,000
3060347002	Genset	Buah	1	216,358,000	0	0	0	0	1	216,358,000
3010307001	Mobil Workshop	Unit	2	776,753,138	0	0	0	0	2	776,753,138
133111	Gedung dan Bangunan		46	32,926,434,836	0	0	0	0	46	32,926,434,836
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	22	5,750,831,382	0	0	0	0	22	5,750,831,382
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Unit	1	120,760,000	0	0	0	0	1	120,760,000
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	2	664,772,447	0	0	0	0	2	664,772,447
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	3	1,693,507,186	0	0	0	0	3	1,693,507,186
4040104001	Pagar Permanen	Unit	3	1,746,079,020	0	0	0	0	3	1,746,079,020
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	1,776,970,786	0	0	0	0	2	1,776,970,786
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	5	16,965,357,100	0	0	0	0	5	16,965,357,100
4010129001	Bangunan Untuk Kandang	Unit	1	230,711,000	0	0	0	0	1	230,711,000
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	1	1,646,543,915	0	0	0	0	1	1,646,543,915

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018
UAKPB : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:15 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	3	885,187,000	0	0	0	0	3	885,187,000
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	1,445,715,000	0	0	0	0	3	1,445,715,000
134111	Jalan dan Jembatan		824	108,238,000	0	0	0	0	824	108,238,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	824	108,238,000	0	0	0	0	824	108,238,000
134112	Irigasi		3	136,000,000	0	0	0	0	3	136,000,000
5020603999	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lainnya	dummy	1	88,000,000	0	0	0	0	1	88,000,000
5020601003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Unit	1	35,000,000	0	0	0	0	1	35,000,000
5020106008	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Unit	1	13,000,000	0	0	0	0	1	13,000,000
134113	Jaringan		6	385,028,110	0	0	0	0	6	385,028,110
5040104001	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Unit	1	18,100,000	0	0	0	0	1	18,100,000
5040199999	Jaringan Air Minum Lainnya	dummy	1	150,700,000	0	0	0	0	1	150,700,000
5030105001	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	Unit	1	36,051,110	0	0	0	0	1	36,051,110
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	1	93,700,000	0	0	0	0	1	93,700,000
5030199999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	dummy	2	86,477,000	0	0	0	0	2	86,477,000
135121	Aset Tetap Lainnya		4	480,000	0	0	0	0	4	480,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	4	480,000	0	0	0	0	4	480,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		12	115,536,104	0	0	0	0	12	115,536,104
3050204004	A.C. Split	Buah	6	31,825,000	0	0	0	0	6	31,825,000
3100102003	Note Book	Buah	3	42,974,000	0	0	0	0	3	42,974,000
3100102001	P.C Unit	Buah	3	40,737,104	0	0	0	0	3	40,737,104
TOTAL				93,021,987,425		0		0		93,021,987,425



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si.
197901162003121002

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018
UAKPB : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:16 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1	68,400	0	0	0	0	1	68,400
3080141999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	-	1	68,400	0	0	0	0	1	68,400
TOTAL				68,400		0		0		68,400



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si.
197901162003121002

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:17 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 018
 UAKPB : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		200,000	53,125,000,000	0	0	0	0	200,000	53,125,000,000
2010203002	Tanah Kebun Induk	M2	200,000	53,125,000,000	0	0	0	0	200,000	53,125,000,000
132111	Peralatan dan Mesin		146	6,225,338,775	0	0	0	0	146	6,225,338,775
3010305010	Pompa Air	Unit	1	11,000,000	0	0	0	0	1	11,000,000
3010307001	Mobil Workshop	Unit	2	776,753,138	0	0	0	0	2	776,753,138
3020101999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	dummy	1	23,207,348	0	0	0	0	1	23,207,348
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	605,000,000	0	0	0	0	2	605,000,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	158,211,590	0	0	0	0	6	158,211,590
3020199999	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	dummy	2	78,677,000	0	0	0	0	2	78,677,000
3020501016	Pesawat tak berawak	Unit	1	188,238,000	0	0	0	0	1	188,238,000
3040101009	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	Buah	1	38,759,000	0	0	0	0	1	38,759,000
3040101999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	dummy	2	41,954,000	0	0	0	0	2	41,954,000
3040103999	Alat Panen Lainnya	dummy	1	164,840,000	0	0	0	0	1	164,840,000
3040105999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	dummy	2	135,887,800	0	0	0	0	2	135,887,800
3040106005	Mesin Tetas	Buah	2	10,000,000	0	0	0	0	2	10,000,000
3040107003	Alat Penggiling Padi	Buah	1	164,180,000	0	0	0	0	1	164,180,000
3040199999	Alat Pengolahan Lainnya	dummy	10	85,989,000	0	0	0	0	10	85,989,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	9,555,155	0	0	0	0	1	9,555,155
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	8,848,000	0	0	0	0	2	8,848,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	16,700,000	0	0	0	0	1	16,700,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3,050,000	0	0	0	0	1	3,050,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	1	250,000,000	0	0	0	0	1	250,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	1	3,267,000	0	0	0	0	1	3,267,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	6	3,450,000	0	0	0	0	6	3,450,000
3050201005	Sice	Buah	12	51,304,000	0	0	0	0	12	51,304,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	5	41,900,000	0	0	0	0	5	41,900,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	4,625,000	0	0	0	0	1	4,625,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	10	32,417,000	0	0	0	0	10	32,417,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	8	52,854,544	0	0	0	0	8	52,854,544
3050204004	A.C. Split	Buah	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3050206002	Televisi	Buah	1	57,124,000	0	0	0	0	1	57,124,000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,000,800	0	0	0	0	1	2,000,800
3060347002	Genset	Buah	1	216,358,000	0	0	0	0	1	216,358,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3070116008	Hotplate	Buah	1	40,864,000	0	0	0	0	1	40,864,000
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	1	17,500,000	0	0	0	0	1	17,500,000
3080101018	Kiedhli Digestion APP	Buah	1	179,216,000	0	0	0	0	1	179,216,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018
UAKPB : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 26/07/25 6:17 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080110114	Drying Oven	Buah	1	32,000.000	0	0	0	0	1	32,000,000
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	110,000.000	0	0	0	0	1	110,000,000
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	3,000.000	0	0	0	0	2	3,000,000
3080111059	Furnace	Buah	1	63,370.000	0	0	0	0	1	63,370,000
3080111105	Multi Unit Extraction	Buah	1	503,947.400	0	0	0	0	1	503,947,400
3080111125	Refrigerator	Buah	1	11,900.000	0	0	0	0	1	11,900,000
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	6,000.000	0	0	0	0	1	6,000,000
3080112054	Precisions Balance	Buah	1	18,531.000	0	0	0	0	1	18,531,000
3080116013	Water Distillation Apparatus (Alat Laboratorium Hematologi)	Buah	1	76,274.000	0	0	0	0	1	76,274,000
3080131004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	2	1,216.600	0	0	0	0	2	1,216,600
3080141033	Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	196,435.000	0	0	0	0	1	196,435,000
3080141096	Fumehood	Buah	1	240,208.000	0	0	0	0	1	240,208,000
3080141124	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	55,202.000	0	0	0	0	1	55,202,000
3080141223	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	176,357.000	0	0	0	0	1	176,357,000
3080141315	Water Distillation/Purifier (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	280,217.000	0	0	0	0	1	280,217,000
3080141319	Waterbath (Shake,Still)	Buah	1	61,936.000	0	0	0	0	1	61,936,000
3080141999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	dummy	6	42,168.400	0	0	0	0	6	42,168,400
3080150016	Milling Unit	Buah	1	159,868.000	0	0	0	0	1	159,868,000
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1	33,000.000	0	0	0	0	1	33,000,000
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	1	304,323.000	0	0	0	0	1	304,323,000
3090409033	Ph Meter Bench	Buah	1	38,325.000	0	0	0	0	1	38,325,000
3090409110	Vortex Genie Mixer	Buah	1	7,170.000	0	0	0	0	1	7,170,000
3100102001	P.C Unit	Buah	7	135,850.000	0	0	0	0	7	135,850,000
3100102003	Note Book	Buah	5	54,350.000	0	0	0	0	5	54,350,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	38,800.000	0	0	0	0	8	38,800,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	33,160.000	0	0	0	0	4	33,160,000
3130302999	Alat Pengolahan Air Lainnya	dummy	1	55,000.000	0	0	0	0	1	55,000,000
133111	Gedung dan Bangunan		46	32,926,434,836	0	0	0	0	46	32,926,434,836
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	5	16,965,357,100	0	0	0	0	5	16,965,357,100
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	2	664,772.447	0	0	0	0	2	664,772,447
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Unit	1	120,760.000	0	0	0	0	1	120,760,000
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	1	1,646,543,915	0	0	0	0	1	1,646,543,915
4010129001	Bangunan Untuk Kandang	Unit	1	230,711.000	0	0	0	0	1	230,711,000
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	3	885,187.000	0	0	0	0	3	885,187,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	3	1,693,507,186	0	0	0	0	3	1,693,507,186
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	1,445,715.000	0	0	0	0	3	1,445,715,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	22	5,750,831,382	0	0	0	0	22	5,750,831,382

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018
UAKPB : 450871

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tgl Cetak : 26/07/25 6:17 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	1,776,970,786	0	0	0	0	2	1,776,970,786
4040104001	Pagar Permanen	Unit	3	1,746,079,020	0	0	0	0	3	1,746,079,020
134111	Jalan dan Jembatan		824	108,238,000	0	0	0	0	824	108,238,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	824	108,238,000	0	0	0	0	824	108,238,000
134112	Irigasi		3	136,000,000	0	0	0	0	3	136,000,000
5020106008	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Unit	1	13,000,000	0	0	0	0	1	13,000,000
5020601003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Unit	1	35,000,000	0	0	0	0	1	35,000,000
5020603999	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lainnya	dummy	1	88,000,000	0	0	0	0	1	88,000,000
134113	Jaringan		6	385,028,110	0	0	0	0	6	385,028,110
5030105001	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	Unit	1	36,051,110	0	0	0	0	1	36,051,110
5030199999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	dummy	2	86,477,000	0	0	0	0	2	86,477,000
5040104001	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Unit	1	18,100,000	0	0	0	0	1	18,100,000
5040199999	Jaringan Air Minum Lainnya	dummy	1	150,700,000	0	0	0	0	1	150,700,000
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	1	93,700,000	0	0	0	0	1	93,700,000
135121	Aset Tetap Lainnya		4	480,000	0	0	0	0	4	480,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	4	480,000	0	0	0	0	4	480,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		12	115,536,104	0	0	0	0	12	115,536,104
3050204004	A.C. Split	Buah	6	31,825,000	0	0	0	0	6	31,825,000
3100102001	P.C Unit	Buah	3	40,737,104	0	0	0	0	3	40,737,104
3100102003	Note Book	Buah	3	42,974,000	0	0	0	0	3	42,974,000
TOTAL				93,022,055,825		0		0		93,022,055,825

MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUSA PENGGUNA BARANG
Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si.
197901162003121002

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018
UAKPB : 450871

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT**

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tanggal : 26/07/25 6:17 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2025	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
Dr. Yong Faramanta, S.P., M.Si.
197001182003121002

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tanggal : 26/07/25 6:18 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		2	6,115,000	(6,115,000)	0	(6,115,000)	0
8010101001	Software Komputer	dummy	2	6,115,000	(6,115,000)	0	(6,115,000)	0
JUMLAH			2	6,115,000	(6,115,000)	0	(6,115,000)	0



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Yong Farmanta, S.P., M.Si.
197901162003121002

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tgl Cetak : 26/07/25 6:18 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		200,000	53,125,000,000	0	0	0	53,125,000,000
2010203002	Tanah Kebun Induk	M2	200,000	53,125,000,000	0	0	0	53,125,000,000
132111	Peralatan dan Mesin		145	6,225,270,375	(5,714,487,103)	(187,676,761)	(5,902,163,864)	323,106,511
3010305010	Pompa Air	Unit	1	11,000,000	(11,000,000)	0	(11,000,000)	0
3010307001	Mobil Workshop	Unit	2	776,753,138	(776,753,138)	0	(776,753,138)	0
3020101999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	dummy	1	23,207,348	(23,207,348)	0	(23,207,348)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	605,000,000	(517,857,142)	(21,785,715)	(539,642,857)	65,357,143
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	158,211,590	(136,595,291)	(5,404,075)	(141,999,366)	16,212,224
3020199999	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	dummy	2	78,677,000	(78,677,000)	0	(78,677,000)	0
3020501016	Pesawat tak berawak	Unit	1	188,238,000	(70,589,250)	(4,705,950)	(75,295,200)	112,942,800
3040101009	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	Buah	1	38,759,000	(38,759,000)	0	(38,759,000)	0
3040101999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	dummy	2	41,954,000	(41,954,000)	0	(41,954,000)	0
3040103999	Alat Panen Lainnya	dummy	1	164,840,000	(164,840,000)	0	(164,840,000)	0
3040105999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	dummy	2	135,887,800	(135,887,800)	0	(135,887,800)	0
3040106005	Mesin Tetas	Buah	2	10,000,000	(10,000,000)	0	(10,000,000)	0
3040107003	Alat Penggiling Padi	Buah	1	164,180,000	(164,180,000)	0	(164,180,000)	0
3040199999	Alat Pengolahan Lainnya	dummy	10	85,989,000	(85,989,000)	0	(85,989,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	9,555,155	(9,555,155)	0	(9,555,155)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	8,848,000	(8,848,000)	0	(8,848,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	16,700,000	(16,700,000)	0	(16,700,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3,050,000	(3,050,000)	0	(3,050,000)	0
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	1	250,000,000	(250,000,000)	0	(250,000,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	1	3,267,000	(3,267,000)	0	(3,267,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	6	3,450,000	(3,450,000)	0	(3,450,000)	0
3050201005	Sice	Buah	12	51,304,000	(41,404,000)	(4,950,000)	(46,354,000)	4,950,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	5	41,900,000	(41,900,000)	0	(41,900,000)	0
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	4,625,000	(4,625,000)	0	(4,625,000)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	10	32,417,000	(32,417,000)	0	(32,417,000)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	8	52,854,544	(43,896,684)	(2,985,952)	(46,882,636)	5,971,908
3050204004	A.C. Split	Buah	2	11,000,000	(11,000,000)	0	(11,000,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	1	57,124,000	(57,124,000)	0	(57,124,000)	0
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,000,800	(2,000,800)	0	(2,000,800)	0
3060347002	Genset	Buah	1	216,358,000	(162,268,500)	(10,817,900)	(173,086,400)	43,271,600
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	2,000,000	(2,000,000)	0	(2,000,000)	0
3070116008	Hotplate	Buah	1	40,864,000	(40,864,000)	0	(40,864,000)	0
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	1	17,500,000	(17,500,000)	0	(17,500,000)	0
3080101018	Kiedhli Digestion APP	Buah	1	179,216,000	(168,015,000)	(11,201,000)	(179,216,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tgl Cetak : 26/07/25 6:18 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080110114	Drying Oven	Buah	1	32,000,000	(32,000,000)	0	(32,000,000)	
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	110,000,000	(68,750,000)	(6,875,000)	(75,625,000)	34,375,000
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	3,000,000	(3,000,000)	0	(3,000,000)	0
3080111059	Furnace	Buah	1	63,370,000	(59,409,375)	(3,960,625)	(63,370,000)	0
3080111105	Multi Unit Extraction	Buah	1	503,947,400	(472,450,688)	(31,496,712)	(503,947,400)	0
3080111125	Refrigerator	Buah	1	11,900,000	(11,900,000)	0	(11,900,000)	0
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	6,000,000	(6,000,000)	0	(6,000,000)	0
3080112054	Precisions Balance	Buah	1	18,531,000	(17,372,813)	(1,158,187)	(18,531,000)	0
3080116013	Water Distillation Apparatus (Alat Laboratorium Hematologi)	Buah	1	76,274,000	(71,506,875)	(4,767,125)	(76,274,000)	0
3080131004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	2	1,216,600	(1,216,600)	0	(1,216,600)	0
3080141033	Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	196,435,000	(184,157,813)	(12,277,187)	(196,435,000)	0
3080141096	Fumehood	Buah	1	240,208,000	(225,195,000)	(15,013,000)	(240,208,000)	0
3080141124	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	55,202,000	(51,751,875)	(3,450,125)	(55,202,000)	0
3080141223	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	176,357,000	(165,334,688)	(11,022,312)	(176,357,000)	0
3080141315	Water Distillation/Purifier (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	280,217,000	(262,703,438)	(17,513,562)	(280,217,000)	0
3080141319	Waterbath (Shake,Still)	Buah	1	61,936,000	(58,065,000)	(3,871,000)	(61,936,000)	0
3080141999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	dummy	5	42,100,000	(40,498,750)	(533,750)	(41,032,500)	1,067,500
3080150016	Milling Unit	Buah	1	159,868,000	(149,876,250)	(9,991,750)	(159,868,000)	0
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1	33,000,000	(26,812,500)	(2,062,500)	(28,875,000)	4,125,000
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	1	304,323,000	(304,323,000)	0	(304,323,000)	0
3090409033	Ph Meter Bench	Buah	1	38,325,000	(38,325,000)	0	(38,325,000)	0
3090409110	Vortex Genie Mixer	Buah	1	7,170,000	(7,170,000)	0	(7,170,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	7	135,850,000	(135,850,000)	0	(135,850,000)	0
3100102003	Note Book	Buah	5	54,350,000	(54,350,000)	0	(54,350,000)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	38,800,000	(38,800,000)	0	(38,800,000)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	33,160,000	(33,160,000)	0	(33,160,000)	0
3130302999	Alat Pengolahan Air Lainnya	dummy	1	55,000,000	(18,333,330)	(1,833,334)	(20,166,664)	34,833,336
133111	Gedung dan Bangunan		46	32,926,434,836	(4,435,291,273)	(354,834,507)	(4,790,125,780)	28,136,309,056
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	5	16,965,357,100	(1,897,281,177)	(186,060,428)	(1,883,341,605)	15,082,015,495
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	2	664,772,447	(118,647,748)	(7,153,370)	(125,801,118)	538,971,329
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Unit	1	120,760,000	(14,491,200)	(1,207,600)	(15,698,800)	105,061,200
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	1	1,646,543,915	(279,912,463)	(16,465,439)	(296,377,902)	1,350,166,013
4010129001	Bangunan Untuk Kandang	Unit	1	230,711,000	(25,378,210)	(2,307,110)	(27,685,320)	203,025,680
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	3	885,187,000	(132,778,065)	(8,851,871)	(141,629,936)	743,557,064
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	3	1,693,507,186	(300,068,466)	(19,316,487)	(319,384,953)	1,374,122,233
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	1,445,715,000	(253,000,125)	(18,071,439)	(271,071,564)	1,174,643,436
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe Q Permanen	Unit	22	5,750,831,382	(1,017,467,761)	(59,145,700)	(1,076,613,461)	4,674,217,921

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tgl Cetak : 26/07/25 6:18 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	1,776,970,786	(317,805,614)	(18,794,273)	(336,599,887)	1,440,370,899
4040104001	Pagar Permanen	Unit	3	1,746,079,020	(278,460,444)	(17,460,790)	(295,921,234)	1,450,157,786
134111	Jalan dan Jembatan		824	108,238,000	(108,238,000)	0	(108,238,000)	0
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	824	108,238,000	(108,238,000)	0	(108,238,000)	0
134112	Irigasi		3	136,000,000	(34,057,500)	(1,667,500)	(35,725,000)	100,275,000
5020106008	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Unit	1	13,000,000	(4,420,000)	(130,000)	(4,550,000)	8,450,000
5020601003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Unit	1	35,000,000	(10,937,500)	(437,500)	(11,375,000)	23,625,000
5020603999	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lainnya	dummy	1	88,000,000	(18,700,000)	(1,100,000)	(19,800,000)	68,200,000
134113	Jaringan		6	385,028,110	(133,627,776)	(6,026,719)	(139,654,495)	245,373,615
5030105001	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	Unit	1	36,051,110	(20,428,959)	(600,852)	(21,029,811)	15,021,299
5030199999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	dummy	2	86,477,000	(39,633,395)	(1,441,283)	(41,074,678)	45,402,322
5040104001	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Unit	1	18,100,000	(11,463,334)	(301,667)	(11,765,001)	6,334,999
5040199999	Jaringan Air Minum Lainnya	dummy	1	150,700,000	(35,163,338)	(2,511,667)	(37,675,005)	113,024,995
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	1	93,700,000	(26,938,750)	(1,171,250)	(28,110,000)	65,590,000
135121	Aset Tetap Lainnya		4	480,000	0	0	0	480,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	4	480,000	0	0	0	480,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		12	115,536,104	(115,536,104)	0	(115,536,104)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	6	31,825,000	(31,825,000)	0	(31,825,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	3	40,737,104	(40,737,104)	0	(40,737,104)	0
3100102003	Note Book	Buah	3	42,974,000	(42,974,000)	0	(42,974,000)	0
JUMLAH			201,040	93,021,987,425	(10,541,237,756)	(550,205,487)	(11,091,443,243)	81,930,544,182

MANOKWARI, 26 Juli 2025
Pencanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
Dr. Long Farmanta, S.P., M.Si.
197901162003121002

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 450871 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

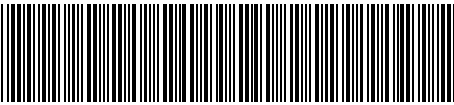
Tgl Data : 26/07/25 12:27 AM
Tgl Cetak : 26/07/25 6:18 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		1	68,400	(68,400)	0	(68,400)	0
3080141999	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	dummy	1	68,400	(68,400)	0	(68,400)	0
JUMLAH			1	68,400	(68,400)	0	(68,400)	0



MANOKWARI, 26 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Yono Samanta, S.P., M.Si.
197961162003121002



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.450871/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 - 2. Unit Organisasi : (09) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 - 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 - 4. Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
 - Sebesar : Rp. 4.370.107.000 (EMPAT MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	4.351.583.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	18.524.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 4.370.107.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

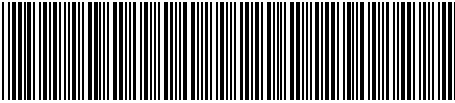
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025

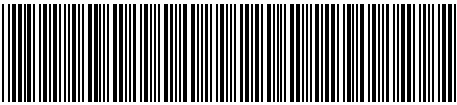


DS:8100-9068-0504-8928

Satker : (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	18.524.000
EC.6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp.	18.524.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.351.583.000
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp.	4.351.583.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
I A. INFORMASI KINERJA



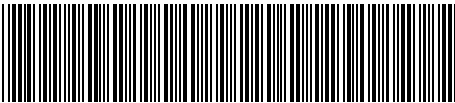
DS:8100-9068-0504-8928

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

Halaman : I A. 1

Program	:	018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			18.524.000
Kegiatan	:	6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			18.524.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan			
	:	2. 02	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan			
	:	3. 03	Jumah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	16,00	orang	18.524.000
Rincian Output	:	01	AEF.109 Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	16.00	orang	18.524.000
Program	:	018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			4.351.583.000
Kegiatan	:	6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian			4.351.583.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian			
	:	2. 01	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian			
	:	3. 02	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian			
	:	4. 02	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Suberdaya Genetik Pertanian			
	:	5. 03	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian			
	:	6. 03	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian			
	:	7. 04	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya lahan Pertanian			
	:	8. 04	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian			
	:	9. 05	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian			
	:	10. 05	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian			
	:	11. 06	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian			
	:	12. 06	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian			
	:	13. 07	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura			
	:	14. 07	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8100-9068-0504-8928

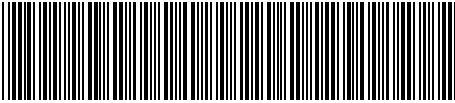
Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian											
		15.	08	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan							
		16.	08	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan							
		17.	09	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan							
		18.	09	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada PusatStandardisasi Instrumen Peternakan							
		19.	10	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan							
		20.	10	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan							
		21.	11	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Standardisasi Instrumen Pertanian							
		22.	12	Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Standardisasi Instrumen yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian							
		23.	13	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.351.583.000	
Rincian Output		:	01	EBA.956	Layanan BMN				1.00	Layanan	10.000.000
		:	02	EBA.962	Layanan Umum				1.00	Layanan	195.000.000
		:	03	EBA.994	Layanan Perkantoran				1.00	Layanan	4.146.583.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8100-9068-0504-8928

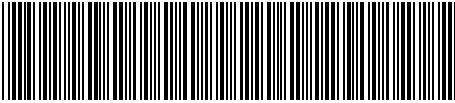
Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	4.370.107.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	4.351.583.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	18.524.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8100-9068-0504-8928

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
Kewenangan : (KD)

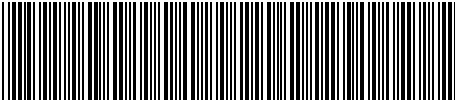
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
450871	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	1.774.824	2.595.283	-	-	-	4.370.107	33 . 01	
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	18.524	-	-	-	18.524		
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	-	18.524	-	-	-	18.524		
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	18.524	-	-	-	18.524		
04	PNBP	-	18.524	-	-	-	18.524		
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	1.774.824	2.576.759	-	-	-	4.351.583	065@	
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	1.774.824	2.576.759	-	-	-	4.351.583		
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	1.774.824	2.576.759	-	-	-	4.351.583		
01	RM	1.774.824	2.576.759	-	-	-	4.351.583	065@	
JUMLAH		1.774.824	2.595.283	-	-	-	4.370.107		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8100-9068-0504-8928

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

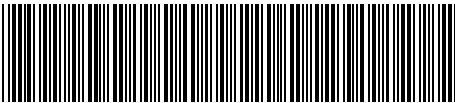
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	450871	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat													
		RENCANA PENARIKAN DANA	225.952	259.904	357.860	656.905	282.876	519.613	328.632	348.755	333.067	415.360	293.768	347.416	4.370.107
		BELANJA PEGAWAI	112.924	124.857	116.744	236.511	112.924	244.124	112.924	151.005	112.924	149.424	112.924	187.539	1.774.824
		BELANJA BARANG	113.028	135.047	241.116	420.394	169.952	275.489	215.708	197.750	220.143	265.936	180.844	159.877	2.595.283
		Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	0	0	0	0	675	2.400	3.502	8.570	0	0	200	3.177	18.524
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	675	2.400	3.502	8.570	0	0	200	3.177	18.524
		Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	225.952	259.904	357.860	656.905	282.201	517.213	325.130	340.185	333.067	415.360	293.568	344.239	4.351.583
		51 BELANJA PEGAWAI	112.924	124.857	116.744	236.511	112.924	244.124	112.924	151.005	112.924	149.424	112.924	187.539	1.774.824
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	113.028	135.047	241.116	420.394	169.277	273.089	212.206	189.180	220.143	265.936	180.644	156.700	2.576.759
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.500	4.318	4.318	4.318	4.443	4.568	4.568	4.518	4.518	4.318	4.318	4.320	51.025
		- PNBP (425112)	0	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.820	20.000
		- PNBP (425131)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
		- PNBP (425289)	0	0	0	0	125	250	250	200	200	0	0	0	1.025

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
IV A. B L O K I R



DS:8100-9068-0504-8928

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [450871] Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

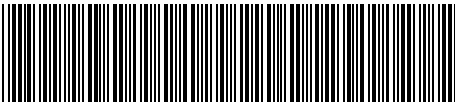
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
450871	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat		Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 223.524	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 223.524		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.941
018.09.EC 6916	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		Belum ada persetujuan DPR RI
6916.AEF	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
	Sosialisasi dan Diseminasi	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
521211	Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.649		Belum ada persetujuan DPR RI
	Belum ada persetujuan DPR RI	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 153.009
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 675		Belum ada persetujuan DPR RI
	Belum ada persetujuan DPR RI	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI	
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.200		
	Belum ada persetujuan DPR RI		
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			
018.09.WA 6918	Program Dukungan Manajemen		
6918.EBA	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
521211	Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.250		
	Belum ada persetujuan DPR RI		
Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000		
	Belum ada persetujuan DPR RI		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8100-9068-0504-8928

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [450871] Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			18,524,000		
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			18,524,000		
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]	16.0 orang		18,524,000		
	Lokasi : KAB. MANOKWARI					
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	16.0 orang		18,524,000		
051	Diseminasi standar instrumen pertanian			18,524,000	U	
A	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian			18,524,000		
521211	Belanja Bahan			4,649,000	1	PNP
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Seminar Kit	16.0 Pak	50,000	800,000	*	
	- Cetak bahan diseminasi	16.0 Eks	30,000	480,000	*	
	- Jilid laporan	4.0 Eks	50,000	200,000	*	
	- ATK dan komputer suplies	1.0 Kali	622,000	622,000	*	
	- ATK dan komputer suplies (Blokir)	1.0 Kali	297,000	297,000	*	
	> Konsumsi dalam rangka sosialisasi/bimtek			2,250,000		
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	25.0 OK	28,000	700,000	*	SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	25.0 OK	62,000	1,550,000	*	SBM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			675,000	1	PNP
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Pembelian referensi standar	3.0 Buah	225,000	675,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13,200,000	1	PNP
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			10,080,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	15.0 OH	480,000	7,200,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (Blokir)	6.0 OH	480,000	2,880,000	*	SBM
	> Penggantian biaya transport dan uang harian peserta sosialisasi/bimtek (petani/pelaku usaha)			3,120,000		
	- Biaya transportasi peserta	16.0 OK	100,000	1,600,000	*	
	- Uang Harian Fullday	16.0 OH	95,000	1,520,000	*	SBM
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			4,351,583,000		
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian			4,351,583,000		
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,351,583,000		
	Lokasi : PAPUA BARAT					
6918.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		10,000,000		
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN			10,000,000		
A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN			10,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u>			5,750,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Jilid Laporan	4.0 Eks	50,000	200,000	*	
	- Cetak label barang	150.0 Lbr	25,000	3,750,000	*	
	> Komsumsi Rapat/Pertemuan			1,800,000		
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	20.0 OK	28,000	560,000	*	SBM
521811	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	20.0 OK	62,000	1,240,000	*	SBM
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			3,290,000	1	RM
521811	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK, Komputer suplies	1.0 Kali	3,290,000	3,290,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			960,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
524111	> Perjalanan lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			960,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	2.0 OH	480,000	960,000	*	SBM
6918.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		195,000,000		
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum			195,000,000		
A	Penyusunan Program dan Anggaran			15,272,000		
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			670,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
521811	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	670,000	670,000	*	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			14,602,000	1	RM
524111	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000		
524111	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	*	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	*	SBM
524111	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	*	SBM
	B	Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi		5,240,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u>			100,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
521811	- Jilid Laporan	4.0 Eks	25,000	100,000	*	
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			880,000	1	RM
521811	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	880,000	880,000	*	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			900,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
522151	> Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) (1 Org x 1 Jam x 1 Kali)			900,000		
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	1.0 OJ	900,000	900,000	*	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			3,360,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			3,360,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	7.0 OH	480,000	3,360,000	*	SBM
C	<i>Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks</i>			16,412,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u>			100,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Jilid Laporan	4.0 Eks	25,000	100,000	*	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			750,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	750,000	750,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			15,562,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	*	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	*	SBM
	> Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			960,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	2.0 OH	480,000	960,000	*	SBM
	D	<i>Pengelolaan Informasi Publik</i>			23,702,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			4,800,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Jilid laporan	8.0 Eks	25,000	200,000	*	
	- Cetak blangko	18.0 Rim	100,000	1,800,000	*	
	- Cetak Spanduk, Banner	4.0 Lbr	250,000	1,000,000	*	
	- Bahan cetakan	18.0 Eks	50,000	900,000	*	
	> Konsumsi rapat/pertemuan			900,000		
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	28,000	280,000	*	SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	62,000	620,000	*	SBM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			1,000,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	1,000,000	1,000,000	*	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			900,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) (1 Org x 1 Jam x 1 Kali)			900,000		
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	1.0 OJ	900,000	900,000	*	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			17,002,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	*	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	*	SBM
	> Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			2,400,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	5.0 OH	480,000	2,400,000	*	SBM
	<i>Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi</i>			24,737,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u>			6,700,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Cetak blangko	20.0 Rim	100,000	2,000,000	*	
	- Cetak Spanduk, Banner	5.0 Lbr	400,000	2,000,000	*	
	- Bahan cetakan	36.0 Eks	50,000	1,800,000	*	
	> Konsumsi Rapat/Pertemuan			900,000		
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	28,000	280,000	*	SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	62,000	620,000	*	SBM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			555,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	555,000	555,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			17,482,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	*	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	*	SBM
	> Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			2,880,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	6.0 OH	480,000	2,880,000	*	SBM
	<i>Layanan Kepegawaian</i>			24,602,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,000,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Jilid laporan	8.0 Eks	25,000	200,000	*	
	- Cetak blangko	8.0 Rim	100,000	800,000	*	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			9,000,000	1	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	2.0 Kali	4,500,000	9,000,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	1.0 OK 3.0 OH 4.0 OH	10,824,000 686,000 430,000	14,602,000 14,602,000 10,824,000 2,058,000 1,720,000	1 * *	RM SBM SBM
G	Layanan Keuangan			16,425,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Jilid Laporan - Cetak blangko	4.0 Eks 2.0 Rim	25,000 100,000	100,000 200,000	* *	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	1,523,000	1,523,000	*	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	1.0 OK 3.0 OH 4.0 OH	10,824,000 686,000 430,000	14,602,000 14,602,000 10,824,000 2,058,000 1,720,000	1 * *	RM SBM SBM
H	Layanan Ketatausahaan Rumah Tangga Kearsipan dan Perlengkapan			26,105,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Jilid laporan - Cetak blangko	4.0 Eks 4.0 Rim	25,000 100,000	100,000 400,000	* *	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan majalah, koran, tabloid dan lain lain - Layanan Aplikasi Berbayar	1.0 Keg 1.0 Keg	5,000,000 4,000,000	5,000,000 4,000,000	* *	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	2,003,000	2,003,000	*	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	1.0 OK 3.0 OH 4.0 OH	10,824,000 686,000 430,000	14,602,000 14,602,000 10,824,000 2,058,000 1,720,000	1 * *	RM SBM SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Sinkronisasi Kegiatan			42,505,000	
521211	Belanja Bahan			2,000,000	1 RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Jilid laporan	4.0 Eks	50,000	200,000	*
	> Konsumsi rapat/pertemuan			1,800,000	
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	20.0 OK	28,000	560,000	* SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	20.0 OK	62,000	1,240,000	* SBM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			270,000	1 RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	270,000	270,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			40,235,000	1 RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			29,204,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	2.0 OK	10,824,000	21,648,000	* SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	6.0 OH	686,000	4,116,000	* SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	8.0 OH	430,000	3,440,000	* SBM
	> Perjalanan dinas antar kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan			10,071,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan dinas Manokwari-Kabupaten Lainnya	1.0 OK	5,250,000	5,250,000	*
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT)	3.0 OH	967,000	2,901,000	* SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas (Papua Barat)	4.0 OH	480,000	1,920,000	* SBM
	> Perjalanan lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			960,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	2.0 OH	480,000	960,000	* SBM
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,146,583,000	
001	Gaji dan Tunjangan			1,774,824,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			1,774,824,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,061,261,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	909,651,000	909,651,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	75,805,000	75,805,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	75,805,000	75,805,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			19,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	15,000	15,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			70,060,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	60,050,000	60,050,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,005,000	5,005,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,005,000	5,005,000	
				20,969,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)				RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	17,973,000	17,973,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,498,000	1,498,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,498,000	1,498,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			25,200,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	21,600,000	21,600,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,800,000	1,800,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,800,000	1,800,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			91,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	78,480,000	78,480,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			9,030,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	1,390,000	1,390,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,820,000	3,820,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,820,000	3,820,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			57,044,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	48,894,000	48,894,000	
	- Belanja Tunj Beras PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	4,075,000	4,075,000	
	- Belanja Tunj Beras PNS (gaji ke 14)	1.0 THN	4,075,000	4,075,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			200,518,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	200,518,000	200,518,000	
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			116,700,000	RM
	- Belanja Tunjangan Papua	1.0 THN	116,700,000	116,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			25,900,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	22,200,000	22,200,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,850,000	1,850,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,850,000	1,850,000	
				45,973,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)				RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	39,405,000	39,405,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,284,000	3,284,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,284,000	3,284,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)			4,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
				4,620,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)				RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,960,000	3,960,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	330,000	330,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	330,000	330,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)			7,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	6,480,000	6,480,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	540,000	540,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	540,000	540,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)			2,082,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PPPK	1.0 THN	1,782,000	1,782,000	
	- Belanja Tunj Beras PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	150,000	150,000	
	- Belanja Tunj Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	150,000	150,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)			9,768,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	9,768,000	9,768,000	
511632	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)			5,100,000	RM
	- Belanja Tunjangan Papua PPPK	1.0 THN	5,100,000	5,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.065-Manokwari) - Uang lembur golongan II - Uang lembur golongan III - Uang lembur golongan IV	46.0 OJ 634.0 OJ 37.0 OJ	24,000 30,000 36,000	21,456,000 1,104,000 19,020,000 1,332,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,371,759,000	
A	<i>Operasional perkantoran</i>			1,445,026,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honorarium Satpam dan Pengemudi Papua Barat - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Papua Barat - keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Papua Barat)	52.0 OB 156.0 OB 1.0 STKR	4,124,000 3,749,000 67,630,000	214,448,000 584,844,000 67,630,000	RM SBM SBM SBM
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) - Honorarium Staf Pengelola Belanja Pegawai (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta)	12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB	1,370,000 1,330,000 530,000 470,000 350,000 300,000 200,000 200,000	16,440,000 15,960,000 6,360,000 5,640,000 8,400,000 3,600,000 2,400,000 2,400,000	SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman surat, dokumen dan barang - Jamuan tamu - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Papua Barat) - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Papua Barat) - Pakaian Kerja Satpam (Papua Barat) - Surveillance ISO 9001:2015 - Surveillance/Akreditasi Laboratorium ISO 17025:2012 - Surveillance LSPro ISO 17065:2012	1.0 Keg 1.0 Keg 22.0 STEL 13.0 STEL 3.0 STEL 1.0 Kali 1.0 Kali 1.0 Kali	35,000,000 54,000,000 1,376,000 924,000 2,540,000 35,000,000 20,000,000 35,000,000	35,000,000 54,000,000 30,272,000 12,012,000 7,620,000 35,000,000 20,000,000 35,000,000	RM SBM SBM SBM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan listrik	12.0 bulan	16,000,000	192,000,000 192,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (09) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
UNIT KERJA (450871) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
ALOKASI Rp. 4,370,107,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telepon dan Internet	12.0 bulan	7,000,000	84,000,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan air bersih PDAM	12.0 bulan	1,000,000	12,000,000	RM
B	<i>Pemeliharaan perkantoran</i>			867,092,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Papua Barat) (Kantor BPSIP Papua Barat) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Kantor Kebun Percobaan Anday) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Kantor Kebun Percobaan Manokwari) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Kantor Kebun Percobaan Sorong) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Gedung Laboratorium Pengujian) - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Papua Barat)	500.0 M2 120.0 M2 150.0 M2 100.0 M2 208.0 M2 3000.0 M2	632,000 469,000 469,000 469,000 469,000 19,000	316,000,000 56,280,000 70,350,000 46,900,000 97,552,000 57,000,000	RM SBM SBM SBM SBM SBM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Papua Barat) - Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 (Papua Barat) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Papua Barat) - Biaya Pajak Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Papua Barat) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Papua Barat) - Biaya Pajak Kendaraan Roda 2 (Papua Barat) - Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan AC Split - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Laboratorium, Motor Roda 3, Handtractor, Cultivator, Mesin Pe	2.0 UNIT 2.0 UNIT 2.0 UNIT 2.0 UNIT 6.0 UNIT 6.0 UNIT 1.0 UNIT 8.0 UNIT 8.0 UNIT 1.0 Keg	37,650,000 1,200,000 36,390,000 2,000,000 5,240,000 250,000 7,190,000 690,000 610,000 18,000,000	75,300,000 2,400,000 72,780,000 4,000,000 31,440,000 1,500,000 7,190,000 5,520,000 4,880,000 18,000,000	SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM SBM
C	<i>Pengelolaan Laboratorium</i>			40,641,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Bahan kimia dan suplies laboratorium	1.0 Kali	19,236,000	19,236,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari) - Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 Kali	21,405,000	21,405,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 AWAL

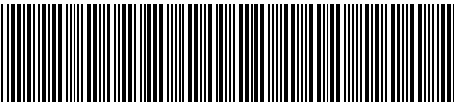
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 4,370,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengelolaan Kebun Percobaan			19,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.065-Manokwari)			10,000,000	RM
	> Upah harian lepas kebun percobaan			10,000,000	
	- Honorarium Pembantu Lapangan	125.0 OH	80,000	10,000,000	SBM
521211	Belanja Bahan (KPPN.065-Manokwari)			9,000,000	RM
	- Saprodi	2.0 Kali	4,500,000	9,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.450871/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 06
Tanggal : 20 Mei 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
- 2. Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
- 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
- Sebesar : Rp. 5.470.107.000 (LIMA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.451.583.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	18.524.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 5.470.107.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

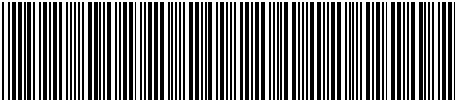
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025

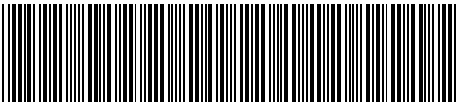


DS:8302-1309-0366-3406

Satker : (450871) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	18.524.000
EC.7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp.	18.524.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.451.583.000
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	5.451.583.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
I A. INFORMASI KINERJA



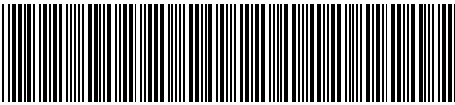
DS:8302-1309-0366-3406

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

Halaman : I A. 1

Program	:	018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			18.524.000
Kegiatan	:	7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			18.524.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase produk usaha tani yang tersertifikasi (%)			
		2. 01	Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%)			
		3. 02	Indeks kepuasan layanan pengujian			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	47,00	orang	18.524.000
Rincian Output	:	01 AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	47.00	orang	18.524.000
Program	:	018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			5.451.583.000
Kegiatan	:	6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian			5.451.583.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			
		2. 01	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			
		3. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian			
		4. 02	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian			
		5. 03	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian			
		6. 03	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian			
		7. 04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian			
		8. 04	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian			
		9. 05	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian			
		10. 05	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian			
		11. 06	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian			
		12. 06	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian			
		13. 07	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura			
		14. 07	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8302-1309-0366-3406

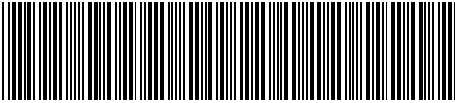
Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian											
		15.	08	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan							
		16.	08	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan							
		17.	09	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan							
		18.	09	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan							
		19.	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan							
		20.	10	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan							
		21.	11	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian							
		22.	11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi							
		23.	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner							
		24.	12	Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian							
		25.	13	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal							
		26.	14	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner							
		27.	15	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6918.AEA	Koordinasi				1,00	kegiatan	1.100.000.000	
Rincian Output		:	01	AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian				1.00	kegiatan	1.100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.351.583.000	
Rincian Output		:	01	EBA.956	Layanan BMN				1.00	Layanan	10.000.000
			02	EBA.962	Layanan Umum				1.00	Layanan	195.000.000
			03	EBA.994	Layanan Perkantoran				1.00	Layanan	4.146.583.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8302-1309-0366-3406

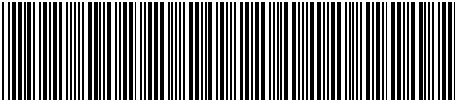
Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	5.470.107.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	5.451.583.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8302-1309-0366-3406

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
Kewenangan : (KD)

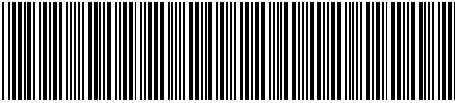
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
450871	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	1.774.824	3.695.283	-	-	-	5.470.107	33 . 00 065@ 33 . 00 065@ 33 . 00 065@	
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	18.524	-	-	-	18.524		
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	-	18.524	-	-	-	18.524		
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	18.524	-	-	-	18.524		
04	PNBP	-	18.524	-	-	-	18.524		
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	1.774.824	3.676.759	-	-	-	5.451.583		
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.774.824	3.676.759	-	-	-	5.451.583		
6918.AEA	Koordinasi (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000		
01	RM	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000		
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	1.774.824	2.576.759	-	-	-	4.351.583		
01	RM	1.774.824	2.576.759	-	-	-	4.351.583	065@	
JUMLAH		1.774.824	3.695.283	-	-	-	5.470.107		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8302-1309-0366-3406

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (450871) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

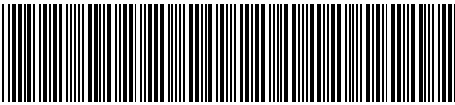
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	450871	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat													
		RENCANA PENARIKAN DANA	106.112	277.872	440.180	309.483	593.156	635.349	501.017	539.762	421.157	481.737	466.169	698.114	5.470.107
		BELANJA PEGAWAI	106.112	106.249	229.507	111.987	126.784	210.113	133.279	115.030	137.462	116.530	137.462	244.307	1.774.824
		BELANJA BARANG	0	171.623	210.673	197.496	466.371	425.236	367.738	424.731	283.694	365.207	328.706	453.808	3.695.283
		Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	0	0	0	622	2.595	3.200	8.730	0	0	0	200	3.177	18.524
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	622	2.595	3.200	8.730	0	0	0	200	3.177	18.524
		Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	106.112	277.872	440.180	308.861	590.561	632.149	492.287	539.762	421.157	481.737	465.969	694.937	5.451.583
		51 BELANJA PEGAWAI	106.112	106.249	229.507	111.987	126.784	210.113	133.279	115.030	137.462	116.530	137.462	244.307	1.774.824
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	171.623	210.673	196.874	463.776	422.036	359.008	424.731	283.694	365.207	328.506	450.631	3.676.759
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.500	4.318	4.318	4.318	4.443	4.568	4.568	4.518	4.518	4.318	4.318	4.320	51.025
		- PNB (425112)	0	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.820	20.000
		- PNB (425131)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
		- PNB (425289)	0	0	0	0	125	250	250	200	200	0	0	0	1.025

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
IV A. B L O K I R



DS:8302-1309-0366-3406

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [450871] Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

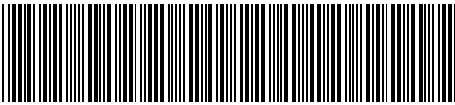
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
450871	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	6918.EBA	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 439.277		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	52 Belanja Barang Rp. 439.277		521211 Belanja Bahan(RM)
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian		Tidak Relevan dengan RO
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.649		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.630
	Belum ada persetujuan DPR RI		Tidak Relevan dengan RO
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 675		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800
	Belum ada persetujuan DPR RI		Tidak Relevan dengan RO
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.899
	Belum ada persetujuan DPR RI		Tidak Relevan dengan RO
	Disposisi: Alokasi masih memerlukan persetujuan DPR RI		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen		
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
6918.AEA	Koordinasi		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.424		
	Termasuk kategori belanja yang perlu diefisiensi		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 360.000		
	Termasuk kategori belanja yang perlu dilakukan efisiensi		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.450871/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8302-1309-0366-3406

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [450871] Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			18,524,000	
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			18,524,000	
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]	47.0 orang		18,524,000	
	Lokasi : PAPUA BARAT				
7911.AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	47.0 orang		18,524,000	
051	Diseminasi standar instrumen pertanian			18,524,000	U
A	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian			18,524,000	
521211	Belanja Bahan			4,649,000	1 PNP
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Seminar Kit	16.0 Pak	50,000	800,000	*
	- Cetak bahan diseminasi	16.0 Eks	30,000	480,000	*
	- Jilid laporan	4.0 Eks	50,000	200,000	*
	- ATK dan komputer suplies	1.0 Kali	622,000	622,000	*
	- ATK dan komputer suplies (Blokir)	1.0 Kali	297,000	297,000	*
	> Konsumsi dalam rangka sosialisasi/bimtek			2,250,000	
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	25.0 OK	28,000	700,000	* SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	25.0 OK	62,000	1,550,000	* SBM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			675,000	1 PNP
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Pembelian referensi standar	3.0 Buah	225,000	675,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			13,200,000	1 PNP
	(KPPN.065-Manokwari)				
	> Perjalanan lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			10,080,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	15.0 OH	480,000	7,200,000	* SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (Blokir)	6.0 OH	480,000	2,880,000	* SBM
	> Penggantian biaya transport dan uang harian peserta sosialisasi/bimtek (petani/pelaku usaha)			3,120,000	
	- Biaya transportasi peserta	16.0 OK	100,000	1,600,000	*
	- Uang Harian Fullday	16.0 OH	95,000	1,520,000	* SBM
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			5,451,583,000	
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian			5,451,583,000	
6918.AEA	Koordinasi[Base Line]	1.0 kegiatan		1,100,000,000	
	Lokasi : PAPUA BARAT				
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.0 kegiatan		1,100,000,000	
051	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian			1,100,000,000	U
A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian			1,100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u>			27,550,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Jilid laporan dan dokumentasi	4.0 Eks	250,000	1,000,000	
	> Konsumsi rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi di Papua Barat			3,150,000	
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	35.0 OK	28,000	980,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	35.0 OK	62,000	2,170,000	SBM
	> Konsumsi rapat/pertemuan dalam rangka pendampingan dan monev di Papua Barat			10,800,000	
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	120.0 OK	28,000	3,360,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	120.0 OK	62,000	7,440,000	SBM
	> Konsumsi rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi di Papua Barat Daya			2,520,000	
	- Snack Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	28.0 OK	28,000	784,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	28.0 OK	62,000	1,736,000	SBM
	> Konsumsi rapat/pertemuan dalam rangka pendampingan dan monev di Papua Barat Daya			10,080,000	
	- Snack Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	112.0 OK	28,000	3,136,000	SBM
	- Makan Rapat Biasa (Papua Barat Daya)	112.0 OK	62,000	6,944,000	SBM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			5,424,000	2 RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	5,424,000	5,424,000	*
522141	<u>Belanja Sewa</u>			267,026,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua Barat)	4.0 HARI	1,171,000	4,684,000	SBM
	- Sewa Kendaraan Roda 4 (Papua Barat Daya)	2.0 HARI	1,171,000	2,342,000	SBM
	- Sewa kendaraan double gardan	52.0 HARI	5,000,000	260,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(09)

(450871)

Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			800,000,000	2	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			73,010,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI [1 Orang x 1 Hari x 3 Kali]	3.0 OK	10,824,000	32,472,000		SBM
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 2 Kali]	2.0 OK	10,824,000	21,648,000	*	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [1 Orang x 3 Hari x 3 Kali]	9.0 OH	686,000	6,174,000		SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) (blokir) [1 Orang x 3 Hari x 2 Kali]	6.0 OH	686,000	4,116,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [1 Orang x 4 Hari x 3 Kali]	12.0 OH	430,000	5,160,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) (blokir) [1 Orang x 4 Hari x 2 Kali]	8.0 OH	430,000	3,440,000	*	SBM
	> Perjalanan dinas ke lokasi dalam rangka Pendampingan dan Monev di Provinsi Papua Barat			347,098,000		
	>> Kabupaten Fakfak		0	132,852,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan dinas Manokwari-Fakfak [1 Orang x 1 Hari x 5 Kali]	5.0 OK	5,250,000	26,250,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan dinas Manokwari-Fakfak (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 7 Kali]	7.0 OK	5,250,000	36,750,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) [1 Orang x 3 Hari x 5 Kali]	15.0 OH	967,000	14,505,000		SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) (Blokir) [1 Orang x 3 Hari x 7 Kali]	21.0 OH	967,000	20,307,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [1 Orang x 4 Hari x 5 Kali]	20.0 OH	480,000	9,600,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (Blokir) [1 Orang x 4 Hari x 7 Kali]	28.0 OH	480,000	13,440,000	*	SBM
	- Transport Bandara - penginapan PP [1 Orang x 1 Hari x 5 Kali]	5.0 OH	1,331,200	6,656,000		
	- Transport Bandara - penginapan PP (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	4.0 OH	1,000,000	4,000,000	*	
	- Transport Bandara - penginapan PP (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 2 Kali]	2.0 OH	500,000	1,000,000	*	
	- Transport Bandara - penginapan PP (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 1 Kali]	1.0 OH	344,000	344,000	*	
	>> Kabupaten Teluk Wondama		0	63,210,000		
	- Satuan biaya transportasi laut dari Manokwari ke Teluk Wondama PP [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	1,000,000	6,000,000		
	- Satuan biaya transportasi laut dari Manokwari ke Teluk Wondama PP (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	4.0 OK	1,000,000	4,000,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) [1 Orang x 3 Kali x 6 Kali]	18.0 OH	967,000	17,406,000		SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) [1 Orang x 3 Kali x 4 Kali]	12.0 OH	967,000	11,604,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [1 Orang x 4 Hari x 6 Kali]	24.0 OH	480,000	11,520,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (blokir) [1 Orang x 4 Hari x 4 Kali]	16.0 OH	480,000	7,680,000	*	SBM
	- Transport Pelabuhan - penginapan PP [1 Orang x 1 Hari]	6.0 OH	500,000	3,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(018)

(09)

(450871)

Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Transport Pelabuhan - penginapan PP (blokir) [1 Orang x 1 Hari]	4.0 OH	500,000	2,000,000	*	
	>> Kabupaten Teluk Bintuni		0	79,452,000		
	- Satuan biaya transportasi darat dari Manokwari ke Teluk Bintuni [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	900,000	5,400,000		SBM
	- Satuan biaya transportasi darat dari Manokwari ke Teluk Bintuni (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	900,000	5,400,000	*	SBM
	- Satuan biaya transportasi darat dari Teluk Bintuni ke Manokwari [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	900,000	5,400,000		SBM
	- Satuan biaya transportasi darat dari Teluk Bintuni ke Manokwari (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	900,000	5,400,000	*	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) [1 Orang x 3 Hari x 6 Kali]	18.0 OH	967,000	17,406,000		SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) (blokir) [1 Orang x 3 Hari x 6 Kali]	18.0 OH	967,000	17,406,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [1 Orang x 4 Hari x 6 Kali]	24.0 OH	480,000	11,520,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (Blokir) [1 Orang x 4 Hari x 6 Kali]	24.0 OH	480,000	11,520,000	*	SBM
	>> Kabupaten Manokwari Selatan		0	61,686,000		
	- Satuan biaya transportasi darat dari Manokwari ke Manokwari Selatan [2 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	12.0 OK	750,000	9,000,000		SBM
	- Satuan biaya transportasi darat dari Manokwari ke Manokwari Selatan (Blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	750,000	4,500,000	*	SBM
	- Satuan biaya transportasi darat dari Manokwari Selatan ke Manokwari [2 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	12.0 OK	750,000	9,000,000		SBM
	- Satuan biaya transportasi darat dari Manokwari Selatan ke Manokwari [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	750,000	4,500,000	*	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) [2 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	12.0 OH	967,000	11,604,000		SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OH	967,000	5,802,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [2 Orang x 2 Hari x 6 Kali]	24.0 OH	480,000	11,520,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) (Blokir) [1 Orang x 2 Hari x 6 Kali]	12.0 OH	480,000	5,760,000	*	SBM
	>> Kabupaten Manokwari		0	9,898,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [1 Orang x 1 Hari x 7 Kali]	7.0 OH	480,000	3,360,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [1 Orang x 1 Hari x 5 Kali]	5.0 OH	480,000	2,400,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [1 Orang x 1 Hari x 8 Kali]	8.0 OH	480,000	3,840,000		SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) [1 Orang x 1 Hari x 1 Kali]	1.0 OH	298,000	298,000		
	- Perjalanan dinas ke lokasi dalam rangka Pendampingan dan Monev di Provinsi Papua Barat Daya			379,892,000		
	>> Kabupaten Raja Ampat		0	95,052,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG [1 Orang x 1 Hari x 5 Kali]	5.0 OK	1,800,000	9,000,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG (Blokir) [1 Orang x 1 Hari x 7 Kali]	7.0 OK	1,800,000	12,600,000	*	
	- Transport Laut Kabupaten Sorong - Raja Ampat PP [1 Orang x 1 Hari x 5 Kali]	5.0 OK	800,000	4,000,000		
	- Transport Laut Kabupaten Sorong - Raja Ampat PP (Blokir) [1 Orang x 1 Hari x 7 Kali]	7.0 OK	800,000	5,600,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB

(018)

KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORG

(09)

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

UNIT KERJA

(450871)

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

ALOKASI

Rp. 5,470,107,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) [1 Orang x 3 Hari x 5 Kali]	15.0 OH	967,000	14,505,000		SBM
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) (Blokir) [1 Orang x 3 Hari x 7 Kali]	21.0 OH	967,000	20,307,000	*	SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) [1 Orang x 4 Hari x 5 Kali]	20.0 OH	480,000	9,600,000		SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) (Blokir) [1 Orang x 4 Hari x 7 Kali]	28.0 OH	480,000	13,440,000	*	SBM
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP [1 Orang x 1 Hari x 5 Kali]	5.0 OH	500,000	2,500,000		
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP (Blokir) [1 Orang x 1 Hari x 7 Kali]	7.0 OH	500,000	3,500,000	*	
	>> Kabupaten Sorong		0	85,452,000		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	8.0 OK	1,800,000	14,400,000		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG (Blokir) [1 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	4.0 OK	1,800,000	7,200,000	*	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) [2 Orang x 3 Hari x 4 Kali]	24.0 OH	967,000	23,208,000		SBM
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) (Blokir) [1 Orang x 3 Hari x 4 Kali]	12.0 OH	967,000	11,604,000	*	SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) [2 Orang x 4 Hari x 4 Kali]	32.0 OH	480,000	15,360,000		SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) (blokir) [1 Orang x 4 Hari x 4 Kali]	16.0 OH	480,000	7,680,000	*	SBM
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	8.0 OH	500,000	4,000,000		
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP (Blokir) [1 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	4.0 OH	500,000	2,000,000	*	
	>> Kabupaten Sorong Selatan		0	99,694,000		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	8.0 OK	1,800,000	14,400,000		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	1,800,000	10,800,000	*	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) [2 Orang x 3 Hari x 4 Kali]	24.0 OH	967,000	23,208,000		SBM
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) (Blokir) [1 Orang x 3 Hari x 6 Kali]	18.0 OH	967,000	17,406,000	*	SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) [2 Orang x 4 Hari x 4 Kali]	32.0 OH	480,000	15,360,000		SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) (Blokir) [1 Orang x 4 Hari x 6 Kali]	24.0 OH	480,000	11,520,000	*	SBM
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	8.0 OH	500,000	4,000,000		
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP (Blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OH	500,000	3,000,000	*	
	>> Kabupaten Tambraw		0	99,694,000		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	8.0 OK	1,800,000	14,400,000		
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MANOKWARI-SORONG (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OK	1,800,000	10,800,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
6918.EBA	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) [2 Orang x 3 Hari x 4 Kali]	24.0 OH	967,000	23,208,000		SBM
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT DAYA) (blokir) [1 Orang x 3 Hari x 6 Kali]	18.0 OH	967,000	17,406,000	*	SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) [2 Orang x 4 Hari x 4 Kali]	32.0 OH	480,000	15,360,000		SBM
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat Daya) (Blokir) [1 Orang x 4 Hari x 6 Kali]	24.0 OH	480,000	11,520,000	*	SBM
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP [2 Orang x 1 Hari x 4 Kali]	8.0 OH	500,000	4,000,000		
	Transport Bandara Eduard Osok- penginapan PP (blokir) [1 Orang x 1 Hari x 6 Kali]	6.0 OH	500,000	3,000,000	*	
		3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,351,583,000		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]					

6918.EBA.956	Lokasi : PAPUA BARAT					
051	Layanan BMN	1.0 Layanan		10,000,000		
A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN			10,000,000		
521211	Pelaksanaan Pengelolaan BMN			10,000,000		
	Belanja Bahan			5,750,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Jilid Laporan	4.0 Eks	50,000	200,000		
	- Cetak label barang	150.0 Lbr	25,000	3,750,000		
	> Komsumsi Rapat/Pertemuan			1,800,000		
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	20.0 OK	28,000	560,000		SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	20.0 OK	62,000	1,240,000		SBM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			3,290,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK, Komputer suplies	1.0 Kali	3,290,000	3,290,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			960,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			960,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	2.0 OH	480,000	960,000		SBM
6918.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		195,000,000		
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum			195,000,000		
A	Penyusunan Program dan Anggaran			15,272,000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			670,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	670,000	670,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI (Blokir) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)			14,602,000	2	RM
B	<u>Monitoring Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi</u>			14,602,000		
				849,000		SBM
		1.0 OK	849,000	849,000		SBM
		1.0 OK	9,975,000	9,975,000	*	SBM
		3.0 OH	686,000	2,058,000		SBM
		4.0 OH	430,000	1,720,000		SBM
				5,240,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Jilid Laporan			100,000	2	RM
		4.0 Eks	25,000	100,000	*	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - ATK dan komputer suplai			880,000	2	RM
		1.0 Kali	880,000	880,000	*	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.065-Manokwari) > Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) (1 Org x 1 Jam x 1 Kali) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)			900,000	2	RM
				900,000		
		1.0 OJ	900,000	900,000	*	SBM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)			3,360,000	2	RM
				3,360,000		
		7.0 OH	480,000	3,360,000	*	SBM
C	<u>Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks</u>			16,412,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Jilid Laporan			100,000	2	RM
		4.0 Eks	25,000	100,000	*	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - ATK dan komputer suplai			750,000	2	RM
		1.0 Kali	750,000	750,000	*	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) > Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)			15,562,000	2	RM
				14,602,000		
		1.0 OK	10,824,000	10,824,000	*	SBM
		3.0 OH	686,000	2,058,000	*	SBM
		4.0 OH	430,000	1,720,000	*	SBM
				960,000		
		2.0 OH	480,000	960,000	*	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
D	Pengelolaan Informasi Publik			23,702,000		
521211	Belanja Bahan			4,800,000	2	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Jilid laporan	8.0 Eks	25,000	200,000	*	
	- Cetak blangko	18.0 Rim	100,000	1,800,000	*	
	- Cetak Spanduk, Banner	4.0 Lbr	250,000	1,000,000	*	
	- Bahan cetakan	18.0 Eks	50,000	900,000	*	
	> Konsumsi rapat/pertemuan			900,000		
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	28,000	280,000	*	SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	62,000	620,000	*	SBM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1,000,000	2	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	1,000,000	1,000,000	*	
522151	Belanja Jasa Profesi			900,000	2	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) (1 Org x 1 Jam x 1 Kali)			900,000		
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	1.0 OJ	900,000	900,000	*	SBM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17,002,000	2	RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000		
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	*	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	*	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	*	SBM
	> Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			2,400,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	5.0 OH	480,000	2,400,000	*	SBM
E	Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi			24,737,000		
521211	Belanja Bahan			6,700,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Cetak blangko	20.0 Rim	100,000	2,000,000		
	- Cetak Spanduk, Banner	5.0 Lbr	400,000	2,000,000		
	- Bahan cetakan	36.0 Eks	50,000	1,800,000		
	> Konsumsi Rapat/Pertemuan			900,000		
	- Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	28,000	280,000		SBM
	- Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	10.0 OK	62,000	620,000		SBM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			555,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	555,000	555,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			17,482,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	SBM
	> Perjalanan dinas lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan			2,880,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)	6.0 OH	480,000	2,880,000	SBM
	<i>F</i> <u>Layanan Kepegawaian</u>			24,602,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			1,000,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Jilid laporan	8.0 Eks	25,000	200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			9,000,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- ATK dan komputer suplai	2.0 Kali	4,500,000	9,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			14,602,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	SBM
	<i>G</i> <u>Layanan Keuangan</u>			16,425,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			300,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- Jilid Laporan	4.0 Eks	25,000	100,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			1,523,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	- ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	1,523,000	1,523,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			14,602,000	RM
	(KPPN.065-Manokwari)				
	> Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi			14,602,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT)	3.0 OH	686,000	2,058,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	4.0 OH	430,000	1,720,000	SBM
	<i>H</i> <u>Layanan Ketatausahaan Rumah Tangga Kearsipan dan Perlengkapan</u>			26,105,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Jilid laporan - Cetak blangko	4.0 Eks 4.0 Rim	25,000 100,000	500,000 100,000 400,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan majalah, koran, tabloid dan lain lain - Layanan Aplikasi Berbayar	1.0 Keg 1.0 Keg	5,000,000 4,000,000	9,000,000 5,000,000 4,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	2,003,000	2,003,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)	1.0 OK 3.0 OH 4.0 OH	10,824,000 686,000 430,000	14,602,000 14,602,000 10,824,000 2,058,000 1,720,000	RM SBM SBM SBM
I	<u>Sinkronisasi Kegiatan</u>			42,505,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Jilid laporan > Konsumsi rapat/pertemuan - Snack Rapat Biasa PAPUA BARAT - Makan Rapat Biasa PAPUA BARAT	4.0 Eks 20.0 OK 20.0 OK	50,000 28,000 62,000	2,000,000 200,000 1,800,000 560,000 1,240,000	RM SBM SBM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - ATK dan komputer suplai	1.0 Kali	270,000	270,000	RM

KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG	(09)	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA	(450871)	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
ALOKASI	Rp. 5,470,107,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) > Perjalanan dinas ke pusat atau provinsi lainnya dalam rangka koordinasi - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MANOKWARI - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) > Perjalanan dinas antar kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan dinas Manokwari-Kabupaten Lainnya - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (PAPUA BARAT) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat) > Perjalanan lokal luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Papua Barat)			40,235,000 29,204,000 21,648,000 4,116,000 3,440,000 10,071,000 5,250,000 2,901,000 1,920,000 960,000 960,000	RM SBM SBM SBM SBM SBM SBM
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,146,583,000	
001	Gaji dan Tunjangan			1,774,824,000	
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			<i>1,774,824,000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	729,658,000 75,805,000 75,805,000	729,658,000 75,805,000 75,805,000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	15,000 2,000 2,000	15,000 2,000 2,000	RM
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	60,050,000 5,005,000 5,005,000	60,050,000 5,005,000 5,005,000	RM
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj.Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	17,973,000 1,498,000 1,498,000	17,973,000 1,498,000 1,498,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			25,200,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	21,600,000	21,600,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,800,000	1,800,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,800,000	1,800,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			91,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	78,480,000	78,480,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			9,030,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	1,390,000	1,390,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,820,000	3,820,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,820,000	3,820,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			57,044,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	48,894,000	48,894,000	
	- Belanja Tunj Beras PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	4,075,000	4,075,000	
	- Belanja Tunj Beras PNS (gaji ke 14)	1.0 THN	4,075,000	4,075,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			200,518,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	200,518,000	200,518,000	
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			116,700,000	RM
	- Belanja Tunjangan Papua	1.0 THN	116,700,000	116,700,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			25,900,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	22,200,000	22,200,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,850,000	1,850,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,850,000	1,850,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari)			157,222,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	128,384,000	128,384,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	25,554,000	25,554,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,284,000	3,284,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	6,000 2,000 1,000	9,000 6,000 2,000 1,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK - Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	10,233,000 1,976,000 330,000	12,539,000 10,233,000 1,976,000 330,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Anak PPPK - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 THN 1.0 BLN	2,120,000 530,000	2,650,000 2,120,000 530,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	12,800,000 2,120,000 540,000	15,460,000 12,800,000 2,120,000 540,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj Beras PPPK - Belanja Tunj Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunj Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	8,665,000 1,889,000 150,000	10,704,000 8,665,000 1,889,000 150,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	35,816,000	35,816,000	RM
511632	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Papua PPPK	1.0 THN	16,200,000	16,200,000	RM
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PPPK - Belanja Tunjangan Umum PPPK (gaji ke 13)	1.0 THN 1.0 BLN	3,600,000 900,000	4,500,000 3,600,000 900,000	RM
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.065-Manokwari) - Uang lembur golongan II - Uang lembur golongan III - Uang lembur golongan IV	46.0 OJ 634.0 OJ 37.0 OJ	24,000 30,000 36,000	21,456,000 1,104,000 19,020,000 1,332,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,371,759,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Operasional perkantoran			1,445,026,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.065-Manokwari)			866,922,000	RM
	- Honorarium Satpam dan Pengemudi Papua Barat	52.0 OB	4,124,000	214,448,000	SBM
	- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Papua Barat	156.0 OB	3,749,000	584,844,000	SBM
	- keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Papua Barat)	1.0 STKR	67,630,000	67,630,000	SBM
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.065-Manokwari)			61,200,000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	1,370,000	16,440,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	1,330,000	15,960,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	530,000	6,360,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	12.0 OB	470,000	5,640,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	24.0 OB	350,000	8,400,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola Belanja Pegawai (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	12.0 OB	300,000	3,600,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta)	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta)	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.065-Manokwari)			228,904,000	RM
	- Pengiriman surat, dokumen dan barang	1.0 Keg	35,000,000	35,000,000	
	- Jamuan tamu	1.0 Keg	54,000,000	54,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Papua Barat)	22.0 STEL	1,376,000	30,272,000	SBM
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Papua Barat)	13.0 STEL	924,000	12,012,000	SBM
	- Pakaian Kerja Satpam (Papua Barat)	3.0 STEL	2,540,000	7,620,000	SBM
	- Surveillance ISO 9001:2015	1.0 Kali	35,000,000	35,000,000	
	- Surveillance/Akreditasi Laboratorium ISO 17025:2012	1.0 Kali	20,000,000	20,000,000	
	- Surveillance LSPro ISO 17065:2012	1.0 Kali	35,000,000	35,000,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.065-Manokwari)			192,000,000	RM
	- Langganan listrik	12.0 bulan	16,000,000	192,000,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.065-Manokwari)			84,000,000	RM
	- Langganan Telepon dan Internet	12.0 bulan	7,000,000	84,000,000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.065-Manokwari)			12,000,000	RM
	- Langganan air bersih PDAM	12.0 bulan	1,000,000	12,000,000	
B	Pemeliharaan perkantoran			867,092,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 REVISI 6

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(450871)
Rp. 5,470,107,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Papua Barat) (Kantor BPSIP Papua Barat) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Kebun Percobaan Anday) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Kebun Percobaan Manokwari) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Kebun Percobaan Sorong) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Papua Barat) (Laboratorium Pascapanen Anday) - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Papua Barat)	500.0 M2	632,000	316,000,000	SBM
		120.0 M2	469,000	56,280,000	SBM
		150.0 M2	469,000	70,350,000	SBM
		100.0 M2	469,000	46,900,000	SBM
		208.0 M2	469,000	97,552,000	SBM
		3000.0 M2	19,000	57,000,000	SBM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Papua Barat) - Biaya Pajak Kendaraan Roda 4 (Papua Barat) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Papua Barat) - Biaya Pajak Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) (Papua Barat) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Papua Barat) - Biaya Pajak Kendaraan Roda 2 (Papua Barat) - Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan AC Split - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Laboratorium, Motor Roda 3, Handtractor, Cultivator, Mesin Pe	2.0 UNIT	37,650,000	75,300,000	SBM
		2.0 UNIT	1,200,000	2,400,000	
		2.0 UNIT	36,390,000	72,780,000	SBM
		2.0 UNIT	2,000,000	4,000,000	
		6.0 UNIT	5,240,000	31,440,000	SBM
		6.0 UNIT	250,000	1,500,000	
		1.0 UNIT	7,190,000	7,190,000	SBM
		8.0 UNIT	690,000	5,520,000	SBM
		8.0 UNIT	610,000	4,880,000	SBM
		1.0 Keg	18,000,000	18,000,000	
C	<u>Pengelolaan Laboratorium</u>			40,641,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Bahan kimia dan suplies laboratorium	1.0 Kali	19,236,000	19,236,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari) - Kalibrasi Alat Laboratorium	1.0 Kali	21,405,000	21,405,000	RM
D	<u>Pengelolaan Kebun Percobaan</u>			19,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari) > Upah harian lepas kebun percobaan - Honorarium Pembantu Lapangan	125.0 OH	80,000	10,000,000	SBM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Saprodi	2.0 Kali	4,500,000	9,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN KONDISI BMN PADA APLIKASI SAKTI

Nomor: B-135/PL.330 /H.12.31/02/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai/Kuasa Pengguna Barang

Dengan ini menyatakan:

Bahwa kami telah melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN pada Modul Asset aplikasi SAKTI Kemenkeu periode Februari 2023 pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Papua Barat dengan data sebagai berikut:

Kode Barang	Nama Barang	Merk	NUP	Tahun Pembelian	Nilai Perolehan	Kondisi BMN Sebelum perubahan pencatatan	Kondisi BMN Setelah perubahan pencatatan
3100102001	P.C Unit	Acer Veriton Z4660G AIO PC i5-8400 4GB 1TB Win 10	19	2019	17.100.000	Rusak Berat	Baik
3100102001	P.C Unit	Acer Veriton Z4660G AIO PC i5-8400 4GB 1TB Win 10	20	2019	17.100.000	Rusak Berat	Baik
3100102001	P.C Unit	Acer Veriton Z4660G AIO PC i5-8400 4GB 1TB Win 10	21	2019	17.100.000	Rusak Berat	Baik
3100102003	Note Book	ASUS	13	2019	8.000.000	Rusak Berat	Baik

Perubahan kondisi BMN dilakukan karena kondisi barang tersebut sudah dalam kondisi baik dan dapat digunakan kembali.

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran Informasi dan Data secara Formil maupun Material atas usulan yang kami ajukan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 12 Februari 2024
Kuasa Pengguna Barang,


Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

Nomor : B- 251 /PL.020/I.12.31/05/2024 17 Mei 2024
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Biasa
Hal : Usulan Penghapusan BMN
Pada Satker BPSIP Papua Barat

Yth.
Kepala KPKNL
di-
Sorong

Bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP Papua Barat) bermaksud mengusulkan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak efisien lagi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Papua Barat karena sudah dalam keadaan rusak

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut Penghapusan BMN dimaksud ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tanggal

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan kelengkapan data dukung sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Barang yang akan dihapus
3. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Penilaian Barang yang akan dihapus
4. Surat Pernyataan Besaran Nilai Limit
5. Laporan Kondisi Barang Rusak Berat pada Aplikasi Sakti
6. Daftar BMN yang dihentikan Penggunaan pada Aplikasi Sakti
7. Foto BMN yang akan dihapus
8. Foto Copy Penetapan Status Pengguna BMN
9. Foto Copy SK Panitia Penghapusan

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN/ PENILAIAN BARANG YANG AKAN DI HAPUS**

Nomor : B-252 /PL.020/I.12.31/05/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Dr. Aser Rouw, S.P, M. Si	Ketua
2	Herman Rois Tata, SP, MP	Sekretaris
3	Nathaniel Wihiyawari, A.Md.Pi	Anggota
4	Fenty Irianty, S.Si	Anggota
5	Arya Bima Senna, S.P.	Anggota

Setelah mengadakan pemeriksaan/penelitian ini dibuat menurut keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Manokwari
Pada tanggal : 17 Mei 2024

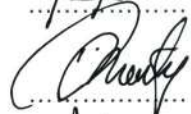
Panitia Penghapusan

1. Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
2. Herman Rois Tata, SP, MP
3. Nathaniel Wihiyawari, A.Md.Pi
4. Fenty Irianty, S.Si
5. Arya Bima Senna, S.P.

Kepala Balai,

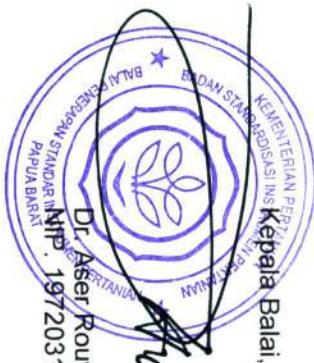
Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002






Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Barang Milik Negara Yang Akan Di Hapus
Kode KPB/Satker : 450871
Nama KPB/Satker : Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Papua Barat

Uraian Barang Milik Negara												Keterangan
NO	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Unit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai IP (Rp)	Nilai Buku	Kondisi	Harga Limit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Peralatan dan Mesin												
1	3010102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA/KUANG INNOVA G M/T	1	13/04/2007	200.000.000	0	0	Rusak Berat	Rp 37.926.000	-



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
M.P. 19720316 199903 1 002

Panitia Penghapusan

1. Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
2. Herman Rois Tata, SP, MP
3. Nathaniel Whyawari, A.Md.PI
4. Fenty Inanty, S.Si
5. Arya Bima Senna, S.P.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
BMN RUSAK BERAT YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANYA**
Nomor : B-253/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara dalam Kondisi rusak berat seperti daftar terlampir dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut dalam SIMAK-BMN di reklasifikasi ke aset lainnya berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315, TELEPON/FAKSIMILE (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
BESAR NILAI LIMIT**

Nomor : B- 254 /PL.020/L.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab secara penuh atas besaran nilai limit yang kami ajukan dalam rangka penjualan, yang bukan merupakan nilai wajar hasil inventarisasi dan penilaian;
2. Perhitungan nilai limit sebagaimana dimaksud pada angka 2, prinsip efisien, efektif dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi Negara (antara lain penurunan nilai barang dimaksud apabila tidak segera dilakukan pemindah tanganan, potensi biaya memadai, dan sebagainya).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

**PENAKSIRAN NILAI LIMIT PENJUALAN BMN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T
BPSIP PAPUA BARAT**

Data Transaksi Penjualan		Data Pembanding I		Data Pembanding II		Objek Penilaian
Foto Objek						
Sumber Informasi		https://www.olx.co.id/olxmobi/item/innova-tipe-e-2007-silver-manual-bensin-iid-920221073		https://www.olx.co.id/olxmobi/item/dijual-toyota-innova-20-g-at-2007-tangan-pertama-mulus-termurah-iid-920139347		
Harga Transaksi		Rp	85.000.000,00	Rp	95.000.000,00	
Penyesuaian I (Transaksional)						
1	Kelengkapan Dokumen	BPKB dan STNK	0,00%	BPKB dan STNK	0,00%	BPKB dan STNK
2	Waktu Transaksi	Mei 2014	0,00%	Mei 2024	0,00%	Mei 2024
3	Jenis Transaksi	Penawaran	0,00%	Penawaran	0,00%	Penaksiran
Penyesuaian II (Non Transaksional)						
1	Merk/Type	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T	-5,00%	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T	-5,00%	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T
2	Tahun Pembuatan	2007	0,00%	2007	0,00%	2007
3	Kondisi Mesin	Baik	-10,00%	Baik	-10,00%	Rusak Berat
4	Kondisi Bodi	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
5	Kondisi Rangka	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
6	Sistem Kelistrikan	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
7	Sistem Kemudi	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
8	Sistem Transmisi	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
9	Rem	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
10	Ban	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
11	Velg	Baik	-2,00%	Baik	-2,00%	Rusak Berat
12	Knalpot	Baik	-5,00%	Baik	-5,00%	Rusak Berat
Jumlah Penyesuaian			-57,00%		-57,00%	
Indikasi Nilai Properti			Rp36.550.000		Rp40.850.000	
Pembobotan		50,00%		50,00%		
Nilai Wajar Setelah Pembobotan		Rp18.275.000,00		Rp20.425.000,00		
Total Nilai Setelah Pembobotan						Rp38.700.000,00
Bea Lelang						Rp774.000,00
Total Nilai Setelah Dikurangi Bea Lelang						Rp37.926.000,00
Pembulatan Nilai Wajar						Rp37.926.000,00



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
KONDISI BMN RUSAK BERAT**
Nomor : B-255/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Barat sudah Rusak Berat tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,


Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT

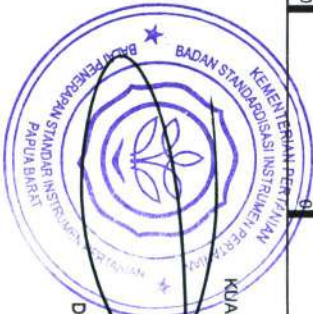
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KANTOR WILAYAH

Tanggal : 17/05/2024 07.49.02
Halaman : 1 dari 1

Nama UAKPB : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
Kode UAKPB : 018.09.3300.450871

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang			N U P	Satuan	Harga Perolehan		Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4			6		7	8	9
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit		200.000.000	0	0	0	1
Jumlah/ Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)						200.000.000	0	0	0	1
1	3.05.02.04.004	A.C. Split	22	Buah		4.912.500	0	0	0	1
2			23	Buah		4.912.500	0	0	0	1
3			26	Buah		5.500.000	0	0	0	1
4			27	Buah		5.500.000	0	0	0	1
5			28	Buah		5.500.000	0	0	0	1
6			29	Buah		5.500.000	0	0	0	1
Jumlah/ A.C. Split						31.825.000	0	0	0	6
1	3.10.01.02.001	P.C Unit	14	Buah		20.000.000	0	0	0	1
2			17	Buah		7.573.104	0	0	0	1
3			18	Buah		13.164.000	0	0	0	1
Jumlah/ P.C Unit						40.737.104	0	0	0	3
1	3.10.01.02.003	Note Book	9	Buah		18.000.000	0	0	0	1
2			11	Buah		12.487.000	0	0	0	1
3			12	Buah		12.487.000	0	0	0	1
Jumlah/ Note Book						42.974.000	0	0	0	3



KUASA PENGUNA BARANG

Dr. Aser Rouw, SP. M. SI
197203161989031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGANGGU TUGAS DAN FUNGSI
Nomor : B-256/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

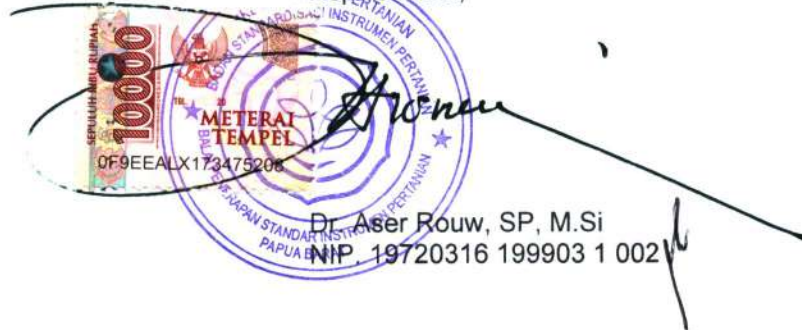
Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Bahwa permohonan penghapusan dan penjualan terhadap Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dilakukan karena kondisi Barang Milik Negara yang tertuang dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Fisik Barang yang akan dihapus dalam kondisi rusak berat tidak dapat dipergunakan lagi dan apabila Barang Milik Negara tersebut dihapus tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si

NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE (0986) 2213347
WEBSITE www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL bsip.pabar@pertanian.go.id

**DASAR PERTIMBANGAN DILAKUKAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

Nomor : B-257/PL.020/I.12.31/05/2024

Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat yang kondisinya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak menunjang tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Papua Barat karena

1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak
2. Barang mempunyai batas waktu kegunaanya
3. Barang telah mengalami perubahan spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain

Apabila BMN dimaksud dipertahankan maka biaya pemeliharaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengadaan baru dan lebih menguntungkan apabila BMN dihapus karena biaya operasional yang lebih besar,

Demikian dasar pertimbangan dilakukan penjualan/penghapusan BMN ini dibuat sebagai bahan data dukung usul persetujuan penjualan BMN pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat



Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

Lampiran Foto Barang Milik Negara Yang Akan Di Hapus

Kode KPB/Satker

: 450871

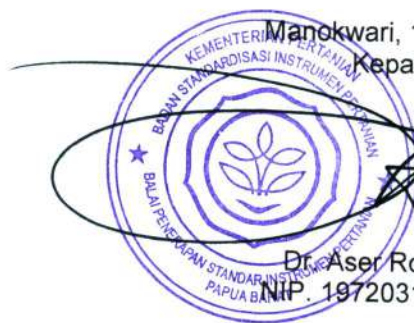
Nama KPB/Satker

: Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

NO	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Jumlah Unit	Foto
1	3010102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA/K IJANG INNOVA G M/T	1	1	  

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si

NIP. 19720316 199903 1 002

UAPB : KEMENTERIAN PERTANIAN
UAPPB-EI : Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
UAPPB-W : BPTP 09KD PAPUA BARAT

Form - UPG.1.2.08
3020102003,1

KARTU IDENTITAS BARANG
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR

BIDANG : Alat Angkutan Bermotor
KELOMPOK : ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
SUB KELOMPOK : KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
SUB-SUB KELOMPOK : Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)

Kode UAKPB : 018093300450871000KD

Nama UAKPB : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

I. UNIT BARANG

1. a. Merek : TOYOTA
- b. Tipe : KIJANG INNOVA G M/T
- c. Tahun Pembuatan : 2007
2. a. Pabrik : -
- b. Negara : -
- c. Perakitan : 2007
3. Daya Muat : -
4. Bobot : -
5. Daya Mesin / Isi Silinder : -
6. Mesin Penggerak : -
7. Jumlah Mesin : 0
8. Bahan Bakar : -
9. No. Mesin : -
10. No. Rangka : -
11. No. BPKB : -
12. No. Polisi : PB 5017 G

II. PERLENGKAPAN

1. -
2. -
3. -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 135 (Perolehan Migrasi SIMAK)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 13/04/2007
4. Kondisi Perolehan : Rusak Berat
5. Biaya Perolehan : Rp. 200,000,000
6. Dasar Harga : Perolehan
7. Sumber Dana : -
- No. : -
- Tgl. : -

IV. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status BMN : -
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1

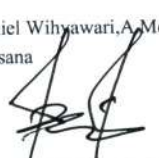


FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

Disetujui Tgl. :
Nama Pejabat : Dr. Ager Rouw, SP, M. Si
Jabatan Struktural : Kepala Balai
Tanda tangan dan Stempel : 

Diisi Tgl. :
Nama : Nataniel Wihyawari, A.Md.Pi
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel : 

*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsisip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

Nomor : B-259PL.020/I.12.31/05/2024 17 Mei 2024
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Biasa
Hal : Usulan Penghapusan BMN
Pada Satker BPSIP Papua Barat

Yth.
Kepala BBPSIP
di-
Bogor

Bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP Papua Barat) bermaksud mengusulkan **Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)** yang sudah tidak efisien lagi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Papua Barat karena sudah dalam keadaan rusak

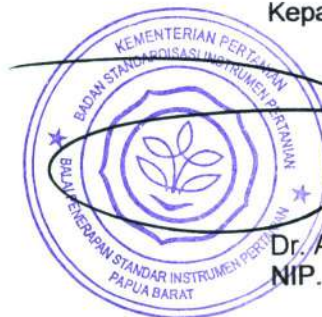
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut Penghapusan **BMN** dimaksud ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tanggal

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan kelengkapan data dukung sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Panitia Penghapusan **Barang Milik Negara**
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian **Barang** yang akan dihapus
3. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan **Penilaian** Barang yang akan dihapus
4. Surat Pernyataan Besaran Nilai Limit
5. Laporan Kondisi Barang Rusak Berat pada Aplikasi SAKTI
6. Daftar BMN yang dihentikan Penggunaan pada Aplikasi SAKTI
7. Foto BMN yang akan dihapus
8. Foto Copy Penetapan Status Pengguna **BMN**
9. Foto Copy SK Panitia Penghapusan

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN/ PENILAIAN BARANG YANG AKAN DI HAPUS
Nomor : B-260 /PL.020/I.12.31/05/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Dr. Aser Rouw, S.P, M. Si	Ketua
2	Herman Rois Tata, SP, MP	Sekretaris
3	Nathaniel Wihyawari, A.Md.Pi	Anggota
4	Fenty Irianty, S.Si	Anggota
5	Arya Bima Senna, S.P.	Anggota

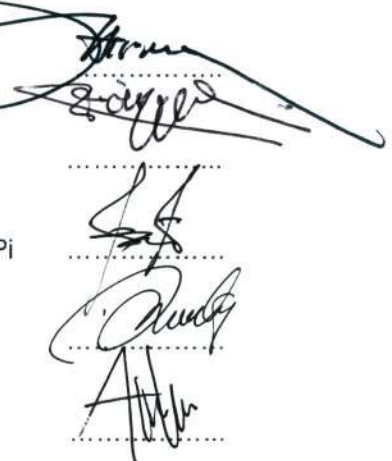
Setelah mengadakan pemeriksaan/penelitian ini dibuat menurut keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Manokwari
Pada tanggal : 17 Mei 2024

Panitia Penghapusan

1. Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
2. Herman Rois Tata, SP, MP
3. Nathaniel Wihyawari, A.Md.Pi
4. Fenty Irianty, S.Si
5. Arya Bima Senna, S.P.


Kepala Balai,
Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

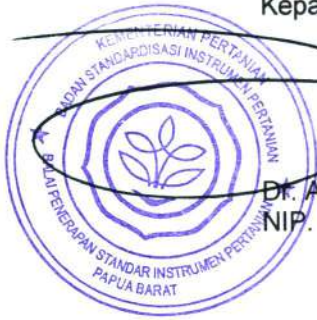


Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Barang Milik Negara Yang Akan Di Hapus

Kode KPB/Satker : 450871

Nama KPB/Satker : Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Papua Barat

NO	Uraian Barang Milik Negara											Keterangan
	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Unit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai IP (Rp)	Nilai Buku	Kondisi	Harga Limit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Peralatan dan Mesin											
1	3050204004	22	A.C. Split	LG	1	04/08/2011	4.912.500	0	0	Rusak Berat	0	
2	3050204004	23	A.C. Split	LG	1	20/06/2011	4.912.500	0	0	Rusak Berat	0	
3	3050204004	26	A.C. Split	LG	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
4	3050204004	27	A.C. Split	LG	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
5	3050204004	28	A.C. Split	Panasonic	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
6	3050204004	29	A.C. Split	Panasonic	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
7	310012001	14	Pc. Unit	APPLE I MAC MF 086	1	10/05/2015	20.000.000	0	0	Rusak Berat	0	
8	310012001	17	Pc. Unit	Acer Veriton X480	1	14/12/2009	7.573.104	0	0	Rusak Berat	0	
9	310012001	18	Pc. Unit	ASUS PC MD32CD-K-ID004DD Intel Core I5-7400	1	25/20/2017	13.164.000	0	0	Rusak Berat	0	
10	3100102003	9	Note Book	Toshiba Portege	1	14/02/2013	18.000.000	0	0	Rusak Berat	0	
11	3100102003	11	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)	1	25/04/2016	12.487.000	0	0	Rusak Berat	0	
12	3100102003	12	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)	1	25/04/2016	12.487.000	0	0	Rusak Berat	0	



Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

Panitia Penghapusan

1. Dr. Aser Rouw, SP, M.Si

2. Herman Rois Tata, SP, MP

3. Nathaniel Wihiyawari, A.Md.Pi

4. Fenty Irianty, S.Si

5. Arya Bima Senna, S.P.

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list members]



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
BMN RUSAK BERAT YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANYA**
Nomor : B-261 /PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara dalam Kondisi rusak berat seperti daftar terlampir dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut dalam SIMAK-BMN di reklasifikasi ke aset lainnya berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai, ,


Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
BESAR NILAI LIMIT**

Nomor : B-262/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab secara penuh atas besaran nilai limit yang kami ajukan dalam rangka penjualan, yang bukan merupakan nilai wajar hasil inventarisasi dan penilaian;
2. Perhitungan nilai limit sebagaimana dimaksud pada angka 2, prinsip efisien, efektif dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi Negara (antara lain penurunan nilai barang dimaksud apabila tidak segera dilakukan pemindah tanganan, potensi biaya memadai, dan sebagainya).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
KONDISI BMN RUSAK BERAT**
Nomor : B-263/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

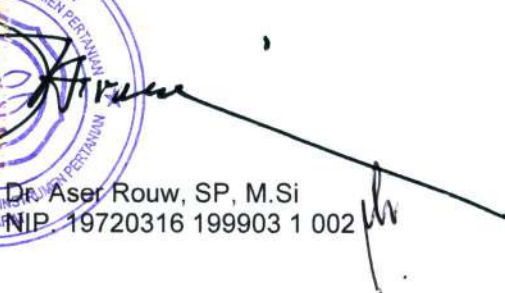
Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Barat sudah Rusak Berat tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,




Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KANTOR WILAYAH

Tanggal : 17/05/2024 07.49.02

Halaman : 1 dari 1

Nama UAKPB : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

Kode UAKPB : 018.09.3300.450871

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang				N U P	Satuan	Harga Perolehan			Kondisi		
	Kode Barang		Nama Barang							Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2		3		4		6			7	8	9
1	3.02.01.02.003		Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		1	Unit	200.000.000			0	0	1
Jumlah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)							200.000.000			0	0	1
1	3.05.02.04.004		A.C. Split		22	Buah	4.912.500			0	0	1
2					23	Buah	4.912.500			0	0	1
3					26	Buah	5.500.000			0	0	1
4					27	Buah	5.500.000			0	0	1
5					28	Buah	5.500.000			0	0	1
6					29	Buah	5.500.000			0	0	1
Jumlah A.C. Split							31.825.000			0	0	6
1	3.10.01.02.001		P.C Unit		14	Buah	20.000.000			0	0	1
2					17	Buah	7.573.104			0	0	1
3					18	Buah	13.164.000			0	0	1
Jumlah P.C Unit							40.737.104			0	0	3
1	3.10.01.02.003		Note Book		9	Buah	18.000.000			0	0	1
2					11	Buah	12.487.000			0	0	1
3					12	Buah	12.487.000			0	0	1
Jumlah Note Book							42.974.000			0	0	3



KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Aser Rouw, SP, M. Si

197203161999031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGANGGU TUGAS DAN FUNGSI**
Nomor : B-264/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Bahwa permohonan penghapusan dan penjualan terhadap Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dilakukan karena kondisi Barang Milik Negara yang tertuang dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Fisik Barang yang akan dihapus dalam kondisi rusak berat tidak dapat dipergunakan lagi dan apabila Barang Milik Negara tersebut dihapus tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar bsip pertanian go id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**DASAR PERTIMBANGAN DILAKUKAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

Nomor : B-265/PL.020/I.12.31/05/2024

Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat yang kondisinya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak menunjang tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Papua Barat karena

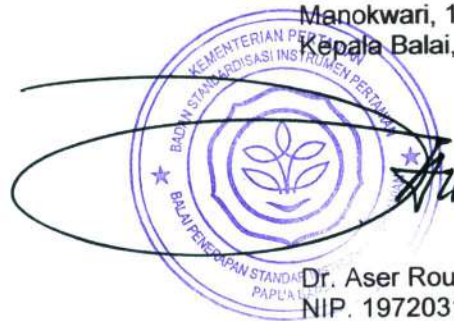
1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak
2. Barang mempunyai batas waktu kegunaanya
3. Barang telah mengalami perubahan spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain

Apabila BMN dimaksud dipertahankan maka biaya pemeliharaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengadaan baru dan lebih menguntungkan apabila BMN dihapus karena biaya operasional yang lebih besar,

Demikian dasar pertimbangan dilakukan penjualan/penghapusan BMN ini dibuat sebagai bahan data dukung usul persetujuan penjualan BMN pada Balai Penerapan Standar Instrument Pertanian Papua Barat

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-266/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si.
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Menugaskan kepada :

Nama : Arya Bima Senna, S.P.
NIP : 19931010 201902 1 001
Jabatan : Petugas Simak BMN

Untuk melakukan perubahan kondisi pada SIMAK-BPSIP Papua Barat sebagai petugas operator SIMAK-BMN sesuai lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Milik Negara .
Demikian surat tugas ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

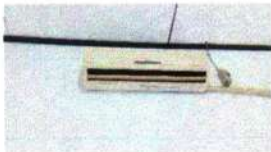
Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

Lampiran Foto Barang Milik Negara Yang Akan Di Hapus

Kode KPB/Satker : 450871

Nama KPB/Satker : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

NO	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Jumlah Unit	Foto
1	3050204004	A.C. Split	LG	22	1	
2	3050204004	A.C. Split	LG	23	1	
3	3050204004	A.C. Split	LG	26	1	
4	3050204004	A.C. Split	LG	27	1	
5	3050204004	A.C. Split	Panasonic	28	1	
6	3050204004	A.C. Split	Panasonic	29	1	

7	310012001	P. C. Unit	APPLE I MAC MF 086	14	1	
8	310012001	P. C. Unit	Acer Veriton X480	17	1	
8	310012001	P. C. Unit	ASUS PC MD32CD- K-ID004DD INTEL CORE I57400	18	1	
9	3100102003	Notebook	Toshiba Portage	9	1	
10	3100102003	Notebook	Asus Notebook Pro P2420I (core i7- 5500u)	11	1	
11	3100102003	Notebook	Asus Notebook Pro P2420I (core i7- 5500u)	12	1	

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

Nomor : B-424/PL.320/H.12.31/08/2024
Lampiran : Lima Berkas
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN

Agustus 2024

Yth.
Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
di-
Bogor

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan bahwa satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Papua Barat nomor B-251/PL.320/H.12.31/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 bermaksud mengusulkan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang telah terjual secara lelang melalui KPKNL Sorong pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana dalam daftar terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu dapat memproses lebih lanjut usulan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan kelengkapan data dukung sebagai berikut:

1. Daftar BMN yang dihapus;
2. SK Pembentukan Panitia Penghapusan;
3. Kuitansi dan Bukti Setor;
4. Fotocopi Surat Persetujuan Penghapusan BMN dari KPKNL Sorong;
5. Fotocopi Salinan Risalah lelang.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



Lampiran 1. Barang Milik Negara Yang Akan Di Hapus

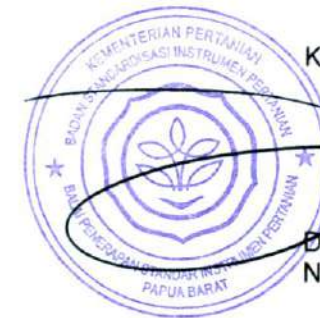
Nomor : B-424/PL.320/H.12.31/08/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

Kode KPB/Satker : 450871

Nama KPB/Satker : Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Papua Barat

NO	Uraian Barang Milik Negara										
	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Unit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	No Polisi	Harga Limit	Uang Jaminan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3010102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA/KIJANG INNOVA G M/T	1	13/04/2007	200.000.000	PB 7164 G	37.926.000	18.963.000	Rusak Berat



Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
NIP.19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

NOMOR : 011/KPTS/PL.320/H.12.31/01/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dalam keadaan rusak berat dan untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara perlu dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- c. bahwa pegawai dan/atau pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang pembentukan panitia penghapusan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

- 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan lingkup Kementerian Pertanian;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 299/KM.06/2016 tetang Pelimpahan Sebagai Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT.

Kesatu : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

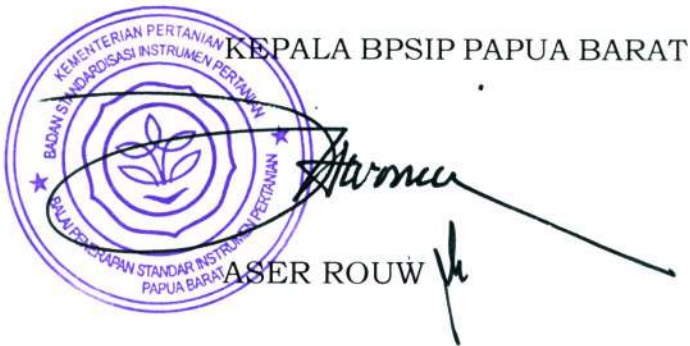
No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Aser Rouw, SP, M. Si NIP. 19720316 199903 1 002	Kepala Balai	Ketua Tim
2.	Herman Rois Tata, SP, MP NIP. 19760827 200812 1 002	Kepala Subbagian. TU	Sekretaris

3.	Fenty Irianty, S. Si NIP. 19840228 200912 2 003	PPK	Anggota
4.	Arya Bima Senna, SP NIP. 19931010 201902 1 001	Petugas Pengelola BMN	Anggota
5.	Novita Indrawati, S. Sos NIP. 19941114 202203 2 001	Petugas Barang Persediaan	Anggota
6.	Nataniel Wihiyawari, A. Md, Pi NIP. 19751103 200604 1 008	Petugas Pengelola Rumah Tangga	Anggota

- Kedua : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi Barang Milik Negara yang sesuai ketentuan harus dihapuskan.
 2. Membuat usulan penghapusan Barang Milik Negara.
 3. Mengikuti Proses Lelang Barang Milik Negara.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penghapusan Barang Milik Negara bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal 12 Januari 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
Gedung Keuangan Negara (GKN) Sorong Jalan Basuki Rahmat Km. 7 Sorong 98416
Telepon : 0951-327506 Faksimili : 0951-327509, Situs www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

Nomor: KL- 320/KNL.1703/2024

Risalah Lelang Nomor : 193/17.03/2024-01

Sudah Terima Dari : Eddy sugianto, Alamat JL ASEM GEDE NO 18 RT 006/002
COKRODININGRATAN JETIS YOGYAKARTA, KOTA
YOGYAKARTA, DI YOGYA, Karyawan Swasta, NIK:
3471022812670002.

Banyaknya Uang : Rp. 40.618.440,00
(Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Empat
Ratus Empat Puluh Rupiah)

Keterangan : Pelunasan kewajiban pembayaran Toyota Innova (TGN40R)
di Kabupaten Manokwari.

RINCIAN	:	
Pokok	: Rp.	39.822.000,00
Bea Lelang (Pembeli)	: Rp.	796.440,00
Uang Miskin	: Rp.	00,00
Bea Balik Nama	: Rp.	00,00 +
Jumlah	: Rp.	40.618.440,00

Sorong, 27 Juni 2024

Mengetahui,
Pejabat yang Bertugas Melakukan
Pemungutan Penerimaan Negara,



Ditandatangani secara elektronik
Bahrahmat Simamora
NIP 197704291998031002

Bendahara Penerimaan,



Asadetaroy Falatuhjati
NIP 199902282021011003



KONFIRMASI PENERIMAAN

Nomor NTPN : 490D96U8EUKBH2EO Kode Akun : 425122 Data Setoran : 1. Setoran Awal Tanggal : 27-06-2024 s.d. 28-06-2024

No.	NTPN BillingCode NTPNRS	NTB	Tanggal Penerimaan	Tanggal Buku	Nama	Bagan Akun SPAN	Mata uang	Nilai	Nilai Ekuivalen
1	490D96U8EUKBH2EO 820240628517336 (null)	280852902010	28-JUN-24	28-JUN-24	Bendahara Penerimaan KPKNL Sorong	450871.065.425122.0000000.0000000.D000000001.00000.0.0000.2.000000.000000	IDR	39,822,000.00	0



Nomor : S-28/MK.6/KNL.1703/2024 21 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
u.p.

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
Jalan Trikora Anday
Kabupaten Manokwari

Sehubungan dengan surat Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat nomor B-251/PL.020/I.12.31/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 hal Usulan Penghapusan BMN Pada Pada Satker BPSIP Papua Barat, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan persetujuan Penjualan BMN pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat berupa satu unit Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah) dengan nilai perolehan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan BMN, pelaksanaan Penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan BMN tidak mengganggu tugas operasional kantor dan persetujuan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan BMN yang baru sebagai pengganti BMN yang dijual;
2. Penjualan secara lelang atas BMN agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan Penjualan Pengelola Barang, dengan nilai limit keseluruhan sebesar Rp37.926.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui MAP: 425122;

3. Berdasarkan...



-2-

3. Berdasarkan Risalah Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
4. Menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang c.q. KPKNL Sorong paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMN disertai dengan Risalah Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima;
5. Dalam rangka tertib administrasi penatausahaan BMN, surat persetujuan Penjualan BMN ini agar segera dilakukan perekaman ke dalam aplikasi SIMAN pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
6. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai BMN yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang;
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas surat persetujuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Sorong



Ditandatangani secara elektronik
Antonius Arie Wibowo

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

Gedung Keuangan Negara Sorong, Jalan Basuki Rahmat KM.7, Sorong 98419
Telepon (0951) 324868, Faksimile (0951)327509
Website www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong





LAMPIRAN
SURAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : S-28/MK.6/KNL.1703/2024
TANGGAL : 21 Mei 2024
TENTANG : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa
Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Balai
Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN PENJUALAN
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

Kode Satker : 018.09.3300.450871.000.KD

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Keterangan
1	3020102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota TGN40R (Kijang Innova)	2007	Rp200.000.000,00	Rp37.926.000,00	BMN sudah dalam kondisi Rusak Berat
Total						Rp200.000.000,00	Rp37.926.000,00	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong



Ditandatangani secara elektronik
Antonius Arie Wibowo





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG
GEDUNG KEUANGAN NEGARA II SORONG, JALAN BASUKI RAHMAT KM. 7, KOTA SORONG 98419
TELEPON (0951) 324868; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-341/KNL.1703/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

12 Juni 2024

Yth. Kepala BPSIP Papua Barat
Jalan Trikora Anday Manokwari
Papua Barat

Menunjuk Surat Nomor : B-251/PL.020/I.12.31/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 Perihal Usulan Penghapusan BMN pada Satker BPSIP Papua Barat, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*Open bidding*) pada:

Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi/website lelang
Batas Akhir Waktu Penawaran	: Kamis, 27 Juni 2024 14.00 WIT (12.00 WIB / Waktu Server)
Alamat Domain	: www.lelang.go.id / portal.lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor BPSIP Papua Barat Jl.Trikora Anday Kabupaten Manokwari

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Pengumuman Lelang melalui Selebaran tanggal 20 Juni 2024 dan mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL Sorong paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang serta mengunggah pengumuman lelang pada alamat lelang.go.id/portal.lelang.go.id menggunakan akun pemohon yang telah terdaftar pada alamat tersebut;
2. Mencantumkan nilai limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari nilai limit;
3. Mencantumkan nomor telepon / *contact person* dari pihak pemohon lelang yang dapat dihubungi oleh calon peserta lelang pada Pengumuman Lelang;
4. Apabila pelaksanaan lelang tersebut dibatalkan oleh pemohon, maka pembatalan lelang dimaksud diberitahukan secara tertulis ke KPKNL Sorong;
5. Meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang, pemohon tidak mengunggah pengumuman lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

Dengan Moto Layanan "TRAKOSONG" (Tertib, Andalan, Kontributif, Solutif, Ngegas Terus) KPKNL Sorong senantiasa menjaga integritas dan profesional dalam melaksanakan pelayanan yang berkualitas.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Sorong



Ditandatangani secara elektronik
Djoko Setianto

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Pelelang Ahli Pertama Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong





SALINAN/~~GROSSE~~
RISALAH LELANG

NOMOR : 193/17.03/2024-01
TANGGAL : 27 Juni 2024
PEJABAT LELANG : Rushan Nasyrul Haq, S.E.
PENJUAL : Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Papua Barat

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SORONG

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Rushan Nasyrul Haq, S.E.
NIP 19820204 200312 1 004

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 193/17.03/2024-01

-----Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (27-06-2024), dimulai pukul dua belas (12:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----
----- Rushan Nasyrul Haq, Sarjana Ekonomi, NIP 19820204 200312 1 004 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KM.6/2016 tanggal 31 Agustus 2016, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-234/KNL.1703/2024 tanggal 19 Juni 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor BPSIP Papua Barat, Jalan Trikora Anday Manokwari - Papua Barat. -----
-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Doktor Aser Rouw, Sarjana Pertanian.,Magister Sains NIP 19720316 199903 1 002 Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat, berkedudukan di Kabupaten Manokwari, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B-276.1/PL.020/I.12.31/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-341/KNL.1703/2024 tanggal 12 Juni 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-28/MK.6/KNL.1703/2024 tanggal 21 Mei 2024. -----
-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Arya Bima Senna, Sarjana Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor B-276/PL.020/I.12.31/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Sorong. -----
-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) unit Minibus (penumpang 14 orang kebawah), Merk/Tipe Toyota / Kijang Innova G M/T, Tahun Perolehan 2007, Nomor Polisi PB 7164 G -----
Nilai Limit : Rp37.926.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kab. Manokwari. -----
dilelang apa adanya. -----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 20 Juni 2024. -----
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----
1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai

berikut:.../Lembar Kedua

Ttd.

Rushan Nasyrul Haq, S.E.
NIP 19820204 200312 1 004

- berikut: -----
- a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
- a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
- 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 - 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
- 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 - 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
 - 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
- 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 - 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
 - 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan

Ttd.

Rushan Nasyrul Haq, S.E.

NIP 19820204 200312 1 004

Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

----Dalam hal.../Lembar Keempat

Ttd.

Rushan Nasyrul Haq, S.E.
NIP 19820204 200312 1 004

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap.../Lembar Kelima

Ttd.

Rushan Nasyrul Haq, S.E.
NIP 19820204 200312 1 004

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Sorong. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

----- Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai.

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah dua penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual:

1 (satu) unit Minibus (penumpang 14 orang kebawah), Merk/Tipe Toyota / Kijang Innova G M/T, Tahun Perolehan 2007, Nomor Polisi PB 7164 G -----

Harga Lelang : Rp39,822,000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Pembeli ----- : Eddy Sugianto, NIK 3471022812670002, Karyawan
----- Swasta, beralamat di Jl. Asemgede No. 18 RT/RW 006/002
----- Kel/Desa Cokrodingratan Kecamatan Jetis Kota
----- Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 193/17.03/2024-01 tanggal 27 Juni 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp39.822.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 18 (delapan belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Arya Bima Senna, S.P
NIP 19931010 201902 1 001

Rushan Nasyrul Haq, S.E.
NIP 19820204 200312 1 004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 28 JUN 2024

Kepala KPKNL Sorong



Evan Widyatama

NIP 19851207 200710 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG

JL. BASUKI RAHMAT KM. 7 GEDUNG KEUANGAN NEGARA SORONG - 98414 TELEPON (0951) 324868 SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

Hasil Pelaksanaan Lelang

Informasi Lot Lelang

Kode Lot Lelang	:	CKEFHX
Nama Lot Lelang	:	Toyota Innova (TGN40R) di Kabupaten Manokwari
Status	:	LAKU

Detail Pemenang

Nama	:	Eddy sugianto
Keikutsertaan	:	Untuk Diri Sendiri
NIK	:	3471022812670002
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Alamat	:	JL ASEM GEDE NO 18 RT 006/002 COKRODININGRATAN JETIS YOGYAKARTA, KOTA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA
No. Handphone	:	087888816805
NPWP	:	089644991541000
Virtual Account	:	8806712251940768

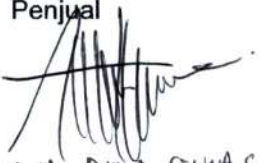
Rincian Pelunasan

Nilai Penawaran	:	Rp. 39.822.000
Uang Jaminan Lelang	:	(Rp. 18.963.000)
Sisa Pokok	:	Rp. 20.859.000
Bea Lelang Pembeli	:	Rp. 796.440
Total yang Harus Dilunasi	:	Rp. 21.655.440
Batas Akhir Pelunasan	:	2024-07-04

Rekapitulasi Penawaran

No	Kode	Nama Peserta	Nilai	Waktu
1	7REWTERKIP	Eddy sugianto Keikutsertaan: Untuk Diri Sendiri	Rp. 39.822.000	27 Juni 2024 jam 11:59:57 WIB
2	ZF0YS7XX2O	Muhamad Busro Keikutsertaan: Untuk Diri Sendiri	Rp. 37.926.000	26 Juni 2024 jam 08:06:16 WIB

Mengetahui dan menyetujui,
Penjual



ARDI BINA S. P.
NIP. 19931010201021001

Pejabat Lelang



RUSHAN NASYRUL HAQ
NIP 198202042003121004



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
YANG TELAH DIJUAL SECARA LELANG**
Nomor :B-318 /PL.320/H.12.31/07/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Jalan Trikora Anday Kawasan Kementerian Pertanian Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Berdasarkan Surat Perintah Penetapan Jadwal Lelang Kepala KPKNL Sorong Nomor S-28/MK.6/KNL.1703/2024.

Menindaklanjuti hal tersebut kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Arya Bima Senna, SP
NIP : 19931010 201902 1 001
Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
selaku Pejabat Penjual berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual Nomor:B-275/KPTS/H.12.31/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : P. Matheos Rudolf Loelan
NIK : 9202122810680001
Alamat : Kampung Kuswor RT/RW 008/001 Kelurahan Dobut
Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten
Manokwari

Selaku Pemenang Lelang/ Pembeli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah mengetahui barang yang dilelangkan dengan kondisi apa adanya sesuai dengan daftar terlampir.
2. Sepakat untuk menyerahkan barang tersebut sesuai lampiran Berita Acara Serah Terima Barang kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** Sepakat untuk menerima barang tersebut sesuai lampiran Berita Acara Serah Terima Barang dari **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


P. MATHEOS RUDOLF LOELAN

Manokwari, 3 Juli 2024

PIHAK PERTAMA


ARYA BIMA SENNA

SURAT KUASA AMBIL UNIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eddy Sugianto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Asem Gede no 18 006/002 Cokrodiningratan Jetis Yogyakarta
No. KTP : 3471022812670002
No. Hp : 08122719808

Dengan ini memberi kuasa kepada :

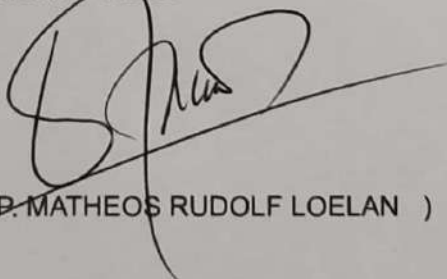
Nama : P. Matheos Rudolf Loelan
Alamat : Kampung Kuswor 06/01 Dobut Manokwari Selatan Manokwari Papua Barat
Nomor KTP : 9202122810680001

Untuk mengambil kendaraan roda empat beserta dokumen kelengkapan kendaraan lainnya karena ditunjuk sebagai pemenang lelang pada lelang KPKNL Sorong lelang pada tanggal 27 Juni 2024. Adapun identitas kendaraan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan : Toyota Innova
Nomor Polisi. : PB 7164 G
Tahun. : 2007
Warna. : SILVER METALIK
Nomor Rangka. : MHFXW42G072085133
Nomor Mesin : ITR-6356547
Lokasi : Jl. Trikora Anday, kompleks kawasan terpadu kementrian pertanian
Manokwari

Demikian surat kuasa ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa



(P. MATHEOS RUDOLF LOELAN)

Yogyakarta , 27 Juni 2024

Pemberi Kuasa



(EDDY SUGIANTO)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

Nomor : B-779/PL.320/H/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN
berupa Alsin pada satker Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Papua Barat (BPSIP Papua Barat)
018.09.3300.450871.000KD

22 Juli 2024

Yth.
Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, bersama ini kami sampaikan bahwa satker BPSIP Papua Barat melalui surat Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) nomor B-1552/PL.320/H.12/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 bermaksud mengusulkan Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Alsin yang kondisinya sudah tidak efektif lagi untuk mendukung operasional kedinasan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara dapat memproses lebih lanjut usulan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan kelengkapan data dukung sebagai berikut:

1. Daftar BMN yang diusulkan persetujuan penjualannya;
2. Laporan Kondisi Barang (LKB);
3. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak;
4. Surat Pernyataan Kebenaran Formil dan Materil;
5. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengganggu Tugas dan Fungsi;
6. Surat Pernyataan Besaran Nilai Limit;
7. Surat Pernyataan Bahwa Kondisi BMN Sudah Rusak Berat;
8. Surat Pernyataan Keberadaan Fisik Barang;
9. Dasar pertimbangan/alasan dilakukan penghapusan BMN;
10. Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian BMN yang akan dihapus;
11. SK Tim Panitia Penghapusan BMN;
12. Fotokopi SK Penetapan Status Penggunaan BMN;
13. Foto BMN yang diusulkan untuk dihapuskan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan,



Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si
NIP 196903141994031001

Tembusan
1. Kepala BBPSIP
2. Kepala BPSIP Papua Barat

Lampiran Kepala Badan

Nomor : B-770/PL.320/H/07/2024

Tanggal : 22 Juli 2024

BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Nilai Limit (Rp.)	Kondisi	Ket.
1	3050204004	22	A.C. Split	LG	1	08/04/2011	4.912.500	-		Rusak Berat	
2	3050204004	23	A.C. Split	LG	1	20/06/2011	4.912.500	-		Rusak Berat	
3	3050204004	26	A.C. Split	LG	1	06/04/2015	5.500.000	-		Rusak Berat	
4	3050204004	27	A.C. Split	LG	1	06/04/2015	5.500.000	-		Rusak Berat	
5	3050204004	28	A.C. Split	Panasonic	1	06/04/2015	5.500.000	-		Rusak Berat	
6	3050204004	29	A.C. Split	Panasonic	1	06/04/2015	5.500.000	-		Rusak Berat	
7	310012001	14	Pc. Unit	APPLE I MAC MF 086	1	05/10/2015	20.000.000	-		Rusak Berat	
8	310012001	17	Pc. Unit	Acer Veriton X480	1	14/12/2009	7.573.104	-		Rusak Berat	
9	310012001	18	Pc. Unit	ASUS PC MD32CD-K-ID004DD Intel Core I5-7400	1	25/20/2017	13.164.000	-		Rusak Berat	
10	3100102003	9	Note Book	Toshiba Portege	1	14/02/2013	18.000.000	-		Rusak Berat	
11	3100102003	11	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)	1	25/04/2016	12.487.000	-		Rusak Berat	
12	3100102003	12	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)		25/04/2016	12.487.000				
				JUMLAH			115.536.104	-	-		

Kepala Badan,



Prof. Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT**

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KANTOR WILAYAH

Nama UAKPB : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
Kode UAKPB : 018.09.3300.450871

Tanggal : 17/05/2024 07.49.02

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang			N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3		4		6	7	8	9
1	3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		1	Unit	200.000.000	0	0	1
Jumlah		Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				200.000.000	0	0	1
1	3.05.02.04.004	A.C. Split		22	Buah	4.912.500	0	0	1
2				23	Buah	4.912.500	0	0	1
3				26	Buah	5.500.000	0	0	1
4				27	Buah	5.500.000	0	0	1
5				28	Buah	5.500.000	0	0	1
6				29	Buah	5.500.000	0	0	1
Jumlah		A.C. Split				31.825.000	0	0	6
1	3.10.01.02.001	P.C Unit		14	Buah	20.000.000	0	0	1
2				17	Buah	7.573.104	0	0	1
3				18	Buah	13.164.000	0	0	1
Jumlah		P.C Unit				40.737.104	0	0	3
1	3.10.01.02.003	Note Book		9	Buah	18.000.000	0	0	1
2				11	Buah	12.487.000	0	0	1
3				12	Buah	12.487.000	0	0	1
Jumlah		Note Book				42.974.000	0	0	3



KUASA PENGGUNA BARANG

Dr. Aser Rouw, SP, M. Si
197203161999031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Nomor : B-261.1/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Menyatakan bertanggung jawab penuh/mutlak tidak bersyarat baik formil maupun materil atas Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin untuk dihapuskan. Peralatan dan Mesin yang dimaksud yaitu

NO	Uraian Barang Milik Negara						
	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Unit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3050204004	22	A.C. Split	LG	1	04/08/2011	4.912.500
2	3050204004	23	A.C. Split	LG	1	20/06/2011	4.912.500
3	3050204004	26	A.C. Split	LG	1	04/06/2015	5.500.000
4	3050204004	27	A.C. Split	LG	1	04/06/2015	5.500.000
5	3050204004	28	A.C. Split	Panasonic	1	04/06/2015	5.500.000
6	3050204004	29	A.C. Split	Panasonic	1	04/06/2015	5.500.000
7	310012001	14	Pc. Unit	APPLE I MAC MF 086	1	10/05/2015	20.000.000
8	310012001	17	Pc. Unit	Acer Veriton X480	1	14/12/2009	7.573.104
9	310012001	18	Pc. Unit	ASUS PC MD32CD-K-ID004DD Intel Core I5-7400	1	25/20/2017	13.164.000
10	3100102003	9	Note Book	Toshiba Portege	1	14/02/2013	18.000.000
11	3100102003	11	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)	1	25/04/2016	12.487.000
12	3100102003	12	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)	1	25/04/2016	12.487.000

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
BMN RUSAK BERAT YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANYA
Nomor : B-261 /PL.020/I.12.31/05/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara dalam Kondisi rusak berat seperti daftar terlampir dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut dalam SIMAK-BMN di reklasifikasi ke aset lainnya berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai, ,


Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

JALAN TRIKORA ANDAY KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315 TELEPON/FAKSIMILE (0986) 2213347
WEBSITE: www.pabar.bsp.pertanian.go.id, E MAIL: bsp.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN FORMIL DAN MATERIL**
Nomor : B-266.1/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Alamat : Jalan Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian
Manokwari, Papua Barat

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materil maupun formil dan menyatakan bahwa BMN yang diusulkan penghapusannya berupa Peralatan dan Mesin (daftar terlampir) telah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGANGGU TUGAS DAN FUNGSI**
Nomor : B-264/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Bahwa permohonan penghapusan dan penjualan terhadap Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dilakukan karena kondisi Barang Milik Negara yang tertuang dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Fisik Barang yang akan dihapus dalam kondisi rusak berat tidak dapat dipergunakan lagi dan apabila Barang Milik Negara tersebut dihapus tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
BESAR NILAI LIMIT**
Nomor : B-262/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab secara penuh atas besaran nilai limit yang kami ajukan dalam rangka penjualan, yang bukan merupakan nilai wajar hasil inventarisasi dan penilaian;
2. Perhitungan nilai limit sebagaimana dimaksud pada angka 2, prinsip efisien, efektif dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi Negara (antara lain penurunan nilai barang dimaksud apabila tidak segera dilakukan pemindah tanganan, potensi biaya memadai, dan sebagainya).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,


Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP 19720316 199903 1 002



7

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
KONDISI BMN RUSAK BERAT**
Nomor : B-263/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Dengan ini menyatakan bahwa sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusan pada Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Barat sudah Rusak Berat tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,


Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 68115 TELEPON/FAKSIMILE (0986) 2213347
WEBSITE: www.pabar.bsp.pertanian.go.id E-MAIL: bsp.pabar@pertanian.go.id

**SURAT PERNYATAAN
KEBERADAAN FISIK BARANG**
Nomor : B-266.2/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

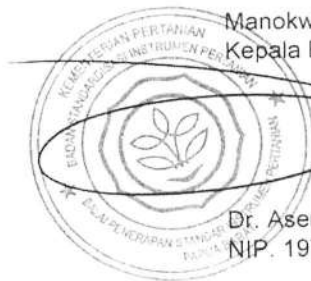
Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Alamat : Jalan Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian
Manokwari, Papua Barat

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam daftar barang milik negara berupa Peralatan dan Mesin yang akan diusulkan Penghapusannya keseluruhan berada dalam pengawasan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si

NIP. 19720316 199903 1 002





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

**DASAR PERTIMBANGAN DILAKUKAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

Nomor : B-265/PL.020/I.12.31/05/2024

Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat yang kondisinya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak menunjang tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat karena

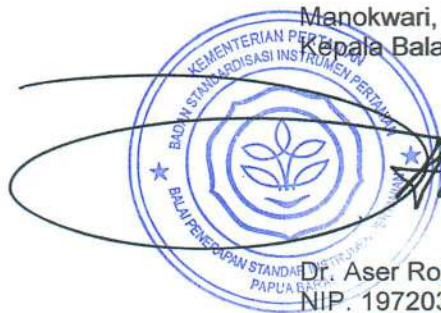
1. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak
2. Barang mempunyai batas waktu kegunaanya
3. Barang telah mengalami perubahan spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain

Apabila BMN dimaksud dipertahankan maka biaya pemeliharaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengadaan baru dan lebih menguntungkan apabila BMN dihapus karena biaya operasional yang lebih besar,

Demikian dasar pertimbangan dilakukan penjualan/penghapusan BMN ini dibuat sebagai bahan data dukung usul persetujuan penjualan BMN pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si

NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-266/PL.020/I.12.31/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aser Rouw, SP, M.Si.
NIP : 19720316 199903 1 002
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Menugaskan kepada :

Nama : Arya Bima Senna , S.P.
NIP : 19931010 201902 1 001
Jabatan : Petugas Simak BMN

Untuk melakukan perubahan kondisi pada SIMAK-BPSIP Papua Barat sebagai petugas operator SIMAK-BMN sesuai lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Milik Negara .
Demikian surat tugas ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manokwari, 17 Mei 2024

Kepala Balai,



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si

NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN/ PENILAIAN BARANG YANG AKAN DI HAPUS
Nomor : B-260 /PL.020/I.12.31/05/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Dr. Aser Rouw, S.P, M. Si	Ketua
2	Herman Rois Tata, SP, MP	Sekretaris
3	Nathaniel Wihiyawari, A.Md.Pi	Anggota
4	Fenty Irianty, S.Si	Anggota
5	Arya Bima Senna, S.P.	Anggota

Setelah mengadakan pemeriksaan/penelitian ini dibuat menurut keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Manokwari
Pada tanggal : 17 Mei 2024

Panitia Penghapusan

1. Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
2. Herman Rois Tata, SP, MP
3. Nathaniel Wihiyawari, A.Md.Pi
4. Fenty Irianty, S.Si
5. Arya Bima Senna, S.P.



Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Barang Milik Negara Yang Akan Di Hapus

Kode KPB/Satker : 450871

Nama KPB/Satker : Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Papua Barat

NO	Uraian Barang Milik Negara											Keterangan
	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah Unit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai IP (Rp)	Nilai Buku	Kondisi	Harga Limit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Peralatan dan Mesin											
1	3050204004	22	A.C. Split	LG	1	04/08/2011	4.912.500	0	0	Rusak Berat	0	
2	3050204004	23	A.C. Split	LG	1	20/06/2011	4.912.500	0	0	Rusak Berat	0	
3	3050204004	26	A.C. Split	LG	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
4	3050204004	27	A.C. Split	LG	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
5	3050204004	28	A.C. Split	Panasonic	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
6	3050204004	29	A.C. Split	Panasonic	1	04/06/2015	5.500.000	0	0	Rusak Berat	0	
7	310012001	14	Pc. Unit	APPLE I MAC MF 086	1	10/05/2015	20.000.000	0	0	Rusak Berat	0	
8	310012001	17	Pc. Unit	Acer Veriton X480	1	14/12/2009	7.573.104	0	0	Rusak Berat	0	
9	310012001	18	Pc. Unit	ASUS PC MD32CD-K-ID004DD Intel Core I5-7400	1	25/20/2017	13.164.000	0	0	Rusak Berat	0	
10	3100102003	9	Note Book	Toshiba Portege	1	14/02/2013	18.000.000	0	0	Rusak Berat	0	
11	3100102003	11	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)	1	25/04/2016	12.487.000	0	0	Rusak Berat	0	
12	3100102003	12	Note Book	Asus Notebook Pro P2420L (Core i7-5500u)	1	25/04/2016	12.487.000	0	0	Rusak Berat	0	



Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002

Panitia Penghapusan

1. Dr. Aser Rouw, SP, M.Si

2. Herman Rois Tata, SP, MP

3. Nathaniel Wihiyawari, A.Md.Pi

4. Fenty Irianty, S.Si

5. Arya Bima Senna, S.P.

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list members]



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

NOMOR : 011/KPTS/PL.320/H.12.31/01/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dalam keadaan rusak berat dan untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara perlu dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat;
- c. bahwa pegawai dan/atau pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang pembentukan panitia penghapusan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 299/KM.06/2016 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT.

Kesatu : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Aser Rouw, SP, M. Si NIP. 19720316 199903 1 002	Kepala Balai	Ketua Tim
2.	Herman Rois Tata, SP, MP NIP. 19760827 200812 1 002	Kepala Subbagian. TU	Sekretaris

3.	Fenty Irianty, S. Si NIP. 19840228 200912 2 003	PPK	Anggota
4.	Arya Bima Senna, SP NIP. 19931010 201902 1 001	Petugas Pengelola BMN	Anggota
5.	Novita Indrawati, S. Sos NIP. 19941114 202203 2 001	Petugas Barang Persediaan	Anggota
6.	Nataniel Wihiyawari, A. Md, Pi NIP. 19751103 200604 1 008	Petugas Pengelola Rumah Tangga	Anggota

Kedua : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Barang Milik Negara yang sesuai ketentuan harus dihapuskan.
2. Membuat usulan penghapusan Barang Milik Negara.
3. Mengikuti Proses Lelang Barang Milik Negara.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penghapusan Barang Milik Negara bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

Keempat : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

Kelima : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal 12 Januari 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Foto Barang Milik Negara Yang Akan Di Hapus

Kode KPB/Satker : 450871

Nama KPB/Satker : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat

NO	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	NUP	Jumlah Unit	Foto
1	3050204004	A.C. Split	LG	22	1	
2	3050204004	A.C. Split	LG	23	1	
3	3050204004	A.C. Split	LG	26	1	
4	3050204004	A.C. Split	LG	27	1	
5	3050204004	A.C. Split	Panasonic	28	1	
6	3050204004	A.C. Split	Panasonic	29	1	

7	310012001	P. C. Unit	APPLE I MAC MF 086	14	1	
8	310012001	P. C. Unit	Acer Veriton X480	17	1	
8	310012001	P. C. Unit	ASUS PC MD32CD- K-ID004DD INTEL CORE I57400	18	1	
9	3100102003	Notebook	Toshiba Portage	9	1	
10	3100102003	Notebook	Asus Notebook Pro P2420I (core i7- 5500u)	11	1	
11	3100102003	Notebook	Asus Notebook Pro P2420I (core i7- 5500u)	12	1	



Manokwari, 17 Mei 2024
Kepala Balai,

Dr. Aser Rouw, SP, M.Si
NIP. 19720316 199903 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044
Website : www.bsip.pertanian.go.id Email : bsip@pertanian.go.id

Nomor : B-1151/PL.320/H/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN
pada satker BPSIP Papua Barat
(Kode Satker 018093300450871000KD)

3 Oktober 2024

Yth.
Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) nomor B-3186/PL.320/H.12/09/2024 tanggal 24 September 2024 hal Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (BPSIP Papua Barat), dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, kami bermaksud mengusulkan Permohonan Penerbitan Keputusan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada satker BPSIP Papua Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan kelengkapan data dukung sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Persetujuan Penghapusan BMN dari KPKNL;
2. Fotocopy Salinan Risalah Lelang;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut Penghapusan Barang Milik Negara dimaksud.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian,



Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.
NIP 196903141994031001

Tembusan:
1. Kepala BBPSIP
2. Kepala BPSIP Papua Barat

**BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT**

No	Kode Barang	NUP	Nama/ Uraian Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Limit	Keterangan
1	3010102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota TGN40R (Kijang Innova)	13 April 2007	200.000.000	37.926.000	Rusak Berat
Jumlah						200.000.000	37.926.000	

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian,



Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.
NIP 196903141994031001



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 27/Kpts/PL.320/A/01/2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
(KODE SATKER 018.09.3300.450871 KD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa barang milik negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah dijual secara lelang melalui KPKNL Sorong;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Pengguna Barang Memiliki Kewenangan dan Tanggung Jawab menetapkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Surat Perintah Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 137/KPTS/KP.410/M/08/2024 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Nomor S-28/MK.6/KNL.1703/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Balai Penerapan Standar Pertanian Papua Barat;
 2. Risalah lelang Nomor 193/17.03/2024-01 tanggal 27 Juni 2024;
 3. Surat Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor B-1151/PL.320/H/10/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Hal Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN pada Satker BPSIP Papua Barat (Kode Satker 018.09.3300.450871000KD)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

- KETIGA : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disertai bukti penghapusan dari Daftar Barang kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- KEEMPAT : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025



a.n. MENTERI PERTANIAN
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D
NIP 196508301998031001

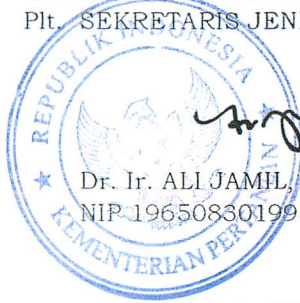
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat;
7. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 27 Kpts/PL.320/A/01/2025
TANGGAL : 9 Januari 2025

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi	Ket
1	3010102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota TGN40R (Kijang Innova)	1	2007	200.000.000,00	37.926.000,00	Rusak Berat	Nomor S-28/MK.6/KNL.1703/2024 tanggal 21 Mei 2024
	Jumlah :				1		200.000.000,00	37.926.000,00		

a.n. MENTERI PERTANIAN
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



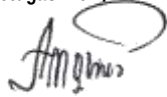
Dr. Ir. ALI JAMIL, M.P., Ph.D
NIP. 196508301998031001

CATATAN HASIL REVIU (CHR)
LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA/B SEMESTER I TA 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun	: Imam Prayudhi
	Tanggal	: 12 Juli 2025
	Direviu KT	: Kristina Tambunan
	Tanggal/paraf	: 12 Juli 2025
	Disetujui PT	: Amperawati
	Tanggal/paraf	: 12 Juli 2025
UAPA : Kementerian Pertanian (018)		
UAPPA/B-Es 1 : Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
UAPPA/B-W : Papua Barat (3300)		
UAKPA/B : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat (450871)		
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi :		
1	Tidak terdapat Perbedaan pada Rekonsiliasi SAKTI-SPAN (Monsakti - Rekonsiliasi)	KKR - PA
Penyajian LK		
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
1	Realisasi belanja barang pada LRA Rp996,737,601,00, sedang di LO Rp1.038.197.270,00. Terjadi selisih Rp41.459.669,00 dengan rincian yang belum diketahui	
B. Laporan Operasional (LO)		
1	Beban Pegawai senilai Rp1.068.586.324 sedangkan Belanja Pegawai senilai Rp935.567.348 sehingga terdapat selisih senilai Rp133.018.976 dikarenakan belanja gaji juni yang dibayarkan pada bulan Juli (sudah ditindaklanjuti pada saat reviu).	KKR - LO
2	Tidak terdapat selisih antara Beban persediaan pada LO Rp1.626.000,00 dengan di aplikasi transaksi pemakaian	
3	Terdapat selisih senilai Rp9.728.180 antara Beban barang jasa di LO senilai Rp620.976.758 sama dengan di Neraca Percobaan kas senilai Rp611.248.578,00 berasal dari kwitansi TUP yg blm di SPM kan. (sudah ditindaklanjuti pada saat reviu).	
4	Terdapat selisih senilai Rp 29.215.489 antara Beban pemeliharaan di LO senilai Rp340.718.359 sama dengan belanja pemeliharaan di Neraca Percobaan kas senilai Rp311.502.870 berasal dari kwitansi TUP yg blm di SPM kan senilai Rp 29.215.489. (sudah ditindaklanjuti pada saat reviu).	
5	Tidak terdapat beban belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (526)	
C. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		
1	Terdapat perbedaan antara saldo awal ekuitas 2025 senilai Rp82.829.319.669 dengan saldo neraca akhir 2024 Rp82.707.233.572. Perbedaan tersebut dikarenakan ekuitas awal diambil dari nilai ekuitas akhir Juni 2024.	KKR - LPE
2	Nilai akun DDEL senilai Rp81.301.900	
3	Nilai akun DKEL senilai Rp1.932.304.949	
4	Tidak terdapat aset yang diterima dari satker yang lain	
5	Tidak terdapat aset keluar ke entitas lain	
6	Tidak terdapat koreksi nilai persediaan minus	
D. Neraca		
1	Saldo kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp60.000.000 sesuai LPJ Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2025.	KKR - Neraca
2	Saldo Bendaharawan Penerimaan Nihil (Rp0,00) sesuai dengan LPJ	
3	Terdapat saldo persediaan Rp315.300.000,00 sesuai dengan BA stock opname No. B-471/KU.140/H.12.31/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 berupa persediaan yang berasal dari Hewan dan tanaman yang diserahkan untuk masyarakat/pemda	
4	Terdapat saldo piutang bukan pajak senilai Rp2.412.400 yang berasal dari sewa rumah dinas yang dipotong dari gaji induk bulan Juli 2025 (SPM 00074T/450871/2025).	
5	tidak terdapat saldo bagian lancar TP-TGR	
6	Aset tetap senilai Rp82.796.118.069 ,00 terdiri dari 1) Tanah senilai Rp53.125.000.000; 2) Peralatan dan Mesin senilai Rp6.225.270.375; 3) GB senilai Rp32.926.434.836 ; 4) JIJ senilai Rp629.266.110; 5) Aset Tetap Lainnya senilai Rp480.000.	
7	Terdapat aset lain-lain senilai Rp115.536.104 sudah diusulkan untuk penghapusan dan pada saat reviu, proses usulan tersebut menunggu persetujuan dari Sekjen	
8	Total Luas Lahan dimiliki seluas 16,355 Ha namun yang sudah dimanfaatkan sebanyak 8,485 Ha sedangkan yang belum dimanfaatkan sebanyak 7,87 Ha. Hal tersebut belum jelaskan dalam CaLBMN	
E. Neraca Aset Tetap		
1	Aset Tanah senilai Rp53.125.000.000 ; sudah bersertifikat dan sudah memiliki status PSP	KKR - Neraca Tetap
2	Total aset peralatan mesin yang belum berstatus PSP senilai Rp691.067.345 sedang kan total aset gedung bangunan	
3	Terdapat aset tak berwujud senilai Rp6.115.000 berupa software yang sudah tidak dipakai	

Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
F. CaLK dan CaLBMN		
1	Pengungkapan dalam CaLK sudah memadai.	KKR - CaLK dan CaLBMN
2	pengungkapan dalam Cal BMN sudah memadai	
G. Koreksi/Perbaikan yang belum dilakukan		
1	Menelusuri selisih Belanja Barang antara LRA dan LO	
2	Mereklas Aset tak berwujud kedalam Aset yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan untuk selanjutnya memproses penghapusan Aset Lain-lain.	
3	Mengajukan proses PSP terhadap aset peralatan mesin yang belum berstatus PSP senilai Rp691.067.345 dan aset gedung bangunan yang belum berstatus PSP senilai Rp179.970.000	
4	Menjelaskan total pemanfaatan lahan dalam CaLBMN	

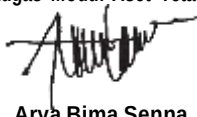
Petugas Penyusun GLP



Christina Heni Wahyuningrum

No. HP 0813-2558-1033

Petugas Modul Aset Tetap



Arya Bima Senna

No. HP 085396317528

Bogor, 12 Juli 2025

Pereviu



Imam Prayudhi

*) Coret yang tidak perlu